



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2005-2025**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

**PERUBAHAN RPJPD**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH**

**KABUPATEN SOPPENG**

*Tahun 2005-2025*



**Pemerintah Kabupaten Soppeng**

**Tahun 2018**



**BUPATI SOPPENG**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR  
9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2005 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 - 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

**dan**

**BUPATI SOPPENG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR  
9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG KABUPATEN SOPPENG TAHUN  
2005 – 2025**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010 Nomor 111; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf f Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

2. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

(1) RPJPD Tahun 2005 - 2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan;

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

3. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi:

### **Pasal 3**

(1) Sistematika Perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Analisis Isu-Isu Strategis

BAB IV Visi dan Misi Daerah

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB VI Penutup.

(2) Rincian RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Pasal 4 dihapus

5. Pasal 5 dihapus

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 7**

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, maka Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode 2005-2025.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 27 Desember 2018

**BUPATI SOPPENG,**



**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,**



**A. TENRI SESSU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR 8.221.18

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR**  
**9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**PANJANG KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2005 – 2025**

I. UMUM

Kabupaten Soppeng merupakan sebagai salah satu kabupaten kota di Indonesia, terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan guna menciptakan peluang bagi segenap komunitas sesuai dengan potensi spesifik yang dimilikinya. Bagi Kabupaten Soppeng, pembangunan juga dapat menjadi media bagi berkembangnya tatanan internal yang berbasis wilayah seperti di tingkat Kecamatan serta ditingkatkan Kelurahan dan Desa maupun tatanan fungsional seperti lembaga dan organisasi kemasyarakatan menurut cara yang dipilih secara mandiri, sehingga pada gilirannya Kabupaten Soppeng dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tatanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian tercipta sinergitas pembangunan antara kabupaten/kota dengan provinsi dan pemerintah pusat dalam membangun suatu tatanan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergitas tersebut secara konseptual harusnya terbangun mulai dari tahap perencanaan, salah satunya melalui dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. RPJPD merupakan dokumen yang memberikan arahan jangka panjang atas pembangunan sebuah daerah. Tanpa arahan jangka panjang tersebut, maka empat periode RPJMD yang berlaku selama periode RPJPD tidak akan memiliki acuan dalam hal perumusan visi dan

misi, tujuan dan sasaran pokok, serta indikator dan target kinerja yang hendak dicapai. Ini akan berakibat pula pada lemahnya keterkaitan dengan arahan jangka panjang provinsi dan nasional, karena RPJPD Kabupaten/Kota mengacu kepada RPJPD provinsi dan nasional. Selain itu, bila RPJPD tidak ada maka konsistensi penyelenggaraan pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak akan terjamin, karena RPJPD memperhatikan arahan RTRW dalam perumusan arah pembangunannya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah Pemerintah Kabupaten Soppeng telah memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 - 2025, dan telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau RPJMD dengan periode 2005 - 2010, periode 2010 - 2015 dan periode 2016 - 2021. Namun demikian, dalam perjalanannya terdapat kondisi sehingga Dokumen RPJPD yang dimiliki tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Permendagri 86 tahun 2017 telah memberi pengaturan yang jelas dan detail tentang tata cara penyusunan dan isi yang harus terkandung dalam RPJPD. Salah satu poin yang mendasar adalah bahwa RPJPD merumuskan sasaran pokok dan indikator kinerja serta target kinerja dari sasaran pokok tersebut guna menjadi acuan bagi setiap periode RPJMD. Begitu pula RPJPD merumuskan arah kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pokok tersebut dan arah kebijakan tersebut menjadi acuan bagi RPJMD sesuai periodenya. RPJPD Kabupaten Soppeng yang berlaku selama ini belum sepenuhnya memenuhi unsur - unsur yang ditekankan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut, sehingga dilakukan revisi tanpa mengubah rumusan visi. Revisi lebih ditujukan untuk

memenuhi unsur-unsur yang ditekankan dalam Permendagri 86 tahun 2017 terutama terkait dengan rumusan misi, tujuan dan sasaran pokok, indikator kinerja dan target kinerja dari sasaran pokok serta arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok pada akhir periode RPJPD (2025) dan akhir periode RPJMD yang berlaku. Karena pada revisi ini periode RPJMD yang berlaku adalah periode 2014 - 2019 dan periode 2020 - 2025, maka fokus revisi ditekankan pada dua periode tersebut. Sedangkan dua periode sebelumnya yakni RPJMD periode 2005 - 2009 dan 2009 - 2014 hanya diuraikan garis besar arah pembangunannya, berhubungan periode tersebut telah terlaksana.

Bagi Kabupaten Soppeng, keinginan untuk melakukan perubahan RPJPD lebih disebabkan oleh dinamika lingkungan strategis yang mengalami perubahan secara dinamis, baik, dari sisi *instrumental input* (seperti munculnya berbagai regulasi dan kebijakan baru pemerintah pusat) maupun *environmental input* (seperti menguatnya arus demokratisasi, meluasnya praktek desentralisasi dan otonomi daerah, bergesernya cara pandang pembangunan, dan ketidak sesuaian tahun periode dokumen RPJPD).

## . II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 119.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2005-2025**





## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapannya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menerus berupaya meningkatkan Kinerja Pemerintah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah.

RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 merupakan pedoman rencana pembangunan 20 tahunan yang akan dijabarkan pada rencana pembangunan 5 tahunan. Perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur wilayah, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, politik, hukum, ketertiban dan ketentraman masyarakat, pemerintahan dan pembangunan desa, dan aparatur.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama merumuskan dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJPD dan Pemerintah Daerah kabupaten Soppeng berharap seluruh masyarakat dan dunia usaha dapat membantu dalam implementasi dan pengawasannya.



Dengan adanya Rancangan Akhir Perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, Mudah-mudahan Perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dapat di tetapkan dan dipakai sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan RPJMD dan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya sehingga arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Soppeng lebih terarah dan berkelanjutan menuju Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik kedepannya.

Watansoppeng, Desember 2018

**BUPATI SOPPENG,**

**H. A. KASWADI RAZAK**



## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Bagan/Gambar.....	xiii
<b>BAB I . PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
1.1.    LATAR BELAKANG.....	2
1.2.    DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJPD.....	5
1.3.    HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA.....	9
1.4.    MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
1.5.    SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
<b>BAB II . GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>15</b>
2.1.    ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	15
2.1.1.    Aspek Geografi.....	15
2.1.2.    Aspek Demografi.....	21
2.2.    ASPEK KESEJAHTERAAN MASAYARAKAT.....	25
2.2.1.    Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	25
2.2.2.    Fokus Kesejahteraan Sosial.....	39
2.2.3.    Fokus Seni Budaya.....	53
2.3.    ASPEK LAYANAN UMUM.....	54
2.3.1.    Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib.....	54
2.3.2.    Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	169
2.3.3.    Penunjang Urusan.....	182
2.4.    ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	198
2.4.1.    Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.....	199
2.4.2.    Nilai Tukar Petani.....	199
2.5.    KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN.....	1998
2.5.1.    Perkiraan mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan.....	206



BAB III . PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....	213
3.1.    PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	214
3.2.    ISU-ISU STRATEGIS .....	225
BAB IV . VISI DAN MISI DAERAH .....	240
4.1.    VISI .....	240
4.2.    MISI .....	242
4.3.    TUJUAN DAN SASARAN .....	246
BAB V . ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH .....	249
5.1.    ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH.....	249
5.2.    SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH UNTUK MASING-MASING MISI.....	250
5.3.    TAHAPAN DAN PRIORITAS .....	258
5.3.1.    Tahapan Pertama (2005-2010).....	258
5.3.2.    Tahapan Kedua (2011-2015) .....	259
5.3.3.    Tahapan Ketiga (2015-2020) .....	260
5.3.4.    Tahapan Keempat (2020-2025).....	261
BAB VI . PENUTUP DAN KAEDAH PELAKSANAAN .....	26967



## Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun 2015-2017 .....	22
Tabel 2. 2 Perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2017 .....	23
Tabel 2. 3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2017 .....	24
Tabel 2. 4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kab. Soppeng .....	25
Tabel 2. 5 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Soppeng .....	27
Tabel 2. 6 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Soppeng .....	29
Tabel 2. 7 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Soppeng .....	31
Tabel 2. 8 Angka Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017 .....	36
Tabel 2. 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2021.....	39
Tabel 2. 10 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017.....	39
Tabel 2. 11 Usia Harapan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2017.....	40
Tabel 2. 12 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2016 s/d 2017 .....	42
Tabel 2. 13 Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2016 s/d 2017.....	42
Tabel 2. 14 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Soppeng Tahun 2016 s/d 2017 .....	43
Tabel 2. 15 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	44
Tabel 2. 16 Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	44
Tabel 2. 17 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	45
Tabel 2. 18 Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng .....	46
Tabel 2. 19 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap Total PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng .....	47
Tabel 2. 20 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng .....	47
Tabel 2. 21 Produksi sektor pertanian pertanian/perkebunan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	48
Tabel 2. 22 sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016-2017.....	49
Tabel 2. 23 Produksi Sektor Perkebunan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	50
Tabel 2. 24 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	50
Tabel 2. 25 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	51
Tabel 2. 26 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	51



Tabel 2. 27 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng .....	52
Tabel 2. 28 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB .....	52
Tabel 2. 29 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2016-2017 .....	53
Tabel 2. 30 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d 2017 Kabupaten Soppeng .....	53
Tabel 2. 31 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Pendidikan Tahun 2016 s.d 2017 .....	54
Tabel 2. 32 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2017 .....	56
Tabel 2. 33 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2017 .....	57
Tabel 2. 34 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng .....	59
Tabel 2. 35 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Kesehatan.....	60
Tabel 2. 36 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2017.....	62
Tabel 2. 37 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng.....	63
Tabel 2. 38 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2017 .....	64
Tabel 2. 39 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Tahun 2016-2017 .....	64
Tabel 2. 40 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Tahun 2016-2017.....	65
Tabel 2. 41 Rasio posyandu per satuan balita Tahun 2016-2017.....	65
Tabel 2. 42 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Tahun 2016-2017.....	66
Tabel 2. 43 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Tahun 2016-2017 .....	67
Tabel 2. 44 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Tahun 2016-2017 .....	67
Tabel 2. 45 Rasio tenaga medis per satuan Penduduk Tahun 2016-2017.....	68
Tabel 2. 46 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani .....	69
Tabel 2. 47 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2016-2017.....	70
Tabel 2. 48 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016-2017 ....	70
Tabel 2. 49 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2016-2017 .....	71
Tabel 2. 50 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2016-2017.....	72
Tabel 2. 51 Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Tahun 2016-2017.....	73
Tabel 2. 52 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Tahun 2016-2017 .....	73
Tabel 2. 53 Cakupan balita pneumonia yang ditangani Tahun 2016-2017 .....	74
Tabel 2. 54 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2016-2017.....	74
Tabel 2. 55 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2016-2017 .....	75
Tabel 2. 56 Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk Tahun 2016-2017.....	76
Tabel 2. 57 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Tahun 2016-2017.....	77
Tabel 2. 58 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2016-2017.....	77
Tabel 2. 59 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2016-2017 .....	78
Tabel 2. 60 Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2016-2017 .....	78



Tabel 2. 61 Angka Kejadian Malaria Tahun 2016-2017 .....	79
Tabel 2. 62 Tingkat Kematian Akibat Malaria Tahun 2016-2017.....	79
Tabel 2. 63 Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Tahun 2016-2017 .....	80
Tabel 2. 64 Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Tahun 2016-2017 .....	81
Tabel 2. 65 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2016-2017.....	81
Tabel 2. 66 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir Tahun 2016-2017.....	82
Tabel 2. 67 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir Tahun 2016-2017.....	82
Tabel 2. 68 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2016-2017 .....	83
Tabel 2. 69 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2016-2017 .....	84
Tabel 2. 70 Cakupan Puskesmas Tahun 2016-2017 .....	84
Tabel 2. 71 Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2016-2017 .....	85
Tabel 2. 72 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016-2017.....	86
Tabel 2. 73 Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2016-2017 .....	86
Tabel 2. 74 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani Tahun 2016-2017.....	87
Tabel 2. 75 Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2016-2017.....	87
Tabel 2. 76 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin Tahun 2016-2017.....	88
Tabel 2. 77 Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2016-2017.....	88
Tabel 2. 78 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2016-2017.....	89
Tabel 2. 79 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2016-2017 .....	89
Tabel 2. 80 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2016-2017 .....	90
Tabel 2. 81 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	90
Tabel 2. 82 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	96
Tabel 2. 83 Rumah Layak Huni Tahun 2016-2017 .....	97
Tabel 2. 84 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2016-2017 .....	97
Tabel 2. 85 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2016-2017.....	97
Tabel 2. 86 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Ketenteraman, ketertiban umum .....	97
Tabel 2. 87 Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng.....	98
Tabel 2. 88 penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng.....	99
Tabel 2. 89 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng .....	100
Tabel 2. 90 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng .....	100
Tabel 2. 91 Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng .....	101



Tabel 2. 92 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Sosial .....	102
Tabel 2. 93 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2016-2017 .....	103
Tabel 2. 94 Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2017 .....	104
Tabel 2. 95 Persentase PMKS Skala Kab. yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar Tahun 2016-2017.....	104
Tabel 2. 96 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social Tahun 2016-2017.....	105
Tabel 2. 97 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2017.....	105
Tabel 2. 98 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2017 .....	106
Tabel 2. 99 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2017 .....	107
Tabel 2. 100 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2017 Kabupaten Soppeng .....	108
Tabel 2. 101 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	109
Tabel 2. 102 Persentase perempuan dilembaga pemerintahan Tahun 2016-2017Kabupaten Soppeng.....	110
Tabel 2. 103 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan .....	115
Tabel 2. 104 Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2017 .....	116
Tabel 2. 105 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Tahun 2016-2017 .....	116
Tabel 2. 106 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2016-2017 .....	117
Tabel 2. 107 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanian .....	118
Tabel 2. 108 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016-2017 .....	118
Tabel 2. 109 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2016-2017.....	119
Tabel 2. 110 Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2016-2017 .....	119
Tabel 2. 111 Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup .....	119
Tabel 2. 112 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	121
Tabel 2. 113 Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng.....	122
Tabel 2. 114 Ratio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng.....	122
Tabel 2. 115 Ratio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng .....	123
Tabel 2. 116 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng.....	124
Tabel 2. 117 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng .....	125
Tabel 2. 118 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	125
Tabel 2. 119 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng.....	126
Tabel 2. 120 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng.....	127



Tabel 2. 121 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng .	128
Tabel 2. 122 Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2017 .....	129
Tabel 2. 123 Jumlah PKK Aktif Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng .....	129
Tabel 2. 124 Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng .....	130
Tabel 2. 125 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng .....	131
Tabel 2. 126 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	131
Tabel 2. 127 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2017 .....	133
Tabel 2. 128 Total Fertility Rate Tahun 2016-2017 .....	133
Tabel 2. 129 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Tahun 2016-2017 .....	134
Tabel 2. 130 Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2016-2017 .....	134
Tabel 2. 131 Rata-rata jumlah anak perkeluarga Tahun 2016-2017 .....	135
Tabel 2. 132 Ratio Akseptor KB Tahun 2016-2017 .....	136
Tabel 2. 133 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun 2016-2017 .....	136
Tabel 2. 134 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Tahun 2016-2017 .....	137
Tabel 2. 135 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Tahun 2016-2017 .....	137
Tabel 2. 136 Tabel 2. 137 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2016-2017 .....	138
Tabel 2. 138 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2016-2017..	138
Tabel 2. 139 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2016- 2017 .....	139
Tabel 2. 140 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Tahun 2016-2017 .....	139
Tabel 2. 141 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2016-2017 .....	140
Tabel 2. 142 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2016-2017 .....	140
Tabel 2. 143 Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2016-2017 .....	141
Tabel 2. 144 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2016-2017 .....	141
Tabel 2. 145 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2016-2017 .....	142
Tabel 2. 146 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Tahun 2016-2017 .....	142
Tabel 2. 147 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/kelurahan Tahun 2016-2017 .....	143
Tabel 2. 148 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2016-2017 .....	143
Tabel 2. 149 Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2016-2017 .....	144



Tabel 2. 150 Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Tahun 2016-2017.....	144
Tabel 2. 151 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2016-2017.....	145
Tabel 2. 152 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Tahun 2016-2017.....	145
Tabel 2. 153 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tahun 2016-2017.....	146
Tabel 2. 154 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar perhubungan .....	146
Tabel 2. 155 Rasio Ijin Trayek Tahun 2016-2017.....	147
Tabel 2. 156 Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2016-2017 .....	148
Tabel 2. 157 Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2016-2017 .....	148
Tabel 2. 158 Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2016-2017 .....	149
Tabel 2. 159 Rasio Panjang Jalan Tahun 2016-2017 .....	149
Tabel 2. 160 Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika .....	150
Tabel 2. 161 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016-2017.....	150
Tabel 2. 162 Cakupan Layanan Komunikasi Tahun 2016-2017 .....	151
Tabel 2. 163 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2016-2017.....	152
Tabel 2. 164 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2016-2017.....	152
Tabel 2. 165 Proporsi rumah tangga yang memiliki Komputer Pribadi Tahun 2016-2017.....	153
Tabel 2. 166 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	153
Tabel 2. 167 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2017.....	154
Tabel 2. 168 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2017.....	155
Tabel 2. 169 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal.....	155
Tabel 2. 170 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016-2017.....	156
Tabel 2. 171 Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016-2017.....	156
Tabel 2. 172 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Tahun 2016-2017... ..	157
Tabel 2. 173 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga.....	157
Tabel 2. 174 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Tahun 2016-2017.....	158
Tabel 2. 175 Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2016-2017 .....	158
Tabel 2. 176 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Tahun 2016-2017.....	159
Tabel 2. 177 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2016-2017 .....	159
Tabel 2. 178 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2016-2017 .....	160
Tabel 2. 179 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik .....	160
Tabel 2. 180 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian .....	162
Tabel 2. 181 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan .....	162



Tabel 2. 182 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan .....	164
Tabel 2. 183 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2017.....	165
Tabel 2. 184 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2016-2017 .....	165
Tabel 2. 185 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Tahun 2016-2017 .....	166
Tabel 2. 186 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Tahun 2016-2017.....	166
Tabel 2. 187 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Tahun 2016-2017.....	167
Tabel 2. 188 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2016-2017.....	167
Tabel 2. 189 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan .....	168
Tabel 2. 190 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Tahun 2016-2017 .....	168
Tabel 2. 191 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2016-2017 .....	169
Tabel 2. 192 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2016-2017.....	169
Tabel 2. 193 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan Pertanian .....	170
Tabel 2. 194 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Tahun 2016-2017 .....	171
Tabel 2. 195 sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016-2017.....	172
Tabel 2. 196 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016-2017.....	173
Tabel 2. 197 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Tahun 2016-2017.....	174
Tabel 2. 198 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Tahun 2016-2017.....	175
Tabel 2. 199 Cakupan bina kelompok petani Tahun 2016-2017 .....	176
Tabel 2. 200 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan Kehutanan (bukan kewenangan kab).....	176
Tabel 2. 201 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral .....	177
Tabel 2. 202 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perdagangan.....	177
Tabel 2. 203 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perindustrian .....	178
Tabel 2. 204 Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2017 .....	178
Tabel 2. 205 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Transmigrasi .....	178
Tabel 2. 206 Persentase Transmigran Swakarsa Tahun 2016-2017 .....	179
Tabel 2. 207 Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perikanan .....	179
Tabel 2. 208 Produksi perikanan Tahun 2016-2017 .....	180
Tabel 2. 209 Konsumsi ikan Tahun 2016-2017.....	180
Tabel 2. 210 Produksi perikanan kelompok nelayan Tahun 2016-2017.....	181
Tabel 2. 211 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial Tahun 2016-2017.....	181
Tabel 2. 212 Tukar Nelayan Tahun 2016-2017.....	182
Tabel 2. 213 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan.....	182
Tabel 2. 214 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Keuangan.....	185
Tabel 2. 215 Persentase SILPA terhadap Pendapatan Tahun 2016-2017.....	186



Tabel 2. 216 Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja) Tahun 2016-2017 .....	186
Tabel 2. 217 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tahun 2016-2017 .....	187
Tabel 2. 218 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2016-2017.....	187
Tabel 2. 219 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2016-2017.....	188
Tabel 2. 220 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2017.....	189
Tabel 2. 221 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Tahun 2016-2017.....	189
Tabel 2. 222 Penetapan APBD Kab. Soppeng Tahun 2016-2017 .....	190
Tabel 2. 223 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan .....	190
Tabel 2. 224 Rata-rata lama sekolah pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2016-2017.....	191
Tabel 2. 225 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2016- 2017.....	191
Tabel 2. 226 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural Tahun 2016-2017 .....	192
Tabel 2. 227 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2016-2017.....	193
Tabel 2. 228 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2016-2017 .....	193
Tabel 2. 229 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tahun 2016-2017.....	194
Tabel 2. 230 Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan .....	194
Tabel 2. 231 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pengawasan .....	194
Tabel 2. 232 Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2016-2017.....	195
Tabel 2. 233 Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2016-2017 .....	195
Tabel 2. 234 Jumlah Temuan BPK Tahun 2016-2017 .....	196
Tabel 2. 235 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pengawasan .....	196
Tabel 2. 236 Aspek Daya Saing Daerah .....	199
Tabel 2. 237 Nilai Tukar Petani Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	200
Tabel 2. 238 Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan.....	203
Tabel 2. 239 Kelas Kemampuan Lahan.....	204
Tabel 2. 240 Nilai Tukar Petani Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng.....	205
Tabel 2. 241 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih .....	206
Tabel 2. 242 Proyeksi Penyediaan Air di Kabupaten Soppeng .....	206
Tabel 2. 243 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Soppeng .....	207
Tabel 2. 244 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Pangan .....	208
Tabel 2. 245 Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Soppeng .....	210
Tabel 3. 1 Isu-Isu Strategis Daerah .....	233
Tabel 4. 1 Hubungan Pokok Visi dan Misi.....	245
Tabel 4. 2 Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran RPJPD Kab. Soppeng .....	247
Tabel 5. 1 Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja RPJPD Kabupaten Soppeng.....	252
Tabel 5. 2 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 .....	254
Tabel 5. 3 Target Kinerja setiap Tahapan dan Prioritas RPJPD Kabupaten Soppeng 2005- 2025.....	263



## Daftar Bagan/Gambar

Gambar 1. 1	Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencana Pembangunan Lainnya .....	11
Gambar 2. 1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Soppeng .....	15
Bagan 2. 1	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng (%) Tahun 2013-2017 .....	32
Bagan 2. 2	Preview Perkembangan Inflasi Kab. Soppeng Tahun 2014-2017 .....	33
Bagan 2. 3	Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2017 .....	38

# BAB I

## Pendahuluan

*"Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan"*

SOPPENG

ᑭᑭᑭ ᑭᑭ ᑭᑭ ᑭᑭᑭ ᑭᑭ ᑭᑭ ᑭᑭ ᑭᑭ ᑭᑭ





## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya Pembangunan sejatinya adalah sebuah proses perubahan sosial yang dilakukan secara terencana dengan partisipatori yang luas dari seluruh masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik (kesejahteraan, keadilan, kemandirian, dsb.) bagi manusia dan komunitas dalam suatu wilayah. Pembangunan harus menempatkan manusia dan komunitas atau masyarakat sebagai tujuan, muara, dan bahkan esensi pembangunan.

Kabupaten Soppeng merupakan sebagai salah satu kabupaten kota di Indonesia, terus melaksanakan pembangunans ecara berkelanjutan guna menciptakan peluang bagi segenap komunitas sesuai dengan potensi spesifik yang dimilikinya. Bagi Kabupaten Soppeng, pembangunan juga dapat menjadi media bagi berkembangnya tatanan internal yang berbasis wilayah seperti di tingkat Kecamatan serta ditingkatan Kelurahan dan Desa maupun tatanan fungsional seperti lembaga dan organisasi kemasyarakatan menurut cara yang dipilih secara mandiri, sehingga pada gilirannya Kabupaten Soppeng dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tatanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian tercipta sinergitas pembangunan antara kabupaten/kota dengan provinsi dan pemerintah pusat dalam membangun suatu tatanan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada tatanan Kabupaten Soppeng semestinya mewujudkan dalam bentuk penciptaan peluang kepada setiap wilayah dan setiap kelompok masyarakat untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas keberadaannya menurut karakteristik budaya dan kearifan lokal masing-masing. Dalam hal ini, budaya lokal bukan hanya sekadar diacu, tetapi juga terus



dikembangkan, antara lain dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendekatan pembangunan ini merupakan interpretasi kreatif dari semangat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dengan tetap mencermati hasil review terhadap muatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan masa berlaku dua puluh tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan masa berlaku RPJPD adalah 20 tahun, mulai dari tahun 2005 hingga 2025. RPJPD berisi gambaran tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dihadapi secara jangka panjang; visi, tujuan dan sasaran pokok yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJPD; misi dan arah kebijakan yang hendak dijalankan selama periode RPJPD; serta indikator dan target kinerja utama pada akhir periode RPJPD serta akhir periode RPJMD dalam kurun waktu berlakunya RPJPD.

RPJPD merupakan dokumen yang memberikan arahan jangka panjang atas pembangunan sebuah daerah. Tanpa arahan jangka panjang tersebut, maka empat periode RPJMD yang berlaku selama periode RPJPD tidak akan memiliki acuan dalam hal perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran pokok, serta indikator dan target kinerja yang hendak dicapai. Ini akan berakibat pula pada lemahnya keterkaitan dengan arahan jangka panjang provinsi dan nasional, karena RPJPD Kabupaten/Kota mengacu kepada RPJPD provinsi dan nasional. Selain itu, bila RPJPD tidak ada maka konsistensi penyelenggaraan pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak akan terjamin, karena RPJPD memperhatikan arahan RTRW dalam perumusan arah pembangunannya.



Permendagri 86 tahun 2017 telah memberi pengaturan yang jelas dan detail tentang tata cara penyusunan dan isi yang harus terkandung dalam RPJPD. Salah satu poin yang mendasar adalah bahwa RPJPD merumuskan sasaran pokok dan indikator kinerja serta target kinerja dari sasaran pokok tersebut guna menjadi acuan bagi setiap periode RPJMD. Begitu pula RPJPD merumuskan arah kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pokok tersebut dan arah kebijakan tersebut menjadi acuan bagi RPJMD sesuai periodenya. RPJPD Kabupaten Soppeng yang berlaku selama ini belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang ditekankan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut, sehingga dilakukan revisi tanpa mengubah rumusan visi. Revisi lebih ditujukan untuk memenuhi unsur-unsur yang ditekankan dalam Permendagri 86 tahun 2017 terutama terkait dengan rumusan misi, tujuan dan sasaran pokok, indikator kinerja dan target kinerja dari sasaran pokok serta arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok pada akhir periode RPJPD (2025) dan akhir periode RPJMD yang berlaku. Karena pada revisi ini periode RPJMD yang berlaku adalah periode 2014-2019 dan periode 2020-2025, maka fokus revisi ditekankan pada dua periode tersebut. Sedangkan dua periode sebelumnya yakni RPJMD periode 2005-2009 dan 2009-2014 hanya diuraikan garis besar arah pembangunannya, berhubungan periode tersebut telah terlaksana.

Bagi Kabupaten Soppeng, keinginan untuk melakukan perubahan RPJPD lebih disebabkan oleh dinamika lingkungan strategis yang mengalami perubahan secara dinamis, baik dari sisi *instrumental input* (seperti munculnya berbagai regulasi dan kebijakan baru pemerintah pusat) maupun *environmental input* (seperti menguatnya arus demokratisasi, meluasnya praktek desentralisasi dan otonomi daerah, bergesernya cara pandang pembangunan, dsb.). Ketidaksesuaian tahun periode dokumen RPJPD

Proses penyusunan revisi RPJPD ini diawali dengan pembentukan tim dan orientasi tim penyusun revisi RPJPD, penelaahan terhadap dokumen Perda RPJPD lama, penyusunan rancangan awal revisi RPJPD, penyajian rancangan RPJPD dan pengesahan RPJPD hasil revisi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan revisi RPJPD ini adalah pendekatan teknokratis berupa aplikasi pendekatan ilmiah dalam



pengolahan data dan perumusan arah pembangunan. Selain itu juga digunakan pendekatan partisipatif untuk mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan. Guna menjamin keterkaitannya dengan arahan pembangunan yang lebih tinggi cakupannya, yakni arahan pembangunan provinsi dan nasional, maka penyusunan RPJPD ini juga menggunakan pendekatan integrasi *top down-bottom up*, selain proses politik.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJPD

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai landasan operasional serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata Ruang wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup dan Startegis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 No. 9).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 86);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103).

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Sebagai negara kesatuan, perencanaan pembangunan di Indonesia bersifat hirarki artinya perencanaan pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Bahkan sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan pilar dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu, Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJP Nasional menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan di daerah. walaupun bersifat hirarkis dokumen RPJPN tetap memberikan ruang bagi daerah dan unit organisasi yang ada didalamnya untuk mengembangkan kreatifitasnya atau desain perencanaan sesuai karakteristik dan dinamika daerah serta sumberdaya yang tersedia.

RPJPD Kabupaten Soppeng bukanlah suatu dokumen yang berdiri sendirian melainkan merupakan suatu rangkaian dokumen perencanaan baik pada level Nasional maupun Provinsi. Semua dokumen perencanaan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwujudkan lebih lanjut dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan demikian penyusunan dokumen perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Propinsi, dan RPJP Daerah sekitar juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng dan memperhatikan Rencana



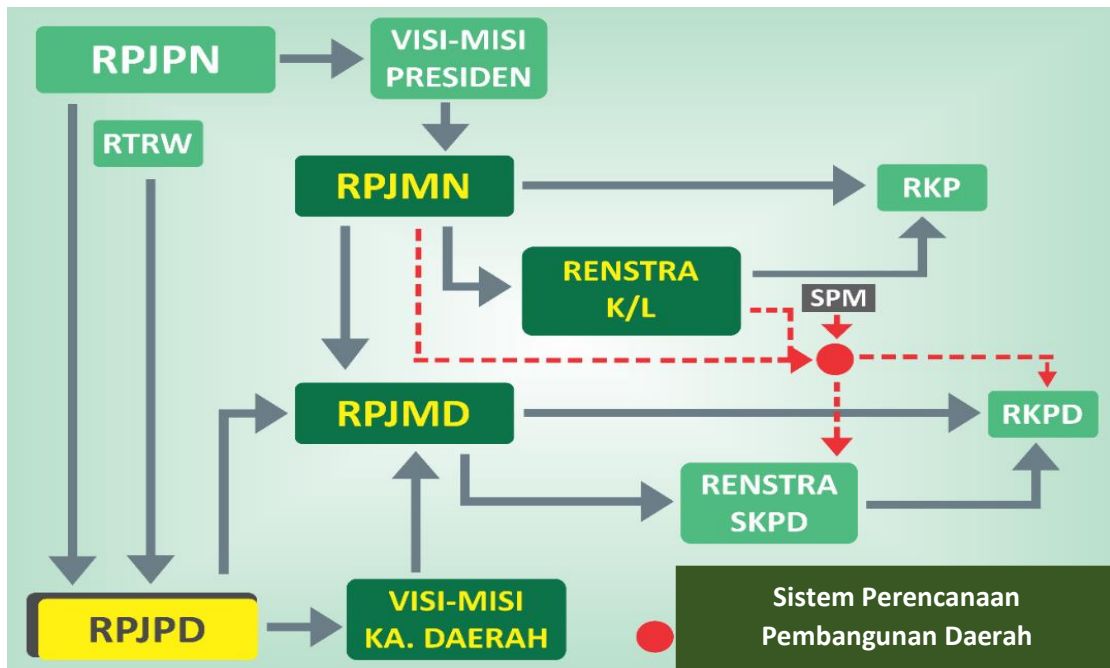
Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah sekitar. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Mengingat bahwa dokumen Perubahan RPJPD ini merupakan dokumen induk yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng ke depan, maka dokumen ini harus menjadi acuan dan pedoman dalam setiap periodenya dalam penyusunan dokumen RPJMD.

Oleh karena dokumen ini berdimensi 20 tahun, maka semua dokumen yang berdimensi lima tahun (RPJMD) dan berdimensi tahunan (RKPD dan APBD) harus mengacu pada dokumen Perubahan RPJPD ini. Seluruh dokumen ini selanjutnya dijabarkan oleh seluruh SKPD lingkup pemerintah Sulawesi Selatan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Berdasarkan RKPD dan RKA SKPD tersebut selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Soppeng. Terkait hubungan antara RTRW dan RPJPD, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, disebutkan bahwa RTRW dan RPJPD merupakan dokumen yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, hubungan antar dokumen RPJPD Kabupaten Soppeng dengan dokumen perencanaan lainnya baik tingkat nasional, tingkat provinsi, dan daerah sekitarnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. 1**  
Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen  
Perencana Pembangunan Lainnya



Oleh karena dokumen RPJPD Kab. Soppeng yang memiliki jangka waktu selama 20 tahun dari tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen rencana yang belum bersifat operasional, maka dokumen RPJPD Kabupaten Soppeng harus dijabarkan ke dalam dokumen yang lebih operasional yang disebut sebagai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng dengan jangka waktu lima tahun. Dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng merupakan pentahapan dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025.

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005 - 2025 ditetapkan dengan maksud agar memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen-komponen/ pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) atau para penentu dan penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.



Perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan Nasional sebagaimana tertuang di dalam RPJPN dan arah kebijakan Pembangunan provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJP Daerah Sulawesi Selatan guna mendorong perkembangan pembangunan daerah kabupaten Soppeng.
2. Merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng setiap 5 (lima) tahun untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kab. Soppeng setiap tahunnya, dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan daerahnya.
3. Merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pemerintahan daerah Kabupaten Soppeng.

#### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Merupakan gambaran umum kondisi daerah yang berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah di wilayah Kabupaten Soppeng.

BAB III Merupakan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang mengulas mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam perspektif jangka panjang.

BAB IV Merupakan visi dan misi daerah yang menguraikan mengenai Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Soppeng. Bab ini juga memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam perspektif jangka panjang.



BAB V Merupakan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang mendeskripsikan mengenai sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan pentahapan lima tahunan pembangunan daerah Sulawesi Selatan.

Dan BAB VI Merupakan Bab penutup dan penjelasan kaidah pelaksanaan yang menguraikan mengenai langkah - langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Soppeng tahun 2005-2025

# BAB II

## Gambaran Umum Kondisi Daerah

*“Bab ini berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah di wilayah Kabupaten Soppeng”*

SOPPENG

ᨆᨗᨗ ᨗᨗ ᨗᨗ ᨗᨗᨗ ᨗᨗ ᨗᨗᨗ ᨗᨗ ᨗᨗ ᨗᨗ ᨗᨗ



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

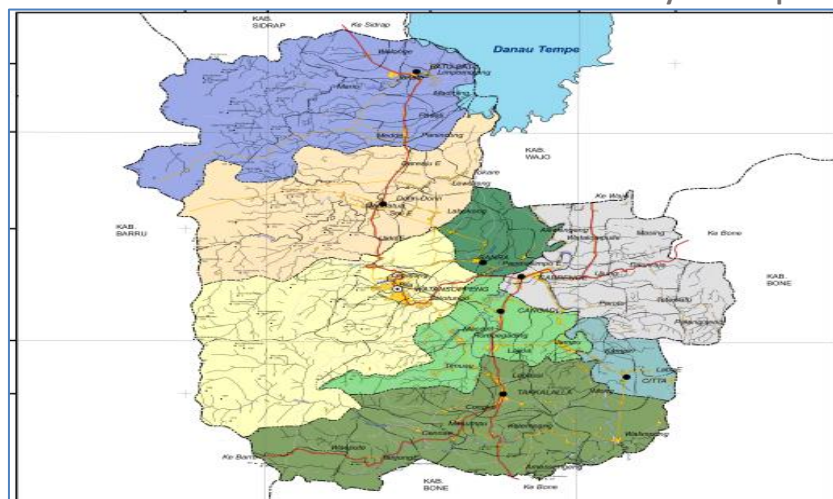
#### 2.1.1. Aspek Geografi

##### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 40 060 000 - 40 320 000 Lintang Selatan 1190 420 180 - 1200 060 130 Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km<sup>2</sup> berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut.

Gambar 2. 1

Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Soppeng



Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari:



- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone,
- Sebelah Selatan: Kabupaten Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

- Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl
- Gunung Sewo + 860 m dpl
- Gunung Lapancu + 850 m dpl
- Gunung Bulu Dua + 800 m dpl
- Gunung Paowengeng + 760 m dpl

Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :

- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan ; sebagai berikut :

- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;
- Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat



dan Regusol;

- Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan
- Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol
- Kecamatan Marioriawa dan Kec. Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol

Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran  $\pm 24^{\circ}$  sampai dengan  $\pm 30^{\circ}$  dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan.

#### **2.1.1.2. Potensi Pembangunan Wilayah**

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

##### **1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:**

- ✓ Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- ✓ Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;

Kawasan perkebunan terdiri atas:

- kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
- kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;



- kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;
  - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
  - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
  - kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
  - kawasan perkebunan Kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;
  - kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
  - kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan
  - tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri
2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:
- ✓ Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa;
  - ✓ Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar diseluruh wilayah kecamatan;
  - ✓ Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan;
  - ✓ Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.
3. Kawasan peruntukan industri sebagai berikut:
- ✓ Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;



- ✓ Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.
4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:
- ✓ Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :
    - Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, Di Kecamatan Lalabata;
    - Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Apejenge di Kecamatan Donri-Donri;
    - Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
    - Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
    - Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
    - Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liriaja;



- Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
  - Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo;
  - ✓ Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi : TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kalelawar di pusat kota watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesuteraan Alam (Kecamatan Donri-Donri);
  - ✓ Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;
  - ✓ Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.
5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
- ✓ Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
  - ✓ Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
  - ✓ Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;
6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas;
- ✓ Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa
  - ✓ Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriawa; dan
  - ✓ Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

Dari potensi pengembangan wilayah, maka pengembangan wilayah yang sesuai dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan konsisten dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada.



### **2.1.1.3. Rencana Rawan Bencana**

Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan puting beliung. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lirililau, Liriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra;
2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta;
3. Kawasan rawan puting beliung terdapat di Desa Pajalesang, Desa Tetewatu, Desa Palangiseng, Desa Paroto Kecamatan Lirililau;desa Donri-donri. Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata; Desa Pattojo Kecamatan Liriaja; Desa Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu Kecamatan Marioriawa.

Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa perencanaan lintas sektor dalam penanganannya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun.

### **2.1.2. Aspek Demografi**

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinue. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar,



berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan.

Berdasarkan data KTP-El Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng kurun waktu 2015-2016 mengalami peningkatan dari 251.102 di tahun 2015 menjadi 252.677 di tahun 2016, dan pada tahun 2017 turun menjadi 241,430. Penurunan jumlah penduduk tersebut disamping disebabkan adanya mutasi penduduk juga karena adanya pembersihan data sehingga data penduduk ganda ataupun data penduduk yang telah meninggal dikeluarkan dari database kependudukan. Perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 1**  
Perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun  
2015-2017

TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN	LAJU PERTUMBUHAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
2015	121.617	129.485	251.102	93.92	0.04
2016	122.360	130.317	252.677	93.89	0.35
2017	116.447	124.983	241.430	93.17	-4.66

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Soppeng

Komposisi Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 241.430 jiwa terdiri dari 116.441 jiwa penduduk laki-laki dan 124.983 jiwa penduduk perempuan atau 48,23% penduduk laki-laki dan 51,77% penduduk perempuan. Sedangkan penyebaran penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2017 di dominasi Kecamatan Marioriwawo sebanyak 20,96 % yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua sebesar 20,13 %



berada di Kecamatan Lalabata yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,45 %. Dengan luas wilayah sebesar 1.500 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 161 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kecamatan Liliraja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 297 jiwa/Km<sup>2</sup>, sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 92 jiwa/Km<sup>2</sup>. Rata-rata kepadatan Penduduk Kab. Soppeng Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 2**  
Perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Kecamatan	Luas	Penduduk		
	Area	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Marioriwawo	300	24.658	25.938	50.596
Liliraja	96	13.588	14.886	28.474
Lilirilau	187	18.738	20.674	39.412
Lalabata	278	23.804	24.785	48.589
Marioriawa	320	14.348	15.189	29.537
Donri-Donri	222	11.832	12.969	24.801
Ganra	57	5.519	6.182	11.701
Citta	40	3.960	4.360	8.320
<b>TOTAL</b>	<b>1.500</b>	<b>116.447</b>	<b>124.983</b>	<b>241.430</b>

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menentukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat mudah (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun keatas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka



sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 153.245 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 3**  
Jumlah penduduk menurut kelompok umur di  
Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Laki-Laki dan Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
0 – 4	6.755	6.209	12.964
5 – 9	8.912	8.414	17.326
10 – 14	9.964	9.284	19.248
15 – 19	11.056	10.550	21.606
20 – 24	9.812	9.331	19.143
25 – 29	7.820	7.867	15.687
30 – 34	7.641	7.712	15.353
35 – 39	8.190	8.640	16.830
40 – 44	8.190	8.964	17.154
45 – 49	9.022	9.829	18.851
50 – 54	6.861	8.084	14.945
55 – 59	5.932	7.744	13.676
60 – 64	4.760	6.111	10.871
65 – 69	4.075	5.300	9.375
70 – 74	3.064	4.328	7.392
75+	4.393	6.616	11.009
<b>Jumlah</b>	<b>116.447</b>	<b>124.983</b>	<b>241.430</b>

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab.Soppeng



## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s/d 2017 atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 4**  
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun  
2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kab.  
Soppeng

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1.329.292,90	29,1	1.427.348,20	29,3	1.450.643,7	28,3	1.617.206,50	29,12	1.761.123,29	29,29
2	Pertambangan & Penggalian	138.273,80	3	151.299,20	3,1	58.534,50	3,1	175.714,50	3,16	189.228,39	3,15
3	Industri Pengolahan	444.352,60	9,7	496.639,80	10,2	529.141,10	10,3	564.498,30	10,16	621.778,83	10,34
4	Pengadaan Listrik, & Gas	5.879,50	0,1	6.500,10	0,1	6.206,70	0,1	7.244,90	0,13	7.651,92	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3.031,10	0,1	3.063,50	0,1	3.079,40	0,1	3.155,10	0,06	3.391,54	0,06



No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
6	Konstruksi	597.977,90	13,1	610.299,80	12,5	644.797,60	12,6	670.755,90	12,08	726.283,66	12,08
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	627.616,20	13,7	670.911,20	13,8	718.737,90	14	788.531,90	14,2	863.541,26	14,36
8	Transportasi & Pergudangan	126.452,90	2,8	138.291,20	2,8	150.806,40	2,9	165.273,70	2,98	172.636,33	2,87
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	69.934,50	1,5	76.102,10	1,6	80.319,10	1,6	86.675,10	1,56	95.635,99	1,59
10	Informasi & Komunikasi	163.680,10	3,6	164.739,40	3,4	181.925,90	3,6	201.083,80	3,62	225.201,28	3,75
11	Jasa Keuangan & Asuransi	131.892,10	2,9	144.534,80	3	151.983,50	3	169.524,70	3,05	174.714,38	2,91
12	Real Estate	224.420,00	4,9	252.757,50	5,2	272.687,50	5,3	280.586,90	5,05	290.107,21	4,83
13	Jasa Perusahaan	10.194,80	0,2	10.692,10	0,2	11.316,40	0,2	12.291,80	0,22	13.248,44	0,22
14	Administasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	322.637,30	7,1	328.909,00	6,7	350.616,70	6,8	351.264,30	6,32	369.224,46	6,14
15	Jasa Pendidikan	260.258,10	5,7	274.026,40	5,6	289.837,30	5,7	317.755,90	5,72	342.203,37	5,69
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	80.318,90	1,8	87.095,20	1,8	95.081,70	1,9	103.499,80	1,86	113.580,04	1,89
17	Jasa Lainnya	31.774,40	0,7	33.543,30	0,7	36.103,40	0,7	38.990,60	0,7	42.575,34	0,71
	<b>PDRB</b>	<b>4.259.539,20</b>	<b>100</b>	<b>4.567.987,10</b>	<b>100</b>	<b>4.876.752,80</b>	<b>100</b>	<b>5.131.819,00</b>	<b>100</b>	<b>6.012.125,73</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2018



Sementara Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s/d  
2017 atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun  
2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kab.  
Soppeng

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.624.249,90	30,07	1.868.525,00	30,26	1.943.945,60	28,47	2.396.900,50	30,2	2.737.431,56	30,6
2	Pertambangan & Penggalian	186.531,20	3,45	241.563,20	3,91	286.945,40	4,2	362.460,50	4,57	384.274,79	4,29
3	Industri Pengolahan	509.342,80	9,43	639.306,10	10,35	728.525,00	10,67	822.548,30	10,37	936.725,33	10,47
4	Pengadaan Listrik, dan Gas	5.179,80	0,1	5.616,40	0,09	5.567,70	0,08	6.096,40	0,08	7.449,31	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.085,30	0,06	3.084,60	0,05	3.233,60	0,05	3.553,30	0,04	4.050,12	0,05
6	Konstruksi	721.771,60	13,36	797.349,60	12,91	883.337,50	12,94	961.744,90	12,12	1.126.405,11	12,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	702.571,10	13,01	756.925,10	12,26	862.811,30	12,64	995.641,10	12,55	1.130.293,69	12,63
8	Transportasi dan Pergudangan	148.888,60	2,76	186.941,40	3,03	220.087,50	3,22	266.121,40	3,35	273.810,84	3,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82.604,30	1,53	95.310,20	1,54	103.983,50	1,52	113.746,10	1,43	128.335,83	1,43



No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
10	Informasi dan Komunikasi	175.946,80	3,26	177.822,10	2,88	185.991,40	2,72	218.035,40	2,75	261.882,19	2,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	186.325,20	3,45	213.134,10	3,45	234.857,60	3,44	277.034,00	3,49	295.267,61	3,3
12	Real Estat	283.950,30	5,26	335.697,00	5,44	384.530,30	5,63	444.364,40	5,6	491.969,06	5,5
13	Jasa Perusahaan	11.012,60	0,2	12.046,50	0,2	13.540,70	0,2	15.896,00	0,2	17.835,64	0,2
14	Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	385.095,30	7,13	422.869,10	6,85	502.593,80	7,36	521.439,50	6,57	561.179,30	6,27
15	Jasa Pendidikan	251.835,50	4,66	278.642,90	4,51	308.564,40	4,52	344.565,70	4,34	379.408,45	4,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86.967,80	1,61	99.776,40	1,62	111.467,50	1,63	128.931,50	1,62	145.963,14	1,63
17	Jasa Lainnya	35.772,90	0,66	41.305,90	0,67	48.440,20	0,71	56.708,30	0,71	64.825,10	0,72
	<b>PDRB</b>	<b>5.401.131,00</b>	<b>100</b>	<b>6.175.915,60</b>	<b>100</b>	<b>6.828.423,00</b>	<b>100</b>	<b>7.935.787,20</b>	<b>100</b>	<b>8.947.107,05</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2018



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kab. Soppeng pada tahun 2013 sampai dengan 2017 masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana selama periode tersebut berdasarkan data PDRB harga berlaku tahun dasar 2010 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp.2.114.210.510.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. Selanjutnya yaitu sektor Konstruksi yang rata-rata berkontribusi sebesar Rp.898.121.790.000,-. Sementara itu yang paling sedikit berkontribusi selama periode tersebut adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dimana pada periode 2013-2017 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp.3.401.380.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng.

Selanjutnya perkembangan Kontribusi masing-masing Sektor dalam PDRB kurun-waktu 2013-2017 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 6**  
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB  
Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kab.  
Soppeng

Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
	Hb	HK	Hb	HK	Hb	HK	Hb	HK	Hb	HK
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	29,1	30,07	29,3	30,26	28,3	28,47	29,12	30,2	29,29	30,6
Pertambangan & Penggalian	3	3,45	3,1	3,91	3,1	4,2	3,16	4,57	3,15	4,29
Industri Pengolahan	9,7	9,43	10,2	10,35	10,3	10,67	10,16	10,37	10,34	10,47
Pengadaan Listrik, & Gas	0,1	0,1	0,1	0,09	0,1	0,08	0,13	0,08	0,13	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,1	0,06	0,1	0,05	0,1	0,05	0,06	0,04	0,06	0,05
Konstruksi	13,1	13,36	12,5	12,91	12,6	12,94	12,08	12,12	12,08	12,59
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	13,7	13,01	13,8	12,26	14	12,64	14,2	12,55	14,36	12,63
Transportasi & Pergudangan	2,8	2,76	2,8	3,03	2,9	3,22	2,98	3,35	2,87	3,06
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,5	1,53	1,6	1,54	1,6	1,52	1,56	1,43	1,59	1,43



Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
	Hb	HK	Hb	HK	Hb	HK	Hb	HK	Hb	HK
Informasi & Komunikasi	3,6	3,26	3,4	2,88	3,6	2,72	3,62	2,75	3,75	2,93
Jasa Keuangan & Asuransi	2,9	3,45	3	3,45	3	3,44	3,05	3,49	2,91	3,3
Real Estate	4,9	5,26	5,2	5,44	5,3	5,63	5,05	5,6	4,83	5,5
Jasa Perusahaan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,22	0,2	0,22	0,2
Administasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	7,1	7,13	6,7	6,85	6,8	7,36	6,32	6,57	6,14	6,27
Jasa Pendidikan	5,7	4,66	5,6	4,51	5,7	4,52	5,72	4,34	5,69	4,24
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,8	1,61	1,8	1,62	1,9	1,63	1,86	1,62	1,89	1,63
Jasa Lainnya	0,7	0,66	0,7	0,67	0,7	0,71	0,7	0,71	0,71	0,72
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2018

Dilihat dari kontribusi sektoral yang menggunakan tahun dasar 2010 menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar dibanding sektor yang lain. Pada periode 2013-2017 berdasarkan distribusi PDRB Tahun Dasar 2010 nilai rata-rata sektor ini sebesar 42,82%. Walaupun rata-rata pada periode tersebut sektor ini berkontribusi paling besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng, tetapi pada tahun 2017 kontribusi sektor ini menurun dibanding tahun 2016 yaitu 42,61% menjadi sebesar 41,91% pada tahun 2017. Selanjutnya sektor yang paling berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor primer dengan nilai rata-rata 29,92% selama periode 2013-2017. Dan sektor terakhir yang berkontribusi pada struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 27,26%, meskipun berkontribusi paling sedikit dibanding sektor lain tetapi pada tahun 2017 kontribusi sector ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 dimana pada tahun 2016 sebesar 27,18% meningkat menjadi 27,48% pada tahun 2017. Penurunan kontribusi sektor



tersier pada tahun 2017 diakibatkan oleh bergesernya struktur perekonomian ke sektor sekunder dan primer yang mengalami peningkatan, seperti tergambar pada tabel rata-rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013 s/d Tahun 2017 :

**Tabel 2. 7**  
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB  
Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kab.  
Soppeng

No	Sektor	Pertumbuhan	
		H <sub>B</sub> %	H <sub>K</sub> %
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	29,02	29,92
2	Pertambangan & Penggalian	3,10	4,08
3	Industri Pengolahan	10,14	10,26
4	Pengadaan Listrik, & Gas	0,11	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,08	0,05
6	Konstruksi	12,47	12,78
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2,87	12,62
8	Transportasi & Pergudangan	2,87	3,08
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,57	1,49
10	Informasi & Komunikasi	3,59	2,91
11	Jasa Keuangan & Asuransi	2,97	3,43
12	Real Estate	5,06	5,49
13	Jasa Perusahaan	0,21	0,20
14	Administasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	6,61	6,84
15	Jasa Pendidikan	5,68	4,45
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,85	1,62
17	Jasa Lainnya	0,70	0,69

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor PDRB Kab.Soppeng kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 atas dasar harga berlaku terlihat bahwa sektor yang pertumbuhannya cukup tinggi adalah Pertanian, Kehutanan, & Perikanan sebesar 29,02 persen dan yang terendah adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang sebesar 0.08 persen. Demikian pula rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor PDRB atas dasar harga konstan sektor



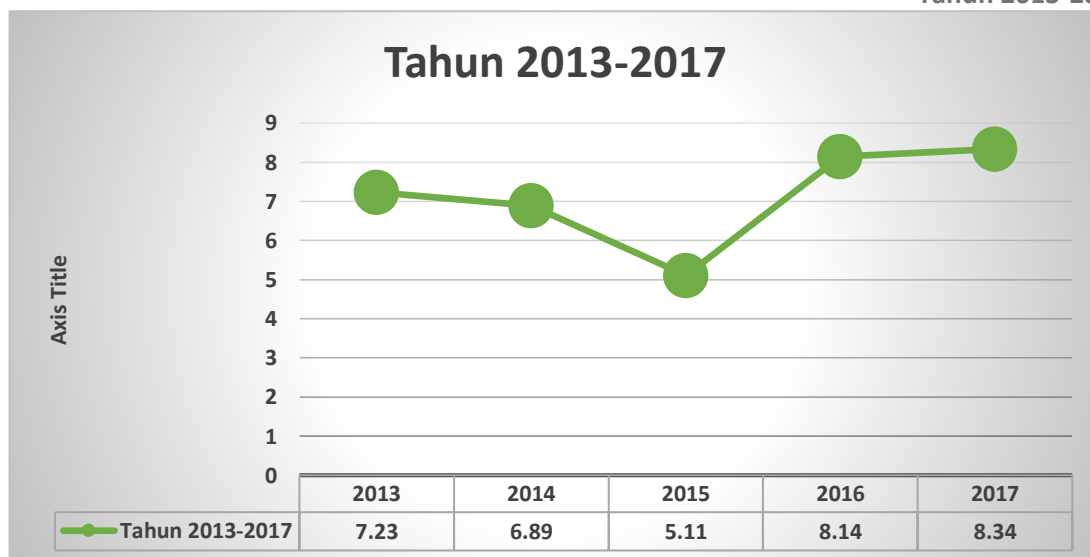
yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Pertanian, Kehutanan, & Perikanan sebesar 29,92 persen dan yang terendah adalah juga sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang sebesar 0.05 persen.

### 2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan tahun dasar 2010 tercatat sebesar 7,23%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 8,34% meningkat dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 8,14%. Dan jauh meningkat dibanding tahun 2015 yang melambat yaitu 5,11%.

**Bagan 2. 1**  
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng (%)  
Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kab. Soppeng

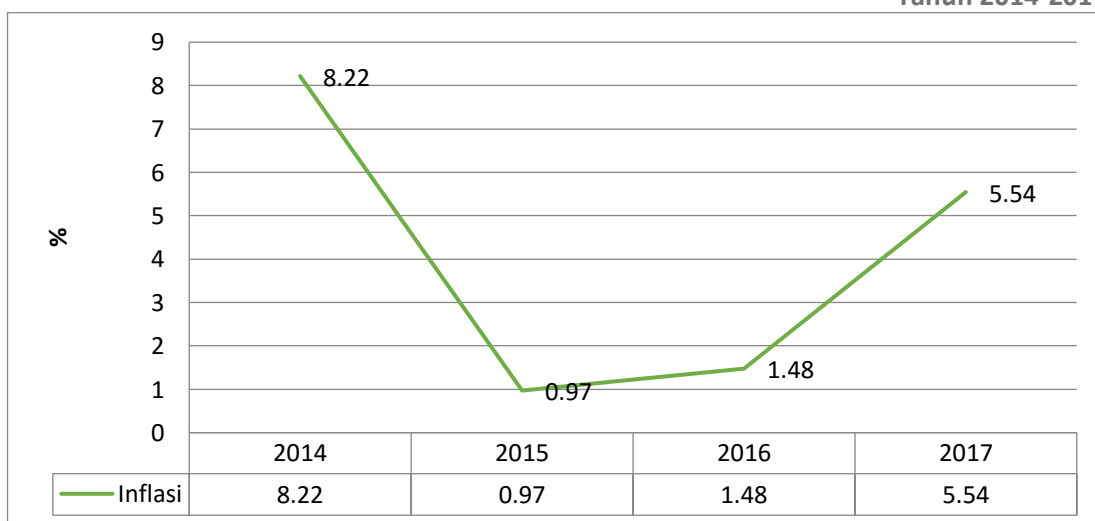


### 2.2.1.3. Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/ masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

**Bagan 2. 2**  
Preview Perkembangan Inflasi Kab. Soppeng  
Tahun 2014-2017



Sumber : BPS Kab. Soppeng



Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi Kabupaten Soppeng selama tahun 2015 adalah sebesar 0,97 persen, lebih rendah dibanding inflasi pada tahun 2014 yang sebesar 8,22 persen. Sedangkan pada tahun 2016 inflasi Kabupaten Soppeng sebesar 1,48 persen. Kestabilan harga yang tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga di Kabupaten Soppeng dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang berupaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Kabupaten Soppeng. Secara periodik TPID telah melakukan pemantauan inflasi, mengeluarkan rekomendasi kebijakan, dan melakukan langkah-langkah antisipatif-preventif dalam rangka mengendalikan kenaikan harga dan inflasi.

Data-data PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Soppeng sampai pada tahun 2017 dalam kondisi yang cukup kondusif yang ditandai dengan karakter pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Soppeng adalah wilayah yang berpotensi sebagai aktivitas investasi para investor baik dari dalam maupun luar wilayah untuk menanamkan modalnya dalam berbagai sektor ekonomi. Melihat perkembangan ekonomi makro tahun-tahun sebelumnya, dapat diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara keseluruhan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 menunjukkan kondisi yang kondusif, dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terkendali.



#### 2.2.1.4. PDRB PerKapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Selama periode 2013-2017 PDRB perkapita Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 ADHB telah mencapai Rp.39.508.000,- atau meningkat sebesar 39,38% dibanding pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp.23.950.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 tiap penduduk di wilayah Kabupaten Soppeng mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 39,60 juta rupiah.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Soppeng secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita ADHK yang pada tahun 2017 mencatatkan kenaikan sebesar 23,72% dibanding tahun 2013 atau dari nilai PDRB Perkapita sebesar 20,25 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 26,54 juta rupiah pada tahun 2017. Meskipun demikian pada kenyataannya kenaikan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan harga-harga tersebut pasti dirasakan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.



#### 2.2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel Angka Kemiskinan Kab. Soppeng Tahun 2013-2017 :

**Tabel 2. 8**  
Angka Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun  
2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	21,300	19,800	18,880	19,100	18,706
Persentase Penduduk Miskin	9.43	8.76	8.36	8.45	8.27
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	202,666	207,084	213,164	220,192	225,936

Sumber : BPS Kab. Soppeng

Pada kurun 2013-2017, angka kemiskinan Kabupaten Soppeng relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 21.300 jiwa (9.43%), pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 19.800 jiwa (8.76%). sedangkan pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng terus mengalami penurunan sebesar 18.706 jiwa (8,27%) dari tahun

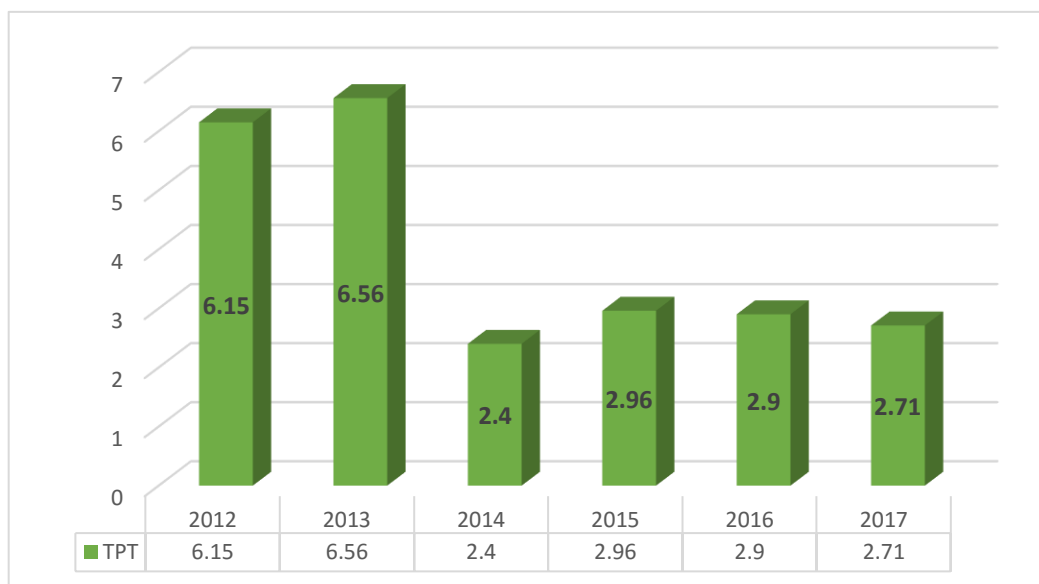


2016 sebesar 19.100 (8,45%) Penurunan merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan yang pro poor dan pro seperti program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin, Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin, dan beberapa program lainnya.

Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2017 garis kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar Rp.225,936,- meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp.202.666,-.

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) dan penciptaan lapangan kerja (Pro Job).

Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan menggerus tingkat pengangguran di Kabupaten Soppeng. Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Untuk melihat indikator TPT dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Bagan 2.3****Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng  
Tahun 2012-2017**

Sumber : BPS Kab. Soppeng

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, TPT di Kabupaten Soppeng sebesar 2,71% yang mana mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 6,15%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan cukup signifikan.

**2.2.1.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja yaitu: 1). *General Economic Activity Ratio* (Rasio Aktifitas Ekonomi Umum), rasio ini khusus untuk penduduk usia kerja, atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kab. Soppeng Tahun 2016-2017 pada tabel berikut :



**Tabel 2. 9**

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2021**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	171.434	164.116
2	Jumlah penduduk usia kerja (15 -64 Thn)	199.796	191.892
	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial dilakukan antara lain terhadap terhadap angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli. Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng periode 2012-2016 sebesar 0,31 poin per tahun. Rata-rata angka pengeluaran perkapita selama periode 2010-2014 sebesar 644.402 rupiah, rata-rata lama sekolah 6,88 tahun, rata-rata harapan lama sekolah 11,39 tahun, dan rata-rata angka harapan hidup selama 68,25 tahun.

**Tabel 2. 10**

**Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017**

Komponen	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	68.37	68.42	68,52	68,62	68,72
Harapan Lama Sekolah	11,42	11,45	11.81	12.20	12,33
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6.93	7.04	7,05	7,06	7,42
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	646.38	654.81	608.03	896.50	903.50
<b>IPM</b>	<b>64.43</b>	<b>64.74</b>	<b>65.33</b>	<b>65.95</b>	<b>66.67</b>

Sumber : BPS Kab. Soppeng



Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli. Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng periode 2013-2017 sebesar 0,72 poin per tahun. Jika dibandingkan capaian IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan maka pada tahun 2017 posisi IPM Kabupaten Soppeng berada pada peringkat 19 dari 24 Kabupaten/Kota. Peringkat tersebut diharapkan pada tahun yang akan mengalami perubahan sehingga Kabupaten Soppeng dapat masuk 10 besar peraih IPM terbaik, mengingat poin IPM Kab/Kota relatif perbedaannya kecil. Melihat kinerja pembangunan yang telah dilakukan pada tahun 2017 yang diestimasi akan tumbuh 66.67 Poin, IPM Kab. Soppeng akan turut mengalami peningkatan secara signifikan.

Capaian komponen pembentukan IPM dijelaskan sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup yaitu rata-rata lama hidup (dalam tahun) penduduk, yang menurut BPS dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Asumsinya, semakin panjang angka harapan hidup maka kesejahteraan penduduk semakin tinggi, khususnya berdasarkan aspek kesehatan. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2017 :

**Tabel 2. 11**  
**Usia Harapan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun**  
**2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Usia Harapan Hidup	68,62	68,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng



Penduduk Kabupaten Soppeng secara umum memiliki angka usia harapan hidup 68 tahun atau lebih. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.

- Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 mencapai 12,20 dan di tahun 2017 menjadi 12,33 tahun, angka harapan lama sekolah tersebut masih dibawah angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 13,28 tahun.
- Rata-rata lama Sekolah, Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah 7,42 meningkat 0,36 point dibanding tahun 2016 yaitu 7,06. Angka rata-rata lama sekolah tersebut masih dibawah angka rata-rata lama sekolah provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,95
- pengeluaran perkapita, di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar Rp.8.965.000,- mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi Rp.9.035.000,- namun masih dibawah pengeluaran perkapita penduduk di Sulawesi-Selatan sebesar Rp 10.489.000,- .

## **2. Persentase Balita Gizi Buruk**

Berdasarkan data Dinas Kesehatan jumlah balita penderita gizi buruk pada tahun 2016 adalah 3 atau, 0,022 persen dari total jumlah balita dan pada tahun 2017 jumlah balita gizi buruk adalah 2 balita atau 0,015 persen dari jumlah total balita sebanyak 13.132 balita.



**Tabel 2. 12**

Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2016 s/d 2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah balita gizi buruk	3	2
2	Jumlah balita	13.465	13.132
	<b>% Balita Gizi Buruk</b>	<b>0,022</b>	<b>0,015</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

### 3. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan yang diakibatkan kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan gizi kurang, terjadi pada anak usia kurang dari lima tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan jumlah balita penderita gizi kurang pada tahun 2016 adalah 142 atau, 1,05 persen dari total jumlah balita sebanyak 13.465 dan pada tahun 2017 jumlah balita gizi kurang turun menjadi 14 balita atau hanya 0,011 persen dari jumlah total balita sebanyak 13.132 balita.

**Tabel 2. 13**

Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2016 s/d 2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya balita gizi kurang	142	14
2	Jumlah balita	13.465	13.132
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	1,05	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

### 4. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdarutan, surveylance berbasis masyarakat, yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan



perilaku sehingga masyarakatnya PHBS dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk, tabel berikut menunjukkan Cakupan Desa Siaga Aktif:

**Tabel 2. 14**  
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Soppeng Tahun  
2016 s/d 2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah desa siaga aktif	69	70
2	Jumlah desa siaga yang dibentuk	70	70
	<b>Cakupan Desa Siaga</b>	<b>98,57</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Dari tabel diatas, terlihat bahwa cakupan desa siaga di Kab. Soppeng telah mencapai 100 persen meningkat dibanding tahun 2016 yang baru mencapai 98,35 persen

#### 5. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja yaitu: 1). General Economic Activity Ratio (Rasio Aktifitas Ekonomi Umum), rasio ini khusus untuk penduduk usia kerja, atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kab. Soppeng Tahun 2016-2017 pada tabel berikut :

#### 6. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal seperti kebutuhan akan spiritual pangan, sandang, papan kesehatan dan KB sementara yang dimaksud dengan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara



minimal tetapi belum dapat kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, Interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 di Kab. Soppeng pada tahun 2017 adalah 9.019 atau 12,85% dari jumlah keluarga yang ada yaitu 70.205 keluarga.

**Tabel 2. 15**  
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2016  
s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	NA	9.019
2	jumlah keluarga	NA	70.205
	% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	NA	12,85

Sumber ; Dinas PP&KB

## 7. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah, semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah secara tidak langsung menunjukkan kemampuan daerah dalam memaksimal penerimaan dengan memanfaatkan potensi-potensi pendapatan yang dimiliki, tabel berikut menunjukkan persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah :

**Tabel 2. 16**  
Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2016  
s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	PAD	83.286.049.912,00	115.309.170.743,00
2	Jumlah pendapatan daerah	1.236.893.800.959,00	1.131.991.996.848,00
	% PAD Terhadap Pendapatan	7%	10%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



## 8. Opini BPK

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kab. Soppeng telah mendapat perbaikan sejak tahun 2012 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 telah mendapat predikat opini WTP

## 9. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan yang telah berhasil dicapai pada Tahun 2017 sebesar 96.47 di bawah target skor PPH yang ditetapkan sebesar 88 dengan capaian tingkat realisasi sebesar 84.9%. Meskipun masih di bawah target yang ditetapkan namun terjadi kenaikan konsumsi energi masyarakat di Kab.Soppeng dikarenakan terjadinya kenaikan konsumsi semua kelompok pangan terutama kelompok sayur,buah, pangan hewani, umbi-umbian dan gula.Tingkat pencapaian Skor Pola Pangan Harapan selama Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 2. 17**  
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016  
s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	% Angka Kecukupan Gizi (AKG)	89,90	84,90
2	bobot masing-masing kelompok pangan	11,5	11,5
3	Pencapaian Skor PPH	1033,85	976,35

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

## 10. Penguatan Cadangan Pangan

Pada Tahun 2017 tingkat pencapaiannya belum terealisasi dimana belum adanya cadangan pangan pemerintah sebesar 100 ton untuk kabupaten/kota sehingga belum terealisasi. Untuk menyikapi hal tersebut maka pada Tahun 2017 telah ditargetkan pengisian cadangan pemerintah sebesar 24 ton dengan memperhatikan kemampuan anggaran kabupaten/kota.



**Tabel 2. 18**

Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2016 s/d 2017  
Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota	10 ton	10 ton
2	Penguatan Cadangan Pangan	10 ton	10 ton

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

### 11. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan Sampai Tahun 2017 tingkat pencapaiannya masih nihil. Hal ini disebabkan akibat kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Soppeng cukup tahan pangan dimana belum ditemukan adanya indikasi gejala-gejala kerawanan pangan di 8 kecamatan baik yang sifatnya kronis maupun temporer sehingga belum ada penanganan secara dini daerah rawan pangan.

### 12. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap Total PDRB

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam struktur PDRB Kab. Soppeng. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kab. Soppeng mencapai 27,53%, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 27,74%. Kontribusi tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Tingginya kontribusi tersebut terutama didukung oleh Sub Sektor Tanaman Pangan dan Sub Sektor Perkebunan, sebagai sub sektor terbesar dalam sektor pertanian yang ada di Kab. Soppeng. Berikut gambaran kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kab. Soppeng tahun 2016-2017 (PDRB atas dasar harga berlaku).



**Tabel 2. 19**  
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan  
terhadap Total PDRB Tahun 2016 s/d 2017  
Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
2	Jumlah PDRB (Juta Rupiah)	7.935.787,23	8.947.107,05
	<b>Kontribusi PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap Total PDRB (%)</b>	<b>27,53%</b>	<b>27,74%</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Soppeng

### 13. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 20**  
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap  
PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016 s/d 2017  
Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija) (Juta Rupiah)	359.149,60	277.531,85
2	Jumlah PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap Total PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	16,44%	11,18%

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng



#### 14. Produksi sektor pertanian

Produksi sektor pertanian/perkebunan adalah Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar, produksi masing-masing komoditi pada tabel berikut :

**Tabel 2. 21**  
Produksi sektor pertanian pertanian/perkebunan  
Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	<b>Produksi Sektor Pertanian (Ton)</b>		
	a. Padi (Ton)	280.905,00	309.816,00
	b. Jagung (Ton)	93.131,10	84.759,00
	c. Kedelai (Ton)	2.497,20	1.319,00
	d. Kacang Tanah (Ton)	900,30	145,00
	e. Kacang Hijau (Ton)	100,90	54,00
	f. Ubi Kayu (Ton)	287,50	465,00
	g. Ubi Jalar (Ton)	73,30	123,00
	<b>JUMLAH (Ton)</b>	<b>377.895,30</b>	<b>396.681,00</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

#### 15. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kab. Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2017 :



**Tabel 2. 22**  
sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB  
pertanian/perkebunan Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (Tanaman Keras) (Juta Rupiah)	611.046,10	700.881,50
2	Jumlah PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	<b>27,97%</b>	<b>28,24%</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

Dari tabel tersebut diatas, tergambar bahwa tahun 2016 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian sebesar 27,97% dan mengalami peningkatan menjadi 28,24% pada tahun 2017. Adanya peningkatan lebih pada faktor harga jual produk hasil perkebunan (tanaman keras) yang cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya, karena dari sisi produksi, sebagian besar tanaman keras mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi ekspor yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

#### 16. Produksi sektor perkebunan

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2016-2017.



**Tabel 2. 23**  
Produksi Sektor Perkebunan Tahun 2016 s/d 2017  
Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
<b>1</b>	Produksi Sektor Perkebunan		
	a. Kelapa Dalam (Ton)	2.933,22	2.386,59
	b. Kelapa Hibrida (Ton)	73,90	64,31
	c. Kopi Robusta (Ton)	65,88	64,74
	d. Cengkeh (Ton)	-	56,75
	e. Kakao (Ton)	12.361,31	10.015,79
	f. Jambu Mete (Ton)	221,10	568,95
	g. Lada (Ton)	3,92	3,92
	h. Kemiri (Ton)	593,15	678,79
	i. Aren (Ton)	153,96	153,96
	j. Tembakau (Ton)	126,50	99,50
	<b>JUMLAH (TON)</b>	<b>16.532,94</b>	<b>14.093,30</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

#### 17. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2016-2017.

**Tabel 2. 24**  
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB  
Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
<b>1</b>	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton)	280.905,00	309.816,0
<b>2</b>	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)	280.905,00	309.816,0
	<b>Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap Total Produksi di Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng



### 18. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan adalah salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kab. Soppeng, pada tahun 2016 Sektor Kehutanan berkontribusi 5,70 persen dan pada tahun 2017 menjadi 5,42 persen. Kontribusi sektor kehutanan pada tabel berikut :

**Tabel 2. 25**  
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun  
2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (ton)	4.523,6	4.853,7
2	Jumlah PDRB (Juta Rupiah)	7.935.787,23	8.947.107,05
	<b>Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB</b>	<b>5,70%</b>	<b>5,42%</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

### 19. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kab. Soppeng, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Pariwisata dalam struktur PDRB Kab. Soppeng, walaupun nilainya tidak signifikan. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kab. Soppeng hanya mencapai 1,01%, dan pada tahun 2017 menjadi 1,90%.

**Tabel 2. 26**  
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun  
2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata (Juta)	80.319,14	80.319,14
2	Total PDRB (Juta)	7.935.787,23	8.947.107,05
	<b>Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)</b>	<b>1,01</b>	<b>1,90</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng



## 20. Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kab. Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Kelautan dan Perikanan dalam struktur PDRB Kab. Soppeng,. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB Kab. Soppeng adalah 2,61%, dan pada tahun 2017 menjadi 3,80%.

**Tabel 2. 27**  
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap  
PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Kelautan dan Perikanan (juta rupiah)	207.499,50	250.844,70
2	Jumlah PDRB (Kab. Soppeng) (juta rupiah)	7.935.787,23	8.947.107,05
	<b>Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)</b>	<b>2,61</b>	<b>3,80</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

## 21. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Capaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selama kurun waktu 2 tahun (2016-2017) menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016 capaian 9,54% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 11,13%. Perdagangan sangat besar kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi, utamanya Perdagangan besar dan eceran.

**Tabel 2. 28**  
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri (Juta)	756.952,10	995.641,14
2	total PDRB (Juta)	7.935.787,23	8.947.107,05
	<b>Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)</b>	<b>9,54</b>	<b>11,13</b>

Sumber Dinas PPK & UKM



## 22. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi jumlah total PDRB x 100 %, Kontribusi sektor industri untuk tahun 2016 menunjukkan persentase 9,36% dan tahun 2017 meningkat menjadi 10,37%. Capaian realisasi merupakan dukungan dari beberapa sektor industri olahan pangan yang semakin berkembang. Industri olahan pangan sangat besar kontribusinya bagi PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng.

**Tabel 2. 29**  
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun  
2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri (Juta)	639.306,10	822.548,35
2	Total PDRB (Juta)	7.935.787,23	8.947.107,05
	<b>Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)</b>	<b>8,06</b>	<b>9,19</b>

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kab. Soppeng

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya

Kinerja Pembangunan daerah dibidang Seni dan Budaya diukur dari Indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. capaian perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2. 30**  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d 2017  
Kabupaten Soppeng

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017
1	Jumlah group Kesenian per 10.000 penduduk	0	0
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0	0
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	3,80	3,98
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,04	0,04

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng

Di Kabupaten Soppeng terdapat 96 club olahraga yang tersebar di 8 Kecamatan, atau dengan perbandingan 3,80 per 10.000 penduduk. Sementara untuk gedung Olahraga terdapat 1 gedung olahraga yang



merupakan milik pemerintah daerah yaitu Gedung Koni dengan perbandingan 0,04 per 10.000 penduduk. Angka ini belum termasuk gedung olahraga yang dikelola pihak swasta yang tersebar di berbagai tempat disetiap kecamatan.

## 2.3. ASPEK LAYANAN UMUM

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

#### 2.3.1.1. Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Kinerja layanan urusan wajib, diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

#### 1. Pendidikan

**Tabel 2. 31**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan  
Wajib Dasar Pendidikan Tahun 2016 s.d 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2016	2017
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50,28	51,99
1.2	Angka partisipasi kasar			
	SD/MI/Paket A	%	86,28	85,07
	SMP/MTs/Paket B	%	72,12	70,12
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan			
1.4	Angka Partisipasi Murni			
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	84,86	86,97
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	69,01	74,18
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C		Kewenangan Provinsi	
1.5	Angka partisipasi sekolah			
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	84,5	86,97
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B			
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C		Kewenangan Provinsi	
1.6	Angka Putus Sekolah:			
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0,09	0,03
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0,34	0,12



NO	INDIKATOR	Satuan	2016	2017
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA		Kewenangan Provinsi	
1.7	Angka Kelulusan:			
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		99,34	99,95
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100	99,98
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA		Kewenangan Provinsi	
1.8	Angka Melanjutkan (AM):			
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		73,67	87,6
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		81,83	-
1.9	Fasilitas Pendidikan:			
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	-	89,54
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik			
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar			
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah			
1.12	Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar		-	11,73
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		-	-
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		-	-
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata			
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		-	-
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki		1	
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		99,70	99,64
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		88,31	91,31



### <>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” Pada tahun 2017 jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak adalah 5.378 atau 51,99 persen dari jumlah anak yang berusia 4-6 tahun sebanyak 10.345

### <> Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Soppeng adalah 86,28 dan pada tahun 2017 turun menjadi menjadi 85,07, Sementara untuk APK pada jenjang pendidikan SMP/Mts/Paket B pada tahun 2016 adalah 72,12 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,12. Tabel menunjukkan APK di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2017.

**Tabel 2. 32**  
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan  
di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2017

No.	Jenjang	2016	2017
1.	SD/MI	86,28	85,07
2.	SMP/MTs	72,12	70,12

Sumber : data kemendikbud



### <>Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Murni pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A adalah 84,86 persen, meningkat menjadi 86,97 persen pada tahun 2017, angka ini menunjukkan bahwa siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 tahun mencapai 86,97 persen dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sementara APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B tahun 2016 adalah 69,01 persen dan meningkat menjadi 74,18 persen. Berikut Tabel yang menunjukkan angka partisipasi murni di Kabupaten Soppeng tahun 2016 – 2017

**Tabel 2. 33**  
Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan  
di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2017

No.	Jenjang	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A	84,86	86,97
2.	SMP/MTs/Paket B	69,01	74,18

Sumber : data kemendikbud

### <> Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka putus sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya



siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Pada tahun 2016 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Soppeng pada jenjang Pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) adalah 0,09 persen, turun menjadi 0,03 persen pada tahun 2017. Sementara APS pada jenjang usia 13-15 pada tahun 2106 adalah 0,34 persen, dan pada tahun 2017 turun menjadi 0,12 persen.

#### **<> Angka Kelulusan**

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berdasarkan data, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kab.Soppeng dalam kurun waktu 2016 – 2017 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 angka kelulusan pada jenjang Pendidikan SD/MI 99,34 dan meningkat menjadi 99,95 persen pada tahun 2017. Sementara untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 adalah 100 persen dan menjadi 99,98 persen ditahun 2017.

Kecenderungan yang meningkat untuk kelulusan pada tingkatan sekolah dasar mengindikasikan kualitas pendidikan di Kab.Soppeng yang semakin baik. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam meningkatkan angka kelulusan. Sementara untuk jenjang SMP/MTs tingkat kelulusannya harus diusahakan agar dipertahankan pada 100 persen.

#### **<> Angka Melanjutkan (AM)**

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2016 Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs adalah 73,67 persen dan meningkat menjadi 87,6 persen pada tahun 2017.



### <> Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah angka menunjukkan jumlah penduduk usia penduduk di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dari total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, AMH di Kab. Soppeng pada tabel berikut:

**Tabel 2. 34**  
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 s/d  
2017 Kabupaten Soppeng

No.	Uraian	2016	2017
1.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	199.098	197.290
2.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun	199.693	197.997
3.	Angka Melek Huruf	99,70	99,64

Sumber : data kemendikbud

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka melek huruf di Kabupaten Soppeng tahun 2017 mencapai 99,64 persen yang juga berarti dari 197.997 orang jumlah penduduk usia di atas 15 tahun hanya 0,36 persen diantaranya yang belum mampu membaca dan menulis

### <> Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Pada tahun 2016 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah 88,79 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 91,31 persen atau dari 3.151 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dari jumlah guru secara keseluruhan sebanyak 3.551 orang.



## 2. Kesehatan

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar

Kesehatan digambarkan seperti tabel berikut:

**Tabel 2. 35**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan  
Wajib Dasar Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		3,51	3,50
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi		99,65	99,65
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		3,16	1,40
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		10,18	9,79
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		1,05	1,05
2.6	Rasio posyandu per satuan balita		24,29	24,90
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,24	0,25
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,004	0,004
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk		0,218	0,298
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,898	0,990
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	64,55	71,93
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	88,48	95,82
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	91,43	92,86
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/ kapita/ hari)	%	2,43	2,49
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	96,16	90,77
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		-	-
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		36,84	22,67



NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	39,95	62,55
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		87	126
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		2,37	3,31
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	39,95	62,55
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	18,56	43,3
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	%	100	100
2.26	Angka kejadian Malaria	%	5,3	4,42
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,0032	0,0033
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		-	-
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		0	0
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	18,38	26,27
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	93,5
2.35	Cakupan puskesmas	%	212,5	212,5
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	62,86	62,86
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	82,62	87,97
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	89,1	90,9
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	43,17	45,43
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	52,85	62,27



NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	100	100
2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	89,58	113,61
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100
2.45	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100

<> **Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berdasarkan tabel terlihat bahwa AKB per 1000 kelahiran di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 adalah 3,51 sementara di tahun 2017 adalah 3,50.

**Tabel 2. 36**  
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran  
Hidup Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	10	10
2	Jumlah Kelahiran Hidup	2.849	2.860
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,51	3,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng



#### <> Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2017, pada tabel berikut :

**Tabel 2. 37**  
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016-2017  
Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	10	10
2	Jumlah Kelahiran Hidup	2.849	2.860
	<b>Angka Kelangsungan Hidup Bayi</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Dari tabel di atas tergambar, bahwa Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng sangat tinggi, pada tahun 2017 mencapai angka 99,65 persen atau dari 2.860 bayi yang lahir hidup hanya 10 bayi diantaranya yang meninggal berumur kurang dari 1 tahun. Kondisi yang sama juga terjadi di tahun 2016

#### <> Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita merupakan upaya penekanan jumlah kematian terhadap anak dibawah lima tahun, Realisasi diperoleh dari data kasus kematian kematian Balita yang berumur dibawah lima tahun pada tahun 2017 berjumlah 1.4 jiwa dalam 1.000 Balita lebih baik dari tahun 2016 dengan kematian 3.6 jiwa dalam 1.000 balita.



**Tabel 2. 38**

**Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup  
Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun)	9	4
2	Jumlah Kelahiran Hidup	2.849	2.860
	<b>Angka Kematian Balita</b>	<b>3,16</b>	<b>1,40</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup**

Angka Kematian Neonatus merupakan upaya penekanan jumlah kematian terhadap neonatal yang terjadi pada bayi baru lahir yang berumur 0 sampai 28 hari, Angka Kematian Neonatus mempunyai target 27 kasus, dan realisasi mencapai 27 kasus, dengan demikian capaian adalah 100%. Realisasi diperoleh dari data kasus kematian kematian bayi yang berumur 0 sampai 28 hari tahun 2017. Dan angka Kematian Bayi mempunyai target 12 kasus, sedangkan realisasi mencapai 10 kasus, dengan demikian capaian adalah 120%. Realisasi diperoleh dari data kasus kematian kematian bayi 0-59 Bulan. Pencapaian melebihi target yang diharapkan (target 13 kasus) .

**Tabel 2. 39**

**Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup  
Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	29	28
2	Jumlah Kelahiran Hidup	2.849	2.860
	<b>Angka Kematian Neonatal</b>	<b>10,18</b>	<b>9,79</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup**

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator kesehatan ibu yang dapat teratasi, angka kematian ibu pada tahun 2017



telah mengalami penurunan rangka kematian Ibu dari tahun 2016, namun telah sesuai dengan target pada tahun 2017 yaitu 2 kasus, sehingga perlu berbagai upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankan capaian tersebut hingga tahun 2021.

**Tabel 2. 40**  
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	3	3
2	Jumlah kelahiran hidup	2.849	2.860
	<b>Angka Kematian Ibu</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Rasio posyandu per satuan balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Berdasarkan data pada tahun 2017 rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng 24,90 yang artinya setiap 1000 balita dilayani 24 posyandu, ratio tersebut sama di tahun 2016 .

**Tabel 2. 41**  
Rasio posyandu per satuan balita Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah posyandu	327	327
2	Jumlah balita	13.465	13.132
	<b>Rasio Posyandu</b>	<b>24,29</b>	<b>24,90</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng



#### <> Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah 0,25 hal ini berarti dari 61 puskesmas jangkauan layanannya adalah 1 puskesmas dapat menjangkau 3.958 penduduk.

**Tabel 2. 42**  
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	61	61
2	Jumlah penduduk	252.677	241.430
	<b>Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>
		<b>1 : 4,142</b>	<b>1 : 3,958</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk



menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 yaitu 0,004 sama dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya, karena sampai saat ini Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Soppeng hanya 1 yaitu RSUD La Temmamala.

**Tabel 2. 43**  
Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Tahun  
2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rumah sakit	1	1
2	Jumlah penduduk	252.677	241.430
	<b>Rasio Rumah Sakit</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>
		<b>1 : 252,677</b>	<b>1 : 241,430</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Rasio dokter per satuan penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng, baik berstatus PNS maupun bukan. Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah dokter tercatat 72 orang yang bertugas di Rumah sakit dan Puskesmas, dengan demikian jika dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2017, maka rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng adalah 0,298, meningkat sedikit dibanding tahun 2016 dimana dokter yang tercatat adalah 55 orang atau dengan rasio 0.218. Masih rendahnya rasio dokter tersebut salah satunya disebabkan karena keterbatasan pemerintah daerah dalam rekrutmen.

**Tabel 2. 44**  
Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Tahun  
2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah dokter	55	72
2	Jumlah Penduduk	252.677	241.430



	<b>Rasio Dokter</b>	<b>0,218</b>	<b>0,298</b>
		<b>1:4594</b>	<b>1:8082</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis yang dimaksud merupakan tenaga yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah tenaga medis memiliki rasio 1 tenaga medis terhadap 1.113 jiwa masyarakat memiliki rasio lebih besar dibanding dengan tahun 2016 dengan rasio 1 tenaga medis dalam 1.010 jiwa masyarakat. Hal tersebut dikarenakan jumlah tenaga medis yang berkurang dengan adanya tenaga medis yang pensiun.

**Tabel 2. 45**  
Rasio tenaga medis per satuan Penduduk Tahun  
2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
<b>1</b>	Jumlah tenaga medis	227	239
<b>2</b>	Jumlah Penduduk	252.677	241.430
	<b>Rasio Tenaga Medis</b>	<b>0,898</b>	<b>0,990</b>
		<b>1:1113</b>	<b>1:1010</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.



**Tabel 2. 46**  
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	437	451
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	677	627
	<b>Cakupan Komplikasi Kebidanan</b>	<b>64,55</b>	<b>71,93</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.

**<> Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). cakupan persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan sebesar 95.82 %.Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan tertinggi adalah Puskesmas Batu-Batu sebesar 112.82 % dan terendah adalah Puskesmas Citta sebesar 59,81%



**Tabel 2. 47**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	2.858	2.867
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	3.230	2.992
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	88,48	95,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

<> Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) merupakan upaya peningkatan kesehatan melalui imunisasi lengkap dasar yang diberikan kepada bayi/balita. Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi mempunyai target 80%, Realisasi 91,43%, Capaian 114,29%.

**Tabel 2. 48**

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	64	65
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	70	70
	<b>Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)</b>	<b>91,43</b>	<b>92,86</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi diperoleh dari perhitungan Jumlah desa/kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (64 desa/kel) dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan (70 desa/kel), sehingga dicapai persentase sebesar 91,43% yang melebihi target 80%. Hal ini dapat dicapai karena kesadaran masyarakat khususnya para orang tua anak balita membawa anaknya ke Posyandu untuk mendapatkan Imunisasi dasar lengkap.



#### <> Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Balita Gizi Buruk merupakan faktor anak terlahirdengan BBLR dan adanya penyakit yang menyertai sejak lahir (Kelainan bawaan). %. Hal ini dapat dicapai karena dicapai karena meningkatnya upaya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini pada petugas kesehatan atau sarana kesehatan yang tersedia sehingga anak dapat terlahir dengan sehat dan atau mencegah terjadinya kelahiran dengan BBLR sebagaimana diketahui menjadi faktor utama terjadinya Gizi Buruk. Target Prevalensi Balita Gizi Buruk adalah <2%, Realisasi sebesar 0,015%, maka dari itu capaian adalah 100%.

**Tabel 2. 49**  
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	3	2
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	3	2
	<b>Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Realisasi Prevalensi Balita Gizi Buruk dihitung dari jumlah kasus balita buruk dalam dibagi jumlah seluruh balita dalam kurun waktu yang sama. Capaian tahun 2017 dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 2 kasus dibagi jumlah seluruh balita sebanyak 12.132 balita dikali 100% (seratus persen) sehingga Realisasi prevalensi balita gizi buruk tahun 2017 sebesar 0,015%.

#### <> Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

Kalori adalah satuan unit kandungan panas atau energi. Akan tetapi, lebih tepatnya kalori adalah jumlah energi yang Anda dapatkan dari makanan dan minuman, atau energi yang kita bakar melalui aktivitas



sehari-hari. Sederhananya, kalori adalah energi yang dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Standar proporsi kalori yang ditetapkan di Indonesia sebesar 2.100 Kkal/Kapita/hari. Namun di Kabupaten Soppeng masyarakat dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum sebesar 2,43% di tahun 2016 dan 2,49% di tahun 2017. Hal tersebut membuktikan bahwa asupan kalori yang diterima masyarakat Soppeng tinggal sedikit yang belum menerima asupan kalori dibawah standar. Namun tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah melalui petugas kesehatan.

**Tabel 2. 50**

**Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari)	327	327
2	Jumlah balita	13.465	13.132
	Proporsi Penduduk	2,43	2,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Penyakit Campak adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis (peradangan selaput ikat mata/konjungtiva) dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak golongan *Paramixovirus*. Sehingga salah satu cara untuk mencegah penyakit campak maka perlu dilakukan imunisasi campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2016 sebanyak 96,16% dan pada tahun 2017 sebanyak 90,77%. Namun perlu perhatian khusus terhadap pelayanan imunisasi campak oleh petugas kesehatan.



**Tabel 2. 51**

Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Tahun  
2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	2.958	2.792
2	Jumlah anak usia 1 tahun	3.076	2.076
	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	96,16	134,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk**

Definisi kasus AFP adalah kelumpuhan flaccid (layuh) tanpa penyebab lain pada anak kurang dari 15 tahun. Flaccid paralysis terjadi pada kurang dari 1% dari infeksi poliovirus dan lebih dari 90% infeksi tanpa gejala atau dengan demam tidak spesifik. Kejadian Polio AFP di Kabupaten Soppeng di tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada. Hal ini disebabkan keberhasilan etugas kesehatan, terutama petugas imunisasi yang memberikan pelayanan imunisasi polio pada bayi dan balita.

**Tabel 2. 52**

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Tahun  
2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	0	0
2	jumlah penduduk < 15 tahun	-	-
	<b>Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk</b>	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Cakupan balita pneumonia yang ditangani**

Jumlah kasus Balita dengan Pneumonia ditangani di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 192 kasus dan semua mendapatkan pelayanan dari tenaga medis. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta menjauhkan anak- anak dari perokok, mengingat pneumonia masih



merupakan permasalahan yang perlu penanggulangan yang serius mengingat dampak yang timbul sangat mempengaruhi derajat kesehatan terutama pada kelompok umur balita

**Tabel 2. 53**  
Cakupan balita pneumonia yang ditangani Tahun  
2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani	312	192
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	847	847
	<b>Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani</b>	<b>36,84</b>	<b>22,67</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mempunyai target 100%, Realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB didapat dari perhitungan dengan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sejumlah 232 orang dibagi orang dengan TB diwilayah kerja pada kurun waktu yang sama sejumlah 232 orang dikali 100% (seratus persen).

**Tabel 2. 54**  
Cakupan penemuan dan penanganan penderita  
penyakit TBC BTA Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	167	304
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	418	486
	<b>Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA</b>	<b>39,95</b>	<b>62,55</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Realisasi pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai karena Para Petugas Kesehatan yang terkait dengan program TB pada umumnya sudah terlatih dan termotivasi untuk



memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk bersama-sama menekan dan atau mencegah terjadinya penyakit TB. Hal ini dapat dicapai karena adanya partisipasi semua Stakeholders termasuk Petugas kesehatan, Masyarakat termasuk lingkup dinas kesehatan untuk memprogramkan pertemuan dan pelatihan petugas yang terlibat pelayanan TB sehingga semua Petugas sudah terlatih dan setiap pendamping dan keluarga penderita TB dilakukan konseling.

**<> Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tingkat prevalensi Tuberkulosis di kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 87 dari 100.000 penduduk dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 126 dari 100.000 penduduk. Hal ini dapat dicapai karena adanya partisipasi semua Stakeholders termasuk Petugas kesehatan, Masyarakat termasuk lingkup dinas kesehatan untuk memprogramkan pertemuan dan pelatihan petugas yang terlibat pelayanan TB.

**Tabel 2. 55**  
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	220	304
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	252.677	241.430
	<b>Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)</b>	<b>87</b>	<b>126</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Mortalitas karena TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB pada orang dengan HIV negatif sesuai dengan revisi terakhir dari ICD-10 (international classification of diseases). Penemuan pasien



merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat.

**Tabel 2. 56**  
Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Paise TB yang meninggal	6	8
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	252.677	241.430
	<b>Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)</b>	<b>2,37</b>	<b>3,31</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Angka kematian karena Tuberkulosis di kabupaten soppeng sebesar 2,37 per 100.000 penduduk dan meningkat ditahun 2017 sebesar 3,31 per 100.000 penduduk. Sehingga itu perlu pencegahan dan penanganan terhadap penyakit TB.

#### <> Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah  $(200:100.000) \times 1.000.000 = 2.000$  kasus.



**Tabel 2. 57**

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	167	304
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	418	486
	<b>Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS</b>	<b>39,95</b>	<b>62,55</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Di kabupaten Soppeng proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2016 sebanyak 39,95% dan meningkat di tahun 2017 sebesar 62,55%. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kinerja petugas dalam penanganan penyakit Tuberkulosis.

**<> Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**

Adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB. Angka kesembuhan semua kasus pada tahun 2016 sebesar 18,56 % dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 43,3%. hasil pengobatan lainnya tetap perlu diperhatikan, meninggal, gagal, putus berobat (*lost to follow up*), dan tidak dievaluasi.

**Tabel 2. 58**

Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	31	84
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	167	194
	<b>Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS</b>	<b>18,56</b>	<b>43,30</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng



<> **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue melalui Vektor nyamuk, Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 35 kasus atau sebesar 15 per 100.000 penduduk / status KLB. Seluruh wilayah kecamatan terkena kasus DBD, kasus tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Lalabata ( Puskesmas Salotungo sebanyak 6 kasus, Puskesmas Malaka sebanyak 4 kasus dan Puskesmas Sewo 2 kasus ). Jumlah kasus tersebut telah dilakukan penanganan dengan baik sehingga tidak terjadi kematian akibat penyakit DBD.

**Tabel 2. 59**  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita  
Penyakit DBD Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	471	35
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	471	35
	<b>Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

<> **Penderita diare yang ditangani**

Jumlah kasus penyakit diare di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 7.051 kasus ,mengalami penurunan dibanding tahun 2016 sebanyak 10.008 kasus. Kualitas lingkungan yang sehat, pola hidup bersih serta pemanfaatan jamban keluarga dapat membantu menurunkan angka kesakitan terutama penyakit diare.

**Tabel 2. 60**  
Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader	10.008	7.051
2	Jumlah perkiraan penderita diare	12.220	12.220
	<b>Penderita Diare yang Ditangani</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng



#### <> Angka kejadian Malaria

Penyakit malaria merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh vektor nyamuk anoples. Jumlah penderita malaria (pemeriksaan sediaan darah positif) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 10 kasus, meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 12 kasus. Kasus tertinggi terdapat di Puskesmas Tanjonge sebanyak 5 kasus, dan Puskesmas yang tidak mempunyai kasus yaitu Puskesmas, Takalala, Goarie, Pacongkang, Cangadi, Baringeng, Cakkuridi, Batu-Batu, dan Citta.

**Tabel 2. 61**  
Angka Kejadian Malaria Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Penduduk yang menderita malaria	12	10
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	226.305	226.305
	<b>Angka Kejadian Malaria</b>	<b>5,30</b>	<b>4,42</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Tingkat kematian akibat malaria

Berdasar dari kejadian malaria di Kab. Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 10 kasus, meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 12 kasus, namun tidak terjadi kematian, hal tersebut di karenakan adanya upaya yang sigap yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam menanggapi kejadian penyakit malaria.

**Tabel 2. 62**  
Tingkat Kematian Akibat Malaria Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kematian tersangka malaria	0	0
2	Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun	226.305	226.305
	<b>Tingkat Kematian Akibat Malaria</b>	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng



**<> Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida**

Kejadian malaria merupakan hal yang wajib diwaspadai, untuk itu perlu dilakukan penagannan pencegahan penularan penyakit malaria, salah satu cara yang dilakukan yaitu penggunaan kelambu berinsektisida. Namun dikabupaten soppeng kejadian malaria bukanlah endemic, melainkan kejadian yang diperoleh dari kunjungan masyarakat dari luar daerah terutama dari Papua. Sehingga penularan penyakit malaria di kabupaten Soppeng tidak dianggap sebagai endemic dan suplay kelambu berinsektisida sudah tidak ada.

**Tabel 2. 63**

**Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida	0	0
2	Jumlah Balita	0	0
	<b>Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng*

**<> Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat**

Kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 10 kasus, meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 12 kasus yang dimana penanganan dengan pemberian obat anti malaria diberikan dengan tepat terutama terhadap balita dengan demam dengan terduga malaria.



**Tabel 2. 64**

**Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT	12	10
2	Jumlah penderita positif	12	10
	<b>Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi**

Prevalensi HIV/AIDS yang diperoleh terhadap penanganan HIV/AIDS karena adanya partisipasi semua Petugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat baik yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS ataupun yang sudah terinfeksi HIV/AIDS termasuk pelatihan bagi Petugas pada sarana RS, VCT, CST dan Petugas Laboratorium, serta sudah terlaksananya layanan VCT dan CST di RSUD Latemmamala.

**Tabel 2. 65**

**Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS	8	8
2	Jumlah penduduk	252.677	241.430
	<b>Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi</b>	<b>0,0032</b>	<b>0,0033</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir**

Penggunaan kondom merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah penyakit HIV/AIDS. Namun dari data yang diketahui terhadap pengguna kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir tidak dapat diketahui. Karena tidak adanya pemantau penggunaan kondom yang dilakukan petugas saat ada hubungan seks.



**Tabel 2. 66**

**Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko  
Tinggi Terakhir Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	-	-
2	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	-	-
	<b>Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir</b>	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS**

Pemberian pengetahuan tentang HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun harus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di masyarakat. Namun data terhadap proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS belum dapat tersimpulkan. Karena petugas kesehatan melakukan penyuluhan HIV/AIDS terhadap siswa SMP dan SMA telah maksimal namun masih banyak usia 15-24 tahun tidak mengenyam pendidikan lebih baik atau tidak sekolah.

**Tabel 2. 67**

**Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko  
Tinggi Terakhir Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS	0	0
2	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun	226.305	226.305
	<b>Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng



#### <> Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Masyarakat miskin perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal merupakan tujuan pokok upaya kesehatan dengan meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, baik oleh pemerintah maupun swasta yang didukung oleh pesatnya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

**Tabel 2. 68**  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien  
Masyarakat Miskin Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	25.155	40.439
2	Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten	136.844	153.940
	<b>Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin</b>	<b>18,38</b>	<b>26,27</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Capaian rujukan terhadap masyarakat miskin pada tahun 2016 18,38 %, sedangkan pada tahun 2017 rujukan yang diberikan meningkat sebanyak 26,27% hal ini dikarenakan adanya peningkatan pemanfaatan rujukan yang dilakukan masyarakat miskin yang diberikan.

#### <> Cakupan kunjungan bayi

Cakupan Kunjungan bayi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam memantau tingkat kesehatan bayi lahir. Jumlah Bayi Lahir Hidup pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng sebanyak 2.850 dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 2.631 (92,32%). Puskesmas tertinggi adalah Puskesmas Panincong sebesar 100,60% dan Puskesmas terendah adalah Puskesmas Tanjonge sebesar 74,11%.



**Tabel 2. 69**

**Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	2852	2673
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	2852	2860
	<b>Cakupan Kunjungan Bayi</b>	<b>100</b>	<b>93,5</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Cakupan puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai : 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Pada tahun 2017 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 (Tujuh Belas) unit terdiri dari 6 (Enam) Puskesmas Rawat Inap, 11 (Sebelas) Puskesmas Non Rawat Inap,

**Tabel 2. 70**

**Cakupan Puskesmas Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah puskesmas	17	17
2	Jumlah seluruh kecamatan	8	8
	<b>Cakupan Puskesmas</b>	<b>212,5</b>	<b>212,5</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng



#### <> Cakupan pembantu puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 (Tujuh Belas) unit terdiri dari 6 (Enam) Puskesmas Rawat Inap, 11 (Sebelas) Puskesmas Non Rawat Inap, dengan Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 44 (empat Puluh Empat) unit yang menjadi layanan kesehatan di Desa/Kelurahan dari 70 Desa/Kelurahan. Dan ditunjang dengan Poskesdes sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) unit dengan pelayanan KIA/KB.

**Tabel 2. 71**  
Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pembantu puskesmas	44	44
2	Jumlah seluruh desa	70	70
	<b>Cakupan Pembantu Puskesmas</b>	<b>62,86</b>	<b>62,86</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada trisemester pertama, sekali pada Trimester ke-2 dan dua kali pada Trimester ke-3. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Melalui ANC (K4) diharapkan deteksi dini dan perawatan kehamilan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Dengan demikian komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dapat dicegah sehingga kematian pada ibu hamil dan janinnya dapat juga dicegah. Cakupan Pelayanan K1 di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 95,76 %, dan Cakupan Pelayanan K4 sebesar 87,97% telah mencapai target SPM, hal ini berarti akses pelayanan kepada sasaran ibu hamil sudah baik.



**Tabel 2. 72**

**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	2.796	2.757
2	Jumlah sasaran ibu hamil	3.384	3.134
	<b>Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4</b>	<b>82,62</b>	<b>87,97</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Cakupan pelayanan nifas**

Cakupan Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.

**Tabel 2. 73**

**Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	2.878	2.721
2	Jumlah seluruh ibu nifas	3.230	2.992
	<b>Cakupan Pelayanan Nifas</b>	<b>89,1</b>	<b>90,9</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan. Cakupan Pelayanan ibu nifas di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017 sebesar 90.9%.

**<> Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani**

Jumlah Ibu hamil pada tahun 2017 di Kab. Soppeng sebanyak 3.134 dengan perkiraan neonatal resti sebanyak 427. Jumlah neonatal resti dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 194 atau 45,43%. Cakupan



Neonatal dengan komplikasi semua ditangani oleh tenaga kesehatan. Puskesmas tertinggi adalah Puskesmas Malaka sebesar 76,00% dan Puskesmas terendah yaitu Puskesmas Ganra sebesar 4,55%.

**Tabel 2. 74**  
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang  
Ditangani Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	199	194
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	461	427
	<b>Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani</b>	<b>43,17</b>	<b>45,43</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan balita. Jumlah perkiraan sasaran anak balita pada tahun 2017 di sebanyak 17.878 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 11.132 (62,3%). Puskesmas tertinggi adalah Puskesmas Batu Batu sebesar 79,3% dan Puskesmas terendah adalah Puskesmas Cabenge sebesar 38,7%.

**Tabel 2. 75**  
Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	11.714	11.132
2	Jumlah seluruh anak balita	22.164	17.878
	<b>Cakupan Pelayanan Anak Balita</b>	<b>52,85</b>	<b>62,27</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

#### <> Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai



dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng jumlah bayi berumur 0-6 bulan sebanyak 1.172 anak dan yang diberikan ASI Eksklusif sebanyak 967 bayi (82,5%).

**Tabel 2. 76**  
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	36	179
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	36	179
	<b>Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat**

Penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat dilakukan pada semua murid SD/setingkat yang duduk di kelas I. Pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng tercatat 8.901 siswa SD/ setingkat kelas I dan semua diperiksa kesehatannya melalui kegiatan penjarangan (100%).

**Tabel 2. 77**  
Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	276	275
2	Jumlah murid SD dan setingkat	276	275
	<b>Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin**

Pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat diharapkan mampu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya komitmen pemerintah



terhadap pelayanan kesehatan. Maka pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat miskin dilakukan 100% dengan fasilitas JKN.

**Tabel 2. 78**  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat  
Miskin Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	122.586	174.884
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	136.844	153.940
	<b>Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin</b>	<b>89,58</b>	<b>113,61</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)**

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2017 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten Soppeng sebanyak 1 (satu) unit dengan pelayanan gawat darurat level 1.

**Tabel 2. 79**  
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang  
Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2016-  
2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Pelayanan gawat darurat level 1	1	1
2	Jumlah RS	1	1
	<b>Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

**<> Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan



Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

**Tabel 2. 80**  
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus  
Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam	1	3
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi	1	3
	<b>Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi &lt; 24 jam</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dilakukan dengan baik oleh petugas kesehatan baik yang dilakukan oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan sebagai upaya penanganan penyakit. Hal tersebut dibuktikan dengan 100% penyelidikan epidemiologi terhadap KLB.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 81**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan  
Wajib Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
<b>3.1</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>			
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,37	0,33
	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4			
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	37,29	32,61
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		-	-
	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		-	-
	Persentase rumah tinggal bersanitasi		83,29	90,84



NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar		-	-
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		-	-
	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun			
	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		-	-
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		72,57	74,53
	Rasio Jaringan Irigasi		-	-
	Persentase penduduk berakses air minum		95,84	96,45
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		89,92	90,03
	Persentase areal kawasan kumuh		-	
	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan			
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		-	16,61
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		1,73	1,94
<b>3,2</b>	<b>PENATAAN RUANG</b>			
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB		38,34	38,34
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Ha	1.651,05	1.651,05
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		11,34	12,2
	Ruang publik yang berubah peruntukannya		NA	NA
	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		NA	NA
	Ketaatan terhadap RTRW		NA	NA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Berdasarkan tabel di atas, tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang dijelaskan sebagai berikut :

#### <> Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Konsep dari realisasi pembangunan secara fisik yang tepat adalah pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur, terutama akses jalan. Karena dengan demikian, maka pembangunan di bidang lain akan berkembang dengan sendirinya. Sejalan dengan kebijakan tersebut



Pemerintah Kab.Soppeng terus berusaha untuk meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, pada tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 37 persen dihitung dari panjang jalan kondisi baik 293,136 km dibagi dengan panjang jalan keseluruhan yaitu 898,881 km, selanjutnya pada tahun 2017 porsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menjadi 33 persen turun dibanding tahun 2016 kondisi ini terjadi karena adanya perubahan data dasar, dimana data panjang jalan kondisi baik yang digunakan tahun sebelum masih menggunakan data tahun 2012.

#### **<> Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam)**

Infrastruktur merupakan urat nadi bagi perekonomian. Tanpa didukung infrastruktur maka akan sulit mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dukungan dari infrastruktur jalan. Dengan tersedianya jalan yang dalam kondisi baik, akses masyarakat dalam kegiatan mobilisasi yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian sangat banyak memberi dampak positif seperti memangkas waktu dan jarak tempuh yang otomatis mengurangi biaya operasional. Selain itu ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai merupakan faktor utama dalam menyelenggarakan pelayanan pariwisata. Akses jalan yang memadai merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng. Sebagai dukungan untuk hal tersebut di atas di Kabupaten Soppeng persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40km/jam) pada tahun 2016 mencapai 37,29 persen dihitung dari panjang jalan kondisi baik 293,136 km dibagi dengan panjang jalan keseluruhan yaitu 898,881 km, selanjutnya pada tahun 2017 persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40km/jam) menjadi 32,61 persen turun dibanding tahun 2016 kondisi ini terjadi karena adanya perubahan data dasar, dimana data panjang jalan kondisi baik yang digunakan tahun sebelum masih menggunakan data tahun 2012.



#### <> **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Soppeng adalah lingkungan pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0-100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten/kota pada Tahun 2019. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah untuk memperhatikan rumah tangga kumuh sehingga target nasional tercapai 0% kawasan kumuh di Kab. Soppeng. Sehingga hasil yang dicapai pada Tahun 2017 sebanyak 90,84% rumah tinggal yang bersanitasi.

#### <> **Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

Jaringan irigasi sangat berperan dalam mendukung produksi pertanian, karena dengan keberlanjutan aliran air irigasi ke lahan-lahan pertanian akan menentukan tingkat produksi yang dicapai. Mengingat Kabupaten Soppeng merupakan penyuplai gabah ke beberapa daerah lain di wilayah Indonesia, Pemerintah sangat memperhatikan mengenai pemeliharaan irigasi kabupaten. Hal ini berdampak pada capaian realisasi yang dicapai 74,53 persen pada Tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 yaitu 72,57 persen.

#### <> **Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Terkait pelayanan air minum, dari data terlihat bahwa cakupan persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2017 semakin meningkat yakni 96,45%, dibanding tahun 2016 yang mencapai 95,84%, namun dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan air minum tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanannya. Saat ini masih sering dijumpai banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan air minum yang belum lancar distribusi maupun keluhan terhadap kualitas air yang dihasilkan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan pengoptimalan sarana prasarana dasar permukiman yang berkualitas.



### **<> Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan**

Terkait infrastruktur permukiman pemerintah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dengan target mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Berdasarkan data, 52.267 dari 58.353 atau 90.03% rumah tangga yang ada di Kabupaten Soppeng telah masuk kategori rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen yang tinggi terkait dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

### **<> Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk**

Jenis-jenis RTH ada beberapa macam diantaranya pemakaman umum. Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Tempat pemakaman Umum TPU sebagai salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Berdasarkan data pada Kabupaten Soppeng, untuk Tahun 2017 rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung dari jumlah TPU yang ada sebanyak 37.605 unit dan jumlah penduduk sebanyak 226.466 sehingga rasionya pada kisaran 16.61%.



#### <> Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah menunjuk pada perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas seluruh lahan yang di berikan HPL/HGB. Indikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah. Dari hasil perhitungan realisasi yang tercapai sebesar 38.34%. Hal ini menunjukkan rasio RTH pada Kabupaten Soppeng telah melampaui target rasio RTH secara nasional yakni 30%.

#### <> Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH di kawasan perkotaan dapat didasarkan pada : luas wilayah, jumlah penduduk dan kebutuhan fungsi tertentu. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Luas RTH publik di Kabupaten Soppeng adalah 1.651,05 m<sup>2</sup>.

#### <> Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Pemberian IMB dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum serta pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber PAD. Selain itu IMB ditujukan untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungannya. Hal inilah yang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Soppeng mensyaratkan perizinan IMB kepada masyarakat sebelum melaksanakan suatu pekerjaan suatu bangunan. Namun ketidaksadaran masyarakat untuk kepengurusan IMB masih sangat rendah sesuai data yakni 62.733 bangunan hanya 7.652 yang ber-IMB atau sebesar 12.2%



#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 82**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan  
Wajib Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Rasio rumah layak huni		82,98	79,46
2	Rasio permukiman layak huni			
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau			
6	Persentase permukiman yang tertata			
7	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,0006	0,0007
8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan			
9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan			
10	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan umum, layanan wajib wajib dasar, yang diukur dari berbagai indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### <> Ratio Rumah Layak Huni

Rumah bisa dikatakan layak huni apabila memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuninya. Berdasarkan data pada tahun 2016 rumah layak huni di Kab. Soppeng mencapai 48.964 atau 02,98 persen dari jumlah seluruh rumah sebanyak 59.009 rumah. Dan pada tahun 2017 turun menjadi 47.588 rumah atau 79,46 persen dari jumlah rumah seluruhnya yaitu 59.889 rumah.



**Tabel 2. 83**

Rumah Layak Huni Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rumah layak huni	48.964	47.588
2	Jumlah seluruh rumah	59.009	59.889
	<b>Rumah layak huni</b>	<b>82,98</b>	<b>79,46</b>

Sumber : LPPD Kab. Soppeng Tahun 2016 & 2017

#### <> Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh pada tabel berikut :

**Tabel 2. 845**

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Luas lingkungan permukiman kumuh (Km2)	0,00949	0,01060
2	Luas wilayah (Km2)	1.500,00	1.500,00
	<b>% Lingkungan Pemukiman Kumuh</b>	<b>0,0006</b>	<b>0,0007</b>

Sumber : LPPD Kab. Soppeng Tahun 2016 & 2017

#### 5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Kinerja urusan Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2. 85**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan  
Wajib Dasar Ketenteraman, ketertiban umum

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	38,3	68,49
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	N/A	71,23



NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	35,33	58,88
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	59,09	71,43
	<b>Persentase Penegakan PERDA</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan umum, layanan wajib dasar Ketenteraman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas, yang diukur dari berbagai indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### <> Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan

**Tabel 2. 86**  
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)  
Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Petugas Linmas diKab/Kota daerah pemekaran baru	406	726
2	1 Wilayah Kerja Kab/Kota (Jumlah RT)	1060	1060
	<b>Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)</b>	<b>0,90</b>	<b>68,49</b>

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

Mengacu ke target SPM maka Linmas setiap RT adalah 1 orang. Berdasarkan data yang ada, Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab. Soppeng, yang dihitung dari jumlah petugas Linmas di Kabupaten dibagi dengan 1 Wilayah kerja Kabupaten (jumlah RT) pada



tahun 2017 adalah 68,49 % jauh meningkat dibanding kondisi tahun 2016 yaitu 38,3 persen, namun belum dapat memenuhi target 1 RT= 1 Linmas.

**<> Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)**

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. pada tahun 2017 jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan adalah sebanyak 104 kasus atau 71,23 persen dari jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat sebanyak 146.

**Tabel 2. 87**  
penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	N/A	104
2	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat	N/A	146
	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</b>	<b>N/A</b>	<b>71,23</b>

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

**<> Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota**

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi bencana kebakaran. Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan



kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.

- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan data Satpol PP & Damkar, pada tahun 2017 Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran Kab. Soppeng adalah 58,88 % meningkat dibanding tahun 2016 yang baru mencapai 35,33 %.

**Tabel 2. 88**

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota  
Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	529,89	883,15
2	Luas Wilayah Kab/Kota	1.500	1.500
	<b>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)</b>	<b>35,33</b>	<b>58,88</b>

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

**<> Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

**Tabel 2. 89**

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu Maks.15 Menit	13	20
2	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	22	28



No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
	<b>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)</b>	<b>59,09</b>	<b>71,43</b>

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

Pada Tahun 2017 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kab. Soppeng adalah 71,43% meningkat dibanding tahun sebelum sebesar 59,09 %. Hal ini menunjukkan dari jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK belum seluruhnya dapat tertangani dalam batas waktu maksimal 15 Menit.

#### <> Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menyelesaikan setiap pelanggaran Perda yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Anggota Satpol PP.

**Tabel 2. 90**  
Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016-2017  
Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
<b>1</b>	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	NA	20
<b>2</b>	Jumlah Pelanggaran PERDA	NA	20
	<b>Persentase Penegakan PERDA</b>	<b>NA</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

Penyelesaian pelanggaran Perda oleh Satpol PP dilakukan sesuai dengan SOP yaitu tindakan preventif non yustisial, dan apabila pelanggaran Perda mengandung unsur pidana dapat meneruskan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data, Persentase penegakan Perda oleh Sapol PP pada tahun 2017 adalah 100 persen.



## 6. Sosial

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar

Sosial sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 91**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan  
Wajib Dasar Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	97,82	99,20
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	97,82	99,20
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	97,82	99,20
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	0
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	67	155
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	0
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0	54

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel diatas, tergambar pencapaian Kinerja Pelayanan pada Urusan Sosial, yang diukur dari capaian indikator kinerja.



<> **Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial,**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Data Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial pada Tabel berikut :

**Tabel 2. 92**  
**Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**  
**Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	66305	66294
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	67780	66828
	<b>Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial</b>	<b>97,82</b>	<b>99,20</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng*

<> **Persentase PMKS yang tertangani**

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2016 adalah 97,82 persen yang dihitung dari jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan sebanyak 66.305 dibagi dengan jumlah PMKS yang ada sebanyak 67.780 orang. Dan pada tahun 2017 persentase PMKS yang tertangani adalah 99,20 persen dari 66.828 PMKS yang ada. Hal ini menunjukkan kondisi yang membaik untuk tahun



mendatang PMKS dapat tertangani sepenuhnya. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kab. Soppeng mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial yang perlu penanganan dan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

**Tabel 2. 93**  
Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PMKS yang tertangani	66305	66294
2	Jumlah PMKS yang ada	67780	66828
	<b>Persentase PMKS yang Tertangani</b>	<b>97,82</b>	<b>99,20</b>

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

**<> Persentase PMKS skala Kab. yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2016 % PMKS Skala Kab. yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar adalah 99,29 persen. persentase tersebut dihiutng dari Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun sebanyak 66.305 orang dibagi dengan Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya meperoleh bansos. Sementara untuk tahun 2017 % PMKS Skala Kab. yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar adalah 99,20 persen.

**Tabel 2. 94**  
Persentase PMKS Skala Kab. yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	66305	66294
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	66780	66828
	<b>% PMKS Skala Kab. yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar</b>	<b>99,29</b>	<b>99,20</b>

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng



**<> Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial**

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial dihitung dari Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos dibagi dengan Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos. Berdasarkan data Dinas Sosial Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos adalah sebanyak 5 panti.

**Tabel 2. 95**  
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	5	5
	<b>Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

**<> Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**

Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos di Kab. Soppeng yaitu 1 WKBSM atau 100%.

**Tabel 2. 96**  
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	0	1



NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
2	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarnapelayanan kesos skala	0	1
	<b>% Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

#### <> Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat pada tahun 2016 adalah 66,7 persen. yang dihitung dari jumlah korban yang menerima bantuan sebanyak 20 korban dibagi dengan jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 30 orang. Dan pada tahun 2017 mencapai 155,3 persen. yang dihitung dari jumlah korban yang menerima bantuan sebanyak 205 korban dibagi dengan jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 132 orang.

**Tabel 2. 97**

**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	20	205
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	30	132
	<b>% Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat</b>	<b>66,7</b>	<b>155,3</b>

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng



### 2.3.1.2. Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar

Kinerja layanan urusan wajib Non Pelayanan Dasar, diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan wajib yang berkaitan dengan Non pelayanan dasar terdiri dari:

#### 1. Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 98**  
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	0
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	14,46	30,61
4	Keselamatan dan perlindungan	%	1,80	4,06
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	0,28	1,30
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,60	1,11
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	100	100
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	22,22
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	50
	Rasio lulusan S1/S2/S3			

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Soppeng

Berdasarkan tabel diatas, tergambar pencapaian Kinerja Pelayanan pada Urusan Sosial, yang diukur dari capaian indikator kinerja:



### <> Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Soppeng adalah persentase antara jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja. pengangguran terbuka sendiri adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

**Tabel 2. 99**  
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2017  
Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	2854	3096	3717
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	197,275	199,796	164,116
	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>1.45%</b>	<b>1.55%</b>	<b>2.26%</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel 2.97 persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2015-2017 cenderung mengalami kenaikan mulai dari 1.45% pada Tahun 2015 hingga mencapai 2.26% pada Tahun 2017.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2. 100**

**Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib  
Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10,94	11,61
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		89,06	88,39
4	Rasio KDRT		0,000069	0,000034
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		N/A	N/A
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	96,97	98,12
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit		N/A	N/A
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	N/A	40
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	11,11	45,45
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		N/A	N/A
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		N/A	N/A
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		91,57	92,5
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1,01	1,31
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		1,15	1,1



NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		N/A	N/A
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 thn		4,77	2,57
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	%	48,71	52,89

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel diatas, tergambar capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, yang diukur dari capaian indikator kinerja :

#### <> Persentase perempuan dilembaga pemerintahan

Persentase perempuan dilembaga pemerintahan, menunjukkan persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah dari jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan, pada tahun 2016 tercatat 3.878 pekerja perempuan di lembaga pemerintah atau 10,94 persen dari total jumlah pekerja perempuan sebanyak 35.455, selanjutnya di tahun 2017 persentase perempuan dilembaga pemerintah meningkat menjadi 4.616 orang atau 11,61 persen dari jumlah pekerja perempuan sebanyak 39.775. peningkatan tersebut disebabkan adanya penerimaan kontrak per tahun di lembaga pemerintahan.

**Tabel 2. 101**  
Persentase perempuan dilembaga pemerintahan Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.878	4.616
2	Jumlah pekerja perempuan	35.455	29.775
	<b>Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah</b>	<b>10,94</b>	<b>11,61</b>

Sumber : Dinas PPPA

#### <> Partisipasi perempuan dilembaga swasta

Partisipasi perempuan dilembaga swasta, menunjukkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dari total jumlah pekerja perempuan, pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan di lembaga



swasta tercatat sebanyak 31.577 orang atau 89,06 persen dari jumlah pekerja perempuan sebanyak 35.455 orang. sedangkan pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebanyak 35.159 orang atau 88,39 persen dari jumlah pekerja perempuan sebanyak 39.775 orang. Secara persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta pada tahun 2017 mengalami penurunan di banding kondisi tahun 2016, namun secara umum dapat dikatakan bahwa kesempatan perempuan di Kabupaten Soppeng untuk berpartisipasi di lembaga swasta terbuka karena bertumbuhnya Lembaga-lembaga swasta di daerah yang membutuhkan tenaga kerja baik perempuan maupun laki-laki. Dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja.

**<> Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD**

Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD menunjukkan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dari jumlah total kursi di keanggotaan DPRD pada tahun 2016 jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan adalah sebanyak 6 kursi atau 20 persen dari jumlah total kursi keanggotaan DPRD sebanyak 30 kursi . Begitupula di tahun 2017 tetap 6 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi keanggotaan DPRD. Masih rendahnya keterpilihan perempuan di DPRD karena kurangnya pemahaman pemilih perempuan untuk memilih perempuan serta kurangnya kualitas perempuan yang menjadi calon legislatif.

**<> Ratio KDRT**

Ratio KDRT menunjukkan jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari total Jumlah Rumah Tangga, pada tahun 2016 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah 4 kasus atau 0,000069 dari jumlah seluruh Rumah Tangga dan tahun turun menjadi hanya 2 kasus atau 0,000034 dari jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 58.353. Penurunan kasus KDRT tersebut, karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini tidak terlepas dari pemerintah dalam hal pembinaan dan penyadaran melalui sosialisasi.



**<> Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur**

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur pada dinas DPPPA belum ada data pada tahun 2016 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan tidak menjadi salah satu indicator kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**<> Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, menunjukkan menunjukkan jumlah partisipasi angkatan angkatan kerja perempuan dari total jumlah angkatan kerja perempuan, pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Soppeng sebanyak 35.455 atau 96,97 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 36.563. dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 39.775 orang atau 98,12 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 40.539 orang.

**<> Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum menunjukkan jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum dari total jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum, pada tahun 2016 jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum adalah 25 korban atau 100 persen dari jumlah korban dan pada tahun 2017 jumlah korban yang mendapatkan bantuan hukum adalah 21 korban atau 100 persen dari jumlah korban.

**<> Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu**

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos dari jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos, pada tahun 2017 jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos adalah 2 korban atau 40



persen dari jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos sebanyak 5 korban. Penanganan korban tersebut dapat dilakukan karena adanya koordinasi yang cukup dengan pihak yang terkait dalam penanganan kasus Perempuan dan Anak korban kekerasan serta terlatihnya SDM yang ada di ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meskipun belum seluruhnya dapat tertangani. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman terhadap petugas yang menangani hal tersebut.

**<> Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan, pada tahun 2016 jumlah yang diputuskan pengadilan sebanyak 1 perkara atau 11,11 % dari jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan sebanyak 9 perkara. pada tahun 2017 jumlah yang diputuskan pengadilan sebanyak 5 perkara atau 45,45 % dari jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan sebanyak 11 perkara.

**<> Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, menunjukkan jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum, dari jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Pada tahun 2016 jumlah korban yang layanan bantuan hukum sebanyak 25 korban dan seluruhnya mendapatkan layanan atau 100 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2017 dari 21 korban yang membutuhkan bantuan hukum seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum



**<> Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD**

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD menunjukkan perbandingan APMD SD Perempuan dengan APM SD Laki-Laki, pada tahun 2017 ratio APM Perempuan/Laki-Laki adalah 92,50 angka ini menunjukkan Angka Partisipasi Murni perempuan dibanding laki-laki mencapai 92-93 . Kondisi ini tidak jauh berbeda dibanding tahun 2016 yaitu 91,57 % dengan perbandingan 10.040 APM Perempuan dan APM SD Laki-Laki adalah 10.964.

**<> Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP**

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP menunjukkan perbandingan APMD SMP Perempuan dengan APM SMP Laki-Laki, pada tahun 2017 ratio APM Perempuan/Laki-Laki adalah 131,24 angka ini menunjukkan Angka Partisipasi Murni perempuan dibanding laki-laki mencapai 131 . Meningkat dibanding tahun 2016 yaitu 101,78 dengan perbandingan 6.334 APM Perempuan dan APM SMP Laki-Laki adalah 6223.

**<> Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA**

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA menunjukkan perbandingan APMD SMA Perempuan dengan APM SMA Laki-Laki, pada tahun 2017 ratio APM Perempuan/Laki-Laki adalah 115,5 angka ini menunjukkan Angka Partisipasi Murni perempuan dibanding laki-laki mencapai 115 . dan pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan yaitu 110,3 % atau dengan perbandingan 5.038 APM Perempuan dan APM SD Laki-Laki adalah 4.363.

**<> Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 14-24 Tahun**

Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 14-24 Tahun, menunjukkan perbandingan AMH 15-24 perempuan dengan AMH 15-24 Laki-Laki, pada tahun 2016 perbandingan AMH 15-24 perempuan adalah 4,77 atau 124 berbanding 26, sementara pada tahun 2017 perbandingannya adalah 108 berbanding 42 atau 2,57.



Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat khususnya perempuan pentingnya pendidikan.

#### <> Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non pertanian, dihitung dari banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian dari total banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian, pada tahun 2016 jumlah pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian adalah 23.714 orang atau 48,71 persen dari jumlah pekerja upahan di sektor non pertanian sebanyak 48.689 pekerja. Dan pada tahun 2017 jumlah pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian adalah 28.034 pekerja atau 52,89 persen dari jumlah pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebanyak 53.009 pekerja.

### 3. Pangan

**Tabel 2. 102**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib  
Non Pelayanan Dasar Pangan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Ketersediaan pangan utama	%	2,72	3,03
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kpt	621.922,75	671674,55
		Protein per Kpt	14.560,75	15.725,57
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	42,86	45,45

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

#### <> Ketersediaan pangan utama

Persentase Ketersediaan Pangan Utama dihitung dari Rata-rata jumlah pangan utama per tahun (kg) dibagi dengan jumlah penduduk, pada tahun 2016 % ketersediaan pangan utama di Kab.Soppeng adalah 52,88 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,02.



**Tabel 2. 103**

**Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	133.606,00	169.060,00
2	Jumlah penduduk	252.677,00	241.430,00
	<b>Ketersediaan Pangan Utama (%)</b>	<b>52,88</b>	<b>70,02</b>

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

**<> Ketersediaan energi dan protein perkapita**

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita pada Tahun 2017 adalah Ketersediaan Energi 8.539 dan Ketersediaan Protein perkapita 201,25. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat Ketersediaan Kalori dan Ketersediaan Protein pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 104**

**Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Ketersediaan pangan/kapita/hari	-	-
2	Kandugan Kalori	-	-
3	Kandugan Protein	-	-
4	BDD	-	-
5	Ketersediaan Energi Perkapita	8.539,00	54.291,00
6	Ketersediaan Protein Perkapita	201,25	476,70

Sumber Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan kalori dan protein pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh tingkat ketersediaan energi untuk padi-padian khususnya jenis pangan beras dimana tingkat ketersediaannya tinggi sebesar 267.08.

**<> Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**

Untuk memberi rasa aman kepada masyarakat, pemerintah melalui Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan secara kontinyu melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tersebut dalam melakukan



pengujian terhadap makanan yang diperjualbelikan. Pengujian dilakukan dengan bekerjasama dengan oleh Tim penguji dari salah satu akademi yaitu Universitas Hasanuddin Makassar.

**Tabel 2. 105**  
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun  
2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	3	5
2	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	7	11
	<b>Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)</b>	<b>42,86</b>	<b>45,45</b>

*Sumber Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan*

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada tahun 2016 pencapaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah sebesar 42,86%. Pencapaian tersebut berupa hasil pengujian di laboratorium terdapat jumlah pangan yang diuji adalah 7 sampel dengan hasil pengujian yang aman dikonsumsi sebanyak 4 sampel dan sebanyak 3 sampel yang tidak aman.

Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar buah-buahan di Kabupaten Soppeng mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan terutama formalin dan pada Tahun 2017 tingkat pencapaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 45% dengan jumlah sampel yang pangan yang diuji sebanyak 11 sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul dan jumlah sampel yang aman atau hasil pengujian oleh Tim dari akademisi (Unhas) menunjukkan bahwa sampel aman sebanyak 5 dan sampel yang tidak aman sebanyak 6 sampel, dimana kondisi ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Tim penguji dari salah satu akademi yaitu Universitas Hasanuddin Makassar menunjukkan bahwa jenis sampel yang diuji belum aman untuk di konsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng terutama



beberapa jenis buah-buahan seperti buah apel, buah anggur dan ikan kering yang dijual di pasar tradisional di Kabupaten Soppeng yang di duga mengandung zat pengawet atau formalin.

#### 4. Pertanian

**Tabel 2. 106**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib  
Non Pelayanan Dasar Pertanian

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	66,90	67,12
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	%	86,6	100

Berdasarkan Tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

##### <> Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Jumlah Luas Lahan bersertifikat pada tahun 2016 adalah 3.458.359 atau 66,90 dari Luas lahan yang seharusnya bersertifikat 5.169.549,60 dan pada tahun 2017 luas lahan yang bersertifikat menjadi 3.465.742 atau 67,12 persen dari luas lahan yang seharusnya bersertifikat.

**Tabel 2. 107**

Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	3.458.359,00	3.465.742,00
2	Luas lahan yang seharusnya bersertifikat	5.169.549,60	5.163.458,60
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	66,90	67,12

Sumber : LPPD Kab. Soppeng Tahun 2016 dan 2017

##### <> Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Pada tahun 2016 jumlah kasus yang terdaftar adalah 8 kasus dan diselesaikan 100 % demikian pula di tahun 2017 jumlah kasus tanah negara adalah 2 kasus dan terselesaikan 100 persen.



**Tabel 2. 108**

**Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	8	2
2	Jumlah kasus yang terdaftar	8	2
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100	100

Sumber : LPPD Kab. Soppeng Tahun 2016 dan 2017

**<> Penyelesaian izin lokasi**

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Data Penyelesaian izin lokasi selama tahun 2016-2017 sebagai berikut :

**Tabel 2. 109**

**Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ijin Lokasi	11	19
2	Permohonan Ijin Lokasi	13	19
3	Penyelesaian Ijin Lokasi	11	19
	<b>jumlah</b>	<b>35</b>	<b>57</b>

Sumber: DPMPTSP Kab. Soppeng

**5. Lingkungan Hidup**

**Tabel 2. 110**

**Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		3,32	1,63
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		89,86	91,71
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		0,48	0,48



NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	-	46,67
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		-	-
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional			
12	Penetapan hak MHA		-	-
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		-	-
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana			
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		-	-
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Tidak Ada	Tidak Ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		-	100
18	Timbulan sampah yang ditangani	%	24	53
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	39,54	94,535
20	Persentase cakupan area pelayanan	%	18,53	18,53
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	24	53,45
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		73,05	75,95
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan		0	0
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		0	0



## 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel 2. 111**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib  
Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	0,9	0,97
2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	0,96
3	Rasio pasangan berakte menikah	%	0,33	0,37
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	90,06	96,93
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran		93,1	94,35

Berdasarkan Tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

### <> Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kab. Soppeng, Angka ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dengan Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah (Wajib KTP) Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk kurun waktu 2016-2017 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Rasio tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan hampir tiap tahun dan sudah hampir mencapai angka 100.



**Tabel 2. 112**

**Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng**

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	171.630	177.785
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	190.568	183.416
	<b>Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk</b>	<b>0,90</b>	<b>0,96</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

#### <> Rasio bayi berakte kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase bayi yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran bermanfaat untuk kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Rasio bayi berakte kelahiran dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi, Berikut data Rasio bayi ber-akte kelahiran di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2016-2017:

**Tabel 2. 113**

**Ratio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2017  
Kabupaten Soppeng**

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Bayi Ber-Akte Kelahiran	4.222	3.671
2	Jumlah Bayi	4.222	3.808
	<b>Rasio bayi ber-akte kelahiran</b>	<b>1.00</b>	<b>0,96</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

#### <> Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama.



Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng, diketahui bahwa bahwa jumlah pasangan nikah yang ada di Kab. Soppeng sudah berakte nikah. Sebagai berikut :

**Tabel 2. 114**  
**Ratio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2016-2017**  
**Kabupaten Soppeng**

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Pasangan nikah ber-akte nikah	38.727	41.663
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	118.336	113.461
	<b>Rasio pasangan ber-akte nikah</b>	<b>0,33</b>	<b>0,37</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

#### <> Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kab. Soppeng telah memiliki database kependudukan pada skala Provinsi. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng sudah tersedia. Database kependudukan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kab. Soppeng dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.

#### <> Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format



KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK.

**<> Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan dari total jumlah penduduk Wajib KTP. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng Cakupan Penerbitan KTP, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 115**  
**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun**  
**2016-2017 Kabupaten Soppeng**

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	171.630	177.785
2	Jumlah penduduk wajib KTP	190.568	183,416
	<b>Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</b>	<b>90,06</b>	<b>96,93</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



### <> Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dari total jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, tahun 2016-2017 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2. 116**  
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2017  
Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	2.727	2.555
2	jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	2.929	2.708
	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	93,10	94,35

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Tabel 2. 117**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib  
Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1	3



NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		0,2	0,2
4	Persentase LSM aktif	%	100	100
5	Persentase LPM Berprestasi	%	4	1
6	Persentase PKK aktif	%	100	100
7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	26,60	27,48
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat		NA	NA

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, yang dijelaskan sebagai berikut :

**<> Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik**

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah jumlah kantor pemerintahan desa yang berfungsi dengan kondisi baik dan layak pakai pada masing-masing pemerintahan desa. Pada Tahun 2017, dari 49 pemerintahan desa di Kabupaten Soppeng telah memiliki kantor pemerintahan desa yang berfungsi baik dan beroperasi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan desa. Sehingga cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada tahun 2017 telah mencapai 100%. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2016-2017, pada tabel berikut :

**Tabel 2. 118**

**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng**

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	49	49
2	Jumlah seluruh pemerintah desa	49	40
	<b>Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



### <> Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Sementara rata-rata jumlah LPM adalah jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng berdasarkan Jumlah LPM yang ada. Pada Tahun 2017 terdapat 210 kelompok binaan dari 70 LPM. Sehingga apabila dirata-ratakan terdapat 3 jumlah kelompok Binaan LPM pada Kabupaten Soppeng pada masing-masing LPM.

**Tabel 2. 119**  
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah kelompok binaan LPM	70	201
2	Jumlah LPM	70	70
	<b>Rata-rata jumlah kelompok Binaan LPM</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



#### <> Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Kelompok Binaan PKK Kabupaten Soppeng adalah kelompok yang bergerak di penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dibina secara teknis oleh Tim Penggerak PKK. Rata-rata jumlah binaan PKK adalah jumlah seluruh binaan PKK yang di Kabupaten Soppeng yang pada tahun 2017 terdapat 14 binaan PKK dari 79 jumlah PKK yang ada. Atau pada Tahun 2017 Rata-rata jumlah binaan PKK mencapai angka 0,2.

**Tabel 2. 120**  
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2016-2017  
Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	jumlah kelompok binaan PKK	14	14
2	Jumlah PKK	70	70
	<b>Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### <> Persentase LPM aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM adalah Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017 berjumlah 70 LSM dengan tingkat capaian persentase LSM aktif di Kabupaten Soppeng mencapai 100%.

#### <> Persentase LPM Berprestasi

Ajang kompetisi dan mengoptimalkan daya saing perlu ditumbuhkan. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPM untuk mendapatkan LPM berprestasi merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk meningkatkan gerak keaktifan lembaga-lembaga tersebut. LPM berprestasi adalah pada aspek tertentu mampu berperan dalam



menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pembangunan. Pada tahun 2017 dari 70 LPM yang ada di Kabupaten Soppeng hanya terdapat 1 LPM yang berprestasi atau 1% dari jumlah LPM. Capaian tersebut lebih kecil dari capaian tahun 2015 dan 2016 yang mencapai 3 LPM berprestasi.

**Tabel 2. 121**  
Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Soppeng Tahun  
2016-2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah LPM berprestasi	3	1
2	Jumlah LPM	70	70
	<b>Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK (%)</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### <> Persentase PKK aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Pada Tahun 2017, terdapat 79 PKK yang aktif dari 79 PKK yang terdata. Atau persentase PKK aktif pada Kabupaten Soppeng mencapai 100%.

**Tabel 2. 122**  
Jumlah PKK Aktif Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah PKK Aktif	70	79
2	Jumlah PKK	70	79
	Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK (%)	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



#### <> Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Jumlah Posyandu di Kabupaten Soppeng yang ditempatkan di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya sebanyak 327 posyandu dengan Persentase Posyandu yang aktif pada Kabupaten Soppeng mencapai 100%.

**Tabel 2. 123**  
Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Posyandu Aktif	327	327
2	Jumlah Posyandu	327	327
	<b>Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### <> Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat berintegrasi dengan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural dimana masyarakat yang berswadaya dapat berupa kelompok organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri ataupun himpunan masyarakat tanpa organisasi. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya pada Tahun 2017 dapat terlihat dari Rp.70.469.623.974,- total alokasi anggaran yang dialokasikan seluruh Pemerintah Kelurahan dan Desa terdapat Rp.19.365.830.291,- yang dilaksanakan melalui swadaya masyarakat atau mencapai 27.48%. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh beberapa desa dengan kepanitiaan dilaksanakan oleh Badan Kerjasamanya Antar Desa (BKAD).



**Tabel 2. 124**

**Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng**

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	4.393.203.045	19.365.830.291
2	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	16.136.101.673	70.469.623.974
	<b>Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat %</b>	<b>26,60</b>	<b>27,48</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**<> Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat**

Dalam struktur APBDESA Kabupaten soppeng terdapat keseragaman pelaksanaan program/kegiatan dengan melaksanakan 2 item Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan Kapasitas Kades dan Aparatur Pemerintah Desa serta BPD, dan Program/Kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Desa. Bentuk 2 Program/Kegiatan tersebut adalah non fisik berupa bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan, sehingga tidak terdapat data yang dapat ditampilkan untuk program/kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat khususnya pada Tahun 2017.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**Tabel 2. 125**

**Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,08	0,07
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,3	2,3
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB		20,59	41,18
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	NA	41,18
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		NA	NA



NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		NA	NA
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		NA	NA
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	NA	1,21
9	Ratio Akseptor KB	%	NA	0,75
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	0,78	0,75
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	NA	NA
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun			
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,74	15,67
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	18	14
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	28	33
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	54	53
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	56	56
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	54	53
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	12	25
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	7,75	7,75
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	83	83
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	19,32	20,65
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	67	71



NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	10,11	9,81
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	NA	NA
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes			

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, yang jelaskan sebagai berikut:

#### <> Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng terus mengalami penurunan dan bahkan tergolong rendah pada tahun 2016 LPP yaitu 0,08% bahkan di tahun 2017 menurun lagi menjadi 0,07% , tinggal bagaimana mempertahankan LPP ini ke depan.

**Tabel 2. 126**

Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	-	9019
2	jumlah keluarga	-	70205
	% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	-	12,85%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

#### <> Total Fertility Rate

TFR untuk dua tahun terakhir masih stagnan yaitu diangka 2,3 artinya rata-rata satu keluarga memiliki 2-3 orang anak, dan sebenarnya ini sudah dibawah TFR provinsi yang 2,4 namun belum mencapai TFR yang menjadi target nasional yaitu:

**Tabel 2. 127**

Total Fertility Rate Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	TFR Kab. Soppeng	2,3	2,3

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng



**<> Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB**

Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB semakin meningkat artinya adanya kepedulian stakeholder OPD dalam pengendalian penduduk dan KB

**Tabel 2. 128**

**Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	7	14
2	Jumlah semua perangkat daerah	36	38
	<b>Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB</b>	<b>19,44%</b>	<b>36,84%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

**<> Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk**

**Tabel 2. 129**

**Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	0	0
2	Jumlah semua perangkat daerah	36	38
	<b>Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

Untuk sekarang ini Rancangan Induk Pengendalian Penduduk belum di publikasikan ke perangkat daerah, hanya digunakan dalam lingkup OPD KB saja, untuk rencana ke depan akan di lakukan sosialisasi ke OPD lain yang menggunakan data penduduk untuk menggunakan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.



**<> Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pengendalian kuantitas dan kualitas Penduduk**

Sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disusun terkait pengendalian penduduk dan KB untuk itu kedepan harus bisa menyusun suatu peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pelaksanaan kegiatan program KKBPK.

**<> Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan**

Data profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) belum diperkenalkan ke OPD lain dan akan menjadi PR bagi OPD KB Kab. Soppeng supaya dapat menyusun Parameter dan Proyeksi Penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang untuk OPD lain

**<> Jumlah kerjasama penyelenggara pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan**

Belum ada kerjasama dengan penyelenggara pendidikan lain tentang pendidikan kependudukan, baik pendidikan formal, non formal maupun informal, sehingga perlu diprogramkan untuk membuat kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk materi pendidikan kependudukan.

**<> Rata-rata jumlah anak perkeluarga**

*Tabel 2. 130*

*Rata-rata jumlah anak perkeluarga Tahun 2016-2017*

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anak	-	85031
2	Jumlah keluarga	-	70205
	<b>Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga</b>	-	<b>121,12%</b>

*Sumber : DPPKB Kab.Soppeng*



#### <> Ratio akseptor KB

Ratio Akseptor KB selama dua tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 rasionya 77,94% artinya diantara 100 PUS 77 orang ber KB dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 75 yang artinya diantara 100 PUS hanya 75 orang yang ikut program KB untuk itu perlu peningkatan Adokasi dan menjaga kelangsungan peserta KB untuk menghindari DO.

**Tabel 2. 131**  
Ratio Akseptor KB Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Akseptor KB	29525	27583
2	Jumlah pasangan usia subur	37882	36774
	<b>Ratio Akseptor KB</b>	<b>77,94%</b>	<b>75,01%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

#### <> Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

**Tabel 2. 132**  
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah peserta KB aktif	29525	27583
2	Jumlah pasangan usia subur	37882	36774
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	77,94%	75,01%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

Angka CPR untuk wanita usia 15-49 tahun juga mengalami penurunan dari tahun 2016-2017 sebesar 2,93% artinya dalam 1 Tahun ada 2,93% wanita yang pernah Ber KB lalu tidak ber KB lagi, bisa karena monopause bisa juga karena ingin anak atau memang DO tanpa alasan yang jelas.



**<> Angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)**

Ada penurunan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun sebesar 0,13%, artinya semakin berkurang perempuan usia 15-19 tahun yang melahirkan dini ini dapat dicapai karena banyaknya advokasi dan sosialisasi pendewasaan usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan.

**Tabel 2. 133**  
**Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19	286	240
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19	36.855	36.833
	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,78%	0,65%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

**<> Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun**

Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun untuk saat ini datanya tidak tersedia, karena format pendataan keluarga yang mengalami perubahan, sehingga data ini tidak tersedia.

**Tabel 2. 134**  
**Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th		
2	Jumlah pasangan usia subur	37882	36774
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Th	0,00%	0,00%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng



<> **Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need)**

Terjadi peningkatan unmet need sebesar 1,93% selama 1 tahun yang artinya semakin banyak PUS yang ingin ber KB tapi tidak terlayani, ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat masalah manfaat alat KB dan pentingnya, ada juga yang tidak ber KB karena memang jauh dari sarana pelayanan KB, bahkan banyak yang menggunakan metode tradisional sehingga tidak tercatat sebagai peserta Keluarga Berencana.

**Tabel 2. 135**

**Tabel 2. 136**

**Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	5205	5763
2	Jumlah pasangan usia subur	37882	36774
	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,74%	15,67%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

<> **Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)**

Dari tahun 2016 ke 2017 ada penurunan peserta KB MKJP sebanyak 4,7% sebuah angka yang cukup tinggi, tapi hal ini bisa disebabkan karena sudah memasuki masa Monopause.

**Tabel 2. 137**

**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	5572	3908
2	Jumlah akseptor KB	29525	27583
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,87%	14,17%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng



#### <> Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Tingkat keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi mengalami peningkatan sebesar 4,93% artinya masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemakaian alat kontrasepsi sehingga menurunkan angka Drop Out penggunaan alat kontrasepsi

**Tabel 2. 138**  
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian  
Kontrasepsi Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	8357	9191
2	Jumlah akseptor KB	29525	27583
	<b>Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi</b>	<b>28,30%</b>	<b>33,32%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

#### <> Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Anggota kelompok BKB yang ber KB mengalami penurunan dari tahun 2016 - 2017 sebesar 0,61%, untuk itu perlu lebih diintensifkan sosialisasi penggunaan Alat Kontrasepsi kepada anggota BKB, karena yang diharapkan semua PUS anggota Poktan ber KB, kecuali yang ingin anak segera.

**Tabel 2. 139**  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	1352	1318
2	Jumlah anggota kelompok BKB	2502	2467
	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB</b>	<b>54,04%</b>	<b>53,43%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

#### <> Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Terjadi penurunan PUS anggota BKR yang ber KB sebesar 0,35% ini disebabkan karena ada yang Ingin anak segera ada juga yang DO



karena tidak cocok dengan Alkon yang dipakai, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam kepada para anggota Poktan.

**Tabel 2. 140**  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	1106	1070
2	Jumlah anggota kelompok BKR	1960	1908
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	56,43%	56,08%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

#### <> Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB

Anggota BKL yang ber KB juga sangat rendah dan terjadi juga penurunan dari tahun 2016-2017 sebesar 1,24 %, perlu dilakukan peninjauan ulang para anggota BKL ini, karena sebenarnya yang di BKL itu bukan lansianya yang merupakan anggota tapi keluarga dari lansia itu yang anggota BKL dan memang banyak juga anggota BKL yang sudah termasuk lansia.

**Tabel 2. 141**  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKR) ber-KB  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	584	556
2	Jumlah anggota kelompok BKL	1644	1622
	<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB</b>	<b>35,52%</b>	<b>34,28%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

#### <> Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan

Jumlah PPKS mengalami peningkatan dari tahun 2016 Cuma satu kecamatan yang ada PPKS-nya dan tahun 2017 sudah ada 2 kecamatan yang memiliki PPKS ke depan tentu diharapkan semua kecamatan memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)



**Tabel 2. 142**

Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap  
Kecamatan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PPKS	1	2
2	Jumlah kecamatan	8	8
	<b>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan</b>	<b>12,50%</b>	<b>25,00%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

**<> Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**

Jumlah remaja yang tergabung dalam PIK Remaja/Mahasiswa sudah sangat tinggi, tinggal ke depan dipertahankan saja dan kalau perlu kegiatan PIK ini bisa lebih diperbanyak utamanya terkait pencegahan dan pemberantasan Narkoba, HIV-AIDS dan pergaulan bebas.

**Tabel 2. 143**

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling  
Remaja/Mahasiswa Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PIK R/M	62	62
2	Jumlah kecamatan	8	8
	<b>Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa</b>	<b>775,00%</b>	<b>775,00%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

**<> Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk dan KB**

Semua PKB/PLKB yang ada di daerah diberdayakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan KB yang berjumlah 32 orang.



**Tabel 2. 144**

**Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	38	36
2	Jumlah PKB/PLKB	38	36
	<b>Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

<> **Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber-KB mandiri**

**Tabel 2. 145**

**Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	817	800
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	980	958
	<b>Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri</b>	<b>83,37%</b>	<b>83,51%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Tahun 2016-2017 Berdasarkan tabel tersebut, walaupun ada penurunan anggota UPPKS yang ber KB Mandiri namun itu tidak terlalu berpengaruh dan untuk tahun-tahun mendatang perlu dijaga supaya anggota UPPKS yang ber KB tetap menggunakan alat kontrasepsi dan perlu di perhatikan yang jangka pendek dialihkan ke jangka Panjang.



<> **Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan**

Semua desa dan kelurahan memiliki PPKBD, sehingga Program KKBPK dapat berjalan dengan baik yang merupakan langkah antisipasi karena mengingat jumlah PLKB yang sedikit sehingga dengan adanya PPKBD tugas PLKB akan lebih ringan, tinggal sarana dan prasarana PPKBD yang perlu dilengkapi

**Tabel 2. 146**  
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/kelurahan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	70	70
2	Jumlah desa/kelurahan	70	70
	<b>Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/kelurahan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

<> **Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat**

**Tabel 2. 147**  
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	1683	6417
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	6561	3008
	<b>Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat</b>	<b>25,65%</b>	<b>213,33%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

Untuk alokon yang ada sudah cukup tersedia artinya alat dan obat sudah ada di siapkan berikut juga alat distribusinya ke Faskes KB yang diperlukan sekarang tinggal bagaimana menjaga keberlangsungan ketersediaan ini supaya di faskes tidak terjadi kekosongan alokon sementara ada akseptor yang akan dilayani.



**<> Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan stnadarisasi pelayanan**

Semua faskes dan jejaringnya sudah ada kerjasama dengan BPJS dalam hal pelayanan kesehatan dan kontrasepsi dan semuanya sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan

**Tabel 2. 148**

**Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	32	32
2	Jumlah Faskes dan jejaring	32	32
	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	100,00%	100,00%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

**<> Persentase remaja terkena infeksi menular seksual (IMS)**

Sampai sekarang data remaja yang terinfeksi belum kami dapatkan karena sesuai hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan, merekaupun belum memiliki data tersebut.

**Tabel 2. 149**

**Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0
2	Jumlah remaja	69609	69793
	<b>Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng



### <> Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Poktan yang ada sudah cukup banyak yang melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga di kelompoknya masing-masing malah dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,52%, tentu diharapkan tahun-tahun mendatang semua Poktan sudah melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga

**Tabel 2. 150**  
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	325	342
2	Jumlah kelompok kegiatan	482	482
	<b>Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga</b>	<b>67,43%</b>	<b>70,95%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

### <> Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan

Semua desa dan kelurahan sudah memiliki data mikro terkait program KKBPK dan tinggal bagaimana data ini bisa diadakan updating data secara berkala supaya data tersebut tidak ada yang kadaluarsa.

**Tabel 2. 151**  
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	70	70
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	70	70
	<b>Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng



**<> Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**

Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan tumbuh kembang anak masih sangat rendah, padahal ini diharapkan semua keluarga yang punya anak dan balita sudah dapat melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak untuk itu kelompok BKB perlu diaktifkan dengan menggunakan KKA bagi semua anggota BKB.

**Tabel 2. 152**

**Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	980	945
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	9692	9635
	<b>Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</b>	<b>10,11%</b>	<b>9,81%</b>

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

**9. Perhubungan**

**Tabel 2. 153**

**Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar perhubungan**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1920	1344
2	Rasio ijin trayek	%	0,02	0,08
3	Jumlah uji kir angkutan umum		92	89
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		-	-
5	Persentase layanan angkutan darat	%	40	30
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,07	0,2
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	84	70
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,03	0,02



9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	%	1.328.040	504.000
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	%	1.328.040	504.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Soppeng

Berdasarkan Tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan Perhubungan yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

#### <> Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Pada tahun 2017 jumlah arus penumpang umum yang masuk/keluar daerah adalah 1.344 orang. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yang lalu sebanyak 1.920 orang, penurunan arus penumpang yang masuk/keluar daerah yang menggunakan angkutan umum salah satunya disebabkan karena peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, sehingga mobilitas masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi.

#### <> Rasio Ijin Trayek

Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat Kab. Soppeng perlu adanya trayek angkutan umum yang dapat menjangkau akses ke berbagai tempat. Selama 2 tahun terakhir jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Soppeng mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 200 ijin, turun dibanding kondisi tahun 2016 yang sebesar 527 . Berdasarkan dari nilai rasio setiap tahun selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 154**  
Rasio Ijin Trayek Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Ijin Trayek	527	200
2	Jumlah penduduk	249.768	241.430
3	Rasio Ijin Trayek(%)	0,02	0,08

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng, 2017



#### <> Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Angkutan Umum yang menguji kir di Kab. Soppeng selama periode 2016 s/d 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah uji KIR sebanyak 92 dan di tahun 2017 turun menjadi 89 kendaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng dalam menjamin kelayakan dan keamanan alat transportasi yang digunakan untuk layanan umum.

**Tabel 2. 155**  
Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	92	89

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng

#### <> Persentase Layanan Angkutan Darat.

Indikator layanan angkutan darat dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan transportasi umum darat. Hal ini dapat terlihat dari kapasitas penumpang yang dapat ditampung oleh angkutan darat atau jumlah penumpang yang dapat diangkut dalam satuan waktu tertentu.

**Tabel 2. 156**  
Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Angkutan Darat	527	200
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	1.32	504.
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	40	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng

#### <> Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu lalu lintas yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Angka ini dihitung dari jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia.



**Tabel 2. 157**

**Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu	84	70
2	Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	100	100
3	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	84	70
4	Persentase Layanan Angkutan Darat	40	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng

**<> Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan**

Panjang Jalan di Kab. Soppeng mengalami kenaikan dari tahun 20xx sampai dengan tahun 20xx. Bertambahnya panjang jalan akan meningkatkan daya tampung jalan terhadap penambahan kendaraan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mencegah kemacetan.

**Tabel 2. 158**

**Rasio Panjang Jalan Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	2016	2017
1	Panjang Jalan	1.035,97	898,881
2	Jumlah Kendaraan	36.210	39.736
	<b>Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng

**<> Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum**

Indikator menunjukkan berapa orang atau barang yang dapat terangkut angkutan umum, pada tahun 2016 jumlah orang/ barang yang terangkut dengan angkutan umum mencapai 1.328.040 dan pada tahun 2017 turun menjadi 504.000.

**<> Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun**

Indikator menunjukkan berapa orang atau barang yang melalui terminal dalam satu tahun, pada tahun 2016 jumlah orang/ barang yang terangkut dengan angkutan umum mencapai 1.328.040 dan pada tahun 2017 turun menjadi 504.000.



## 10. Komunikasi dan Informatika

**Tabel 2. 159**

Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan  
Dasar Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%		575
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%		66
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%		80
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA	80
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%		60

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

### <> Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

**Tabel 2. 160**

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah KIM	48	48
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	8	8
	<b>Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan</b>	<b>575</b>	<b>575%</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Persentase antara jumlah KIM dan jumlah Kecamatan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 mencapai 600%. Dari 8 kecamatan telah tercakup 48 Kelompok Informasi Masyarakat.



#### <> Cakupan Layanan Telekomunikasi.

Cakupan layanan Komunikasi adalah luas wilayah di Kabupaten Soppeng yang telah tercover layanan telekomunikasi baik berupa HP/Telepon, TV, Radio, HT dan lain sejenisnya yang dapat menghubungkan orang dengan orang lain melalui penerapan teknologi.

Dari 1500 km<sup>2</sup> luas wilayah kabupaten Soppeng, telah tercover 998,15 km<sup>2</sup> yang tercover layanan telekomunikasi atau 66%. Hal tersebut disebabkan sebagian wilayah Kabupaten Soppeng adalah wilayah pegunungan dan area persawahan dan perkebunan.

*Tabel 2. 161*

**Cakupan Layanan Komunikasi Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Luas Wilayah Yang Tercoverage		998.15
2	Luas Wilayah Keseluruhan		1500
	<b>Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>		<b>66%</b>

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika*

#### <> Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap HP/Telepon, jika rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki handphone, atau jika rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki telepon kabel. Handphone (HP) didefinisikan sebagai telepon portabel berlangganan ke layanan telepon umum seluler menggunakan teknologi seluler, yang menyediakan akses ke PSTN. Ini termasuk sistem seluler analog dan digital, serta IMT-2000 (3G). Sementara Jaringan telepon kabel didefinisikan sebagai saluran telepon yang menghubungkan peralatan terminal pelanggan (pesawat telepon) ke jaringan telepon umum (PSTN) dan memiliki port khusus pada telepon.

Pada tahun 2017, dari 226.305 Penduduk Kabupaten Soppeng telah tercover 181.044 atau sebesar 80% penduduk yang menggunakan HP/telepon. Besaran tersebut lebih besar dipengaruhi oleh penduduk yang



telah berada di usia diatas 50 tahun lebih menganggap menggunakan HP/Telepon sudah bukan prioritas utama kebutuhan.

**Tabel 2. 162**

**Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	-	181.044
2	Jumlah penduduk	-	226.305
	<b>Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon</b>	-	<b>80</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

#### <> Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap Internet, jika rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki koneksi internet. Penggunaan internet yang dimaksud merupakan penggunaan melalui jaringan tetap maupun jaringan bergerak, dalam hal ini termasuk penggunaan internet dengan menggunakan peralatan yang memungkinkan akses internet selain komputer seperti telepon selular, PDA/smart phone.

**Tabel 2. 163**

**Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	-	46.444
2	Jumlah rumah tangga	-	58.055
	<b>Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet</b>	-	<b>80</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2017, dari 58.055 rumah tangga di Kabupaten Soppeng terdata 46.444 rumah tangga yang telah menggunakan akses internet atau sebesar 80%. Besaran ini dipengaruhi oleh masih adanya rumah tangga yang belum terjangkau jaringan seluler pada beberapa wilayah pedesaan yang khususnya yang berada didaerah pegunungan.



### <> Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap komputer, jika rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki komputer. Yang dimaksud dengan komputer adalah personal computer (PC), laptop, dan tablet.

Pada Tahun 2017, dari 58.055 rumah tangga di Kabupaten Soppeng terdata 34.833 rumah tangga yang telah memiliki komputer pribadi atau sebesar 60%. Besaran ini dipengaruhi oleh masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan jaringan listrik khususnya pada daerah pegunungan. Selain faktor tersebut, sebagian besar rumah tangga tidak memiliki komputer pribadi tidak menganggap komputer pribadi sebagai prioritas dan masih menganggap komputer dan sejenisnya sebagai barang mewah.

**Tabel 2. 164**

**Proporsi rumah tangga yang memiliki Komputer Pribadi Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	34.833
2	Jumlah rumah tangga	-	58.055
	<b>Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi</b>	-	<b>60</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

### 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**Tabel 2. 165**

**Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase koperasi aktif	%	89,16	89,71
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	NA	NA
3	Persentase BPR/LKM aktif	%	NA	NA
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,9	98,91

Sumber : Dinas PPK dan UKM



#### <> Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 tercatat jumlah koperasi yang aktif adalah 181 atau 89,16 persen dari jumlah keseluruhan koperasi 203 koperasi, dan pada tahun 2017 jumlah koperasi yang aktif sebanyak 183 atau 89,71 persen jumlah koperasi secara keseluruhan yaitu 204 koperasi. Berikut data persentase koperasi aktif :

**Tabel 2. 166**  
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Koperasi Aktif	181	183
2	Jumlah Seluruh Koperasi	203	204
	Persentase Koperasi Aktif	89,16	89,71

Sumber : Dinas PPK dan UKM

#### <> Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Indikator ini menunjukkan jumlah usaha mikro dan kecil dari jumlah seluruh UKM yang ada di Kab. Soppeng.

Berdasarkan data dari Dinas PPK dan UKM pada tahun 2016 jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kab. Soppeng sebanyak 6.371 usaha atau 98,90 persen dari total seluruh UKM sebanyak 6.442 UKM dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 6.471 usaha atau 98,91 persen dari total jumlah UKM sebanyak 6.542 usaha. Antara tahun 2016-2017 tercatat + 71 UKM baru.



**Tabel 2. 167**

**Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	6.371	6.471
2	Jumlah seluruh UKM	6.442	6.542
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,90	98,91

Sumber : Dinas PPK dan UKM kab. Soppeng

## 12. Penanaman Modal

**Tabel 2. 168**

**Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		3	11
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta Rp)		2.108	22.086,5
3	Rasio daya serap tenaga kerja			
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-33,7	947,7

Sumber : Dinas PMPTSP kab. Soppeng

### <> Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kab. Soppeng lebih banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor; perdagangan besar dan eceran dan sektor jasa; dan lain sebagainya. Pada tahun 2016 jumlah investor berskala nasional sebanyak 11 investor meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya sebanyak 3 investor.



**Tabel 2. 169**

**Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	3	11

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Soppeng

**<> Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**

Sejalan dengan peningkatan jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kab. Soppeng, maka perkembangan nilai investasi perusahaan PMDN juga cenderung meningkat signifikan. Pada tahun 2016 nilai investasi perusahaan PMDN di Kab. Soppeng mencapai Rp 2.108.038.000,- kemudian meningkat menjadi Rp 22.086.500.000 di tahun 2017. Besarnya peningkatan nilai investasi tersebut diharapkan lebih menggerakkan roda perekonomian di Kab. Soppeng.

**Tabel 2. 170**

**Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2.108.038.000	22,086,500,000

Sumber : Dinas PMPTSP kab. Soppeng

**<> Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)**

Secara umum, nilai realisasi PMDN di Kab. Soppeng kurun waktu 2016-2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, walaupun kondisi 2015ke 2016 pertumbuhannya minus. Kenaikan nilai realisasi ini terjadi seiring dengan penambahan jumlah investor PMDN. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu kenaikan/penurunan realisasi PMDN ditahun 2016 -33,77 persen dan kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2017 dimana realisasi PMDN melonjak drastis dengan persentase kenaikan yang mencapai 947,73 persen.



**Tabel 2. 171**

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)  
Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi - Realisasi PMDN Tahun Sebelm Evaluasi	1.074.962.000	19,978,462,000
2	Realisasi PMDN Sebelum Evaluasi Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN ( milyar Rupiah)	-33,77	947,73

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Soppeng

### 13. Kepemudaan dan Olah Raga

**Tabel 2. 172**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non  
Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50	50
2	Persentase wirausaha muda	%		
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	66,67	66,67
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	42,05	44,72
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	2	3
7	Jumlah prestasi olahraga		7	14

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga kab. Soppeng

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan umum, layanan wajib non pelayanan dasar Kepemudaan dan olahraga, yang diukur dari berbagai indikator kinerja sebagai berikut :

#### <> Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak organisasi pemuda yang aktif untuk memwadahi pemuda dalam menggali potensi diri dan peran aktif dalam upaya mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat, Organisasi pemuda adalah diharapkan menjadi satu satu solusi untuk menghindarkan pemuda dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna dengan memberdayakan pemuda yang bertujuan



meningkatkan kedewasaan, harga diri, serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Berdasarkan data pada tahun 2016 dan 2017, jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kab. Soppeng sebanyak 15 organisasi atau 50 persen dari jumlah organisasi pemuda sebanyak 30 organisasi

**Tabel 2. 173**

**Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	15	15
2	Jumlah seluruh Organisasi Pemuda	30	30
3	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	50	50

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

#### <> Cakupan pembinaan olahraga

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui cakupan pembinaan olahraga yang dihitung dari jumlah cabang olahraga yang dibina dari jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar. Berdasarkan data pada tahun 2016 dan 2017, cakupan pembinaan olahraga mencapai 100 persen.

**Tabel 2. 174**

**Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	19	22
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	19	22
3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

#### <> Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui cakupan pelatih yang bersertifikat yang dihitung dari jumlah pelatih yang bersertifikat dari jumlah seluruh pelatih. Berdasarkan data pada tahun 2016 dan 2017, cakupan pelatih bersertifikat adalah 66,67 persen.



**Tabel 2. 175**

**Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pelatih bersertifikat	16	18
2	Jumlah seluruh pelatih	24	27
3	Cakupan pembinaan olahraga	66,67	66,67

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

**<> Cakupan Pembinaan Atlet Muda**

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui cakupan pembinaan atlet muda yang dihitung dari jumlah atlet pelajar yang dibina dari jumlah seluruh atlet pelajar. Berdasarkan data pada tahun 2016 cakupan pembinaan atlet muda di Kab. Soppeng adalah 42,05 persen dihitung dari jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 127 orang dari 302 orang jumlah seluruh atlet dan pada tahun 2017 cakupan pembinaan atlet muda adalah 44,72 persen dihitung dari jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 182 atlet dari seluruh jumlah atlet pelajar sebanyak 407 atlet pelajar.

**Tabel 2. 176**

**Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Atlet Pelajar yang di Bina	127	182
2	Jumlah seluruh atlet Pelajar	302	404
3	<b>Cakupan Pembinaan Atlet Muda</b>	<b>42,05</b>	<b>44,72</b>

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

**<> Jumlah Atlet Berprestasi**

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah atlet yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun Internasional dalam satu tahun. Karena salah satu aset yang dimiliki daerah adalah atlet-atlet yang berprestasi, maka untuk kepentingan pembinaan dan sekaligus evaluasi pembinaan atlet pemerintah daerah berkewajiban untuk mendata seluruh atlet yang berprestasi yang dimiliki Kab.Soppeng dalam satu tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016



jumlah atlet yang berprestasi di Kab. Soppeng adalah 2 orang dan menjadi pada tahun 2017 menjadi 3 orang.

#### <> Jumlah Prestasi Olahraga

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun. Berdasarkan data pada tahun 2016 jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun adalah sebanyak 7 orang dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 14 prestasi.

**Tabel 2. 177**

**Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Atlet Pelajar yang di Bina	127	182
2	Jumlah seluruh atlet Pelajar	302	404
	<b>Cakupan Pembinaan Atlet Muda</b>	<b>42,05</b>	<b>44,72</b>

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga*

#### 14. Statistik

**Tabel 2. 178**

**Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada		
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika*

#### <> Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Sistem data statistik yang terintegrasi adalah hasil pengolahan sumber data statistik yang terpusat dan terpadu dalam satu sistem yang sama sehingga dapat dengan mudah diakses dan diuji tingkat keakuratannya. Sumber data statistik Kabupaten Soppeng bersumber dari sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng serta data primer dan sekunder dari Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.



Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Statistik dan Persandian sebagai pelaksana dalam mengintegrasikan data statistik hingga Tahun 2017 belum memiliki sistem terpadu dalam mengakomodir kebutuhan data dan statistik. Akan tetapi pada tahun 2018 Diskominfo berupaya memperbaiki diri dengan menerbitkan aplikasi e-data dalam menghimpun data dan statistik dari berbagai Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

**<> Buku "kabupaten dalam angka"**

Buku Kabupaten Soppeng Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang menyediakan data statistik yang lengkap, menyeluruh dan terintegrasi mengenai karakteristik dan keadaan sosial ekonomi Kabupaten Soppeng. Data yang dimuat bersumber dari BPS Kabupaten Soppeng dan perangkat daerah/instansi terkait. Pada Tahun 2017, Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng telah merilis Buku Soppeng dalam Angka pada Bulan Agustus Tahun 2017.

**<> Buku "PDRB"**

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan buku yang memuat salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Buku PDRB pada dasarnya memuat jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Badan Pusat Statistik Kab. Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng tidak menerbitkan Buku PDRB Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017. Akan tetapi pada Buku Soppeng Dalam Angka Tahun 2017 telah memuat BAB tersendiri yang memuat Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2017.



## 15. Persandian

**Tabel 2. 179**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non  
Pelayanan Dasar Persandian

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	NA	13

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk perlindungan dan jaminan keamanan informasi sudah menjadi kewajiban dan tuntutan di setiap instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, untuk menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin penting dalam peningkatan kualitas layanan terhadap pengamanan informasi, hal ini juga merupakan salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah adalah 5 (lima) perangkat daerah dari 38 perangkat daerah atau 13 persen.

## 16. Kebudayaan

**Tabel 2. 180**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non  
Pelayanan Dasar Kebudayaan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	11	9
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	97
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		NA	NA
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		2	2

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan umum pada urusan kebudayaan yang diukur dari indikator sebagai berikut :



#### **<> Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Merupakan wujud pelestarian dari budaya dan adat yang dimiliki. Penyelenggaraan festival seni dan budaya salahnya dalam bentuk kegiatan Pattaungeng pada tahun 2016 penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 11 kali, sedangkan pada tahun 2017 festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 9 kali.

#### **<> Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**

Jumlah Benda situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dari total benda situs dan kawasan yang dimiliki daerah. Pada tahun 2016 terdapat 29 jumlah Benda situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah dan kesemuanya dilestarikan. Dan pada tahun 2017 jumlah Benda situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah menjadi 30 buah dan yang dilestarikan tetap 29 buah. Hal ini terkait dengan belum adanya keputusan dari pusat tentang penambahan jumlah situs yang terdaftar di Kabupaten Soppeng.

#### **<> Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu**

Paradigma pengelolaan Cagar Budaya dewasa ini, diarahkan pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap upaya pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan Cagar Budaya yaitu kebermanfaatannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa setiap upaya pengelolaan Cagar Budaya harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena merekalah pemilik syah Cagar Budaya. Dengan demikian, jika pengelolaan Cagar Budaya tidak memberikan manfaat pada masyarakat maka pengelolaan yang dilakukan dianggap tidak berhasil. Bagaimana membuat suatu bentuk pengelolaan Cagar Budaya yang bukan hanya berdampak pada lestariannya Cagar Budaya tetapi juga memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Pada tahun 2017 di Kab. Soppeng terdapat 2 (dua) cagar budaya yang dikelola secara terpadu yaitu Cagar Budaya Calio dan Villa Yuliana.



## 17. Perpustakaan

**Tabel 2. 181**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non  
Pelayanan Dasar Perpustakaan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	3,30	3,37
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	28,19	28,89
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,14	0,15
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	8.342	8.148
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buku	11967	12711
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Berdasarkan Tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan Perpustakaan yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

### <> Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Indikator ini menunjukkan berapa banyak pengunjung perpustakaan yang datang di Pustakaaan yang telah disediakan Pemerintah Daerah dalam setahun, mengingat bahwa Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Berdasarkan data pada tahun 2016 jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun adalah 8.342 atau 3,30 persen dari jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 252.677 orang. Dan pada tahun 2017 adalah 8.148 orang atau 3,37 persen dari jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 241.430 orang.



**Tabel 2. 182**

**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	8.342	8.148
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	252.677	241.430
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	3,30	3,37

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

**<> Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah**

Indikator menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberi akses yang cukup bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bacaan. Mengingat bahwa koleksi buku merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan orang untuk datang berkunjung ke perpustakaan, jika jumlah koleksi buku yang tersedia, cukup dan dalam jumlah yang banyak maka pengunjung akan dapat memilih berbagai alternatif mendapatkan informasi dan bahan pustaka yang diperlukan. Pada tahun 2016 jumlah koleksi judul buku yang tersedia di pustakaan daerah adalah 11,967 judul buku atau 28,19 persen dari total jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Pustakaan daerah sebanyak 42.452, dan pada tahun 2017 jumlah koleksi judul buku yang tersedia di pustakaan daerah meningkat menjadi 12.711 judul buku atau 28,89 persen dari total jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Pustakaan daerah sebanyak 44.001 judul buku.

**Tabel 2. 183**

**Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah  
Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	11.967	12.711
2	Jumlah koleksi jumlahl buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	42.452	44.001
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	28,19	28,89

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



#### <> Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk yang ada di Kab. Soppeng. Pada tahun 2016 ratio perpustakaan per-1000 penduduk adalah 1,44 atau terdapat 1 perpustakaan per-1000 penduduk dan pada tahun 2017 ratio perpustakaan persatuan penduduk meningkat menjadi 1,51 atau setiap terdapat 1-2 perpustakaan per 1000 penduduk hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang dilayani berkurang dan juga terdapat penambahan jumlah perpustakaan sebanyak 1 buah.

**Tabel 2. 184**

Rasio perpustakaan persatuan penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah perpustakaan	364	365
2	Jumlah penduduk	252.677	241.430
	<b>Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk</b>	<b>1,44</b>	<b>1,51</b>

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

#### <> Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun

Indikator ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk datang berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan yang telah disediakan. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan adalah 8.342 pengunjung dan pada tahun 2017 menurun menjadi 8.148 pengunjung.

**Tabel 2. 185**

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	8.342	8.148

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

#### <> Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Indikator menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan, karena semakin banyak koleksi judul buku, maka



akan semakin banyak alternatif pilihan bagi pengunjung yang datang ke perpustakaan, jika jumlah koleksi judul buku yang tersedia cukup dan dalam jumlah yang banyak maka pengunjung akan dapat memilih berbagai alternatif mendapatkan informasi dan bahan pustaka yang diperlukan. Pada tahun 2016 jumlah koleksi judul buku yang tersedia dipustakaan daerah adalah 11,967 judul buku dan tahun 2017 jumlah koleksi judul buku yang tersedia dipustakaan daerah meningkat menjadi 12.711 judul buku.

**Tabel 2. 186**  
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	11.967	12.711

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

#### <> Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan, selain ketersediaan buku, maka yang telah pentingnya dukungan Sumber Daya Manusia yang cukup dan berkualitas.

**Tabel 2. 187**  
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	19	33
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	19	33
	<b>Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Indikator ini menunjukkan berapa banyak jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat di Kab. Soppeng. Pada tahun 2016 jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat adalah 19 orang dan semuanya telah bersertifikat dan pada tahun 2017 jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat meningkat menjadi 33 orang dan seluruhnya juga sudah bersertifikat.



## 18. Kearsipan

**Tabel 2. 188**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non  
Pelayanan Dasar Kearsipan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	10,81	24,32
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	0	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel tersebut menunjukkan capaian kinerja pelayanan urusan Kearsipan yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

### <> Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Pada dasarnya arsip yang ada di setiap Perangkat Daerah memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dapat dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap Perangkat Daerah. Namun demikian kenyataan yang ada menunjukkan masih sebagian kecil perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2. 189**

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	4	9
2	Jumlah Perangkat Daerah	37	37
3	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku</b>	<b>10,81</b>	<b>24,32</b>

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

### <> Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Terkait dengan pengelolaan arsip, tidak terlepas dari SDM pengelola kearsipan. maka untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga telah menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM bagi pengelola kearsipan. Di tahun 2017 terdapat satu Kegiatan peningkatan kemampuan SDM kearsipan ini.



**Tabel 2. 190**

**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Kinerja layanan urusan pilihan, diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pilihan terdiri dari :

#### 1. Pariwisata

**Tabel 2. 191**

**Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan  
Pariwisata Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Kunjungan wisata	%	1,13	1,11
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	2	2
3	PAD sektor pariwisata	%	16,4	0,012

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan pariwisata, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### <> Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, untuk itu, Pemerintah Kab.Soppeng melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng, Kunjungan Wisata dihitung dari jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kab.Soppeng dibagi dengan jumlah kunjungan wisata yang direncanakan, Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan di Kab.Soppeng adalah 218.387 orang atau 113 persen dari target sebanyak 192.776 orang. Sementara pada tahun 2017, jumlah kunjungan mencapai 224.018 atau 111 persen dari target sebanyak 201.300.



#### <> Lama Kunjungan Wisata

Lama Kunjungan Wisata, menunjukkan berapa hari rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng, karena semakin lama waktu tinggal wisatawan diharapkan dapat lebih banyak kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Selama kurun waktu 2016-2017 rata-rata lama hari tinggal Wisatawan di Kab.Soppeng adalah 2 Hari.

#### <> PAD Sektor Pariwisata

Untuk memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi, Pada tahun 2016 PAD Sektor Pariwisata adalah Rp 1.494.001.000 atau 12 persen dari Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 91.123.526.502.,<sup>24</sup> dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1.507.654.000,- atau 12 persen dari total PAD sebesar Rp 125.892.548.021,- Peningkatan kontribusi PAD Sektor Pariwisata dari Total PAD tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui pengembangan dan optimalisasi objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng.

## 2. Pertanian

*Tabel 2. 192*

**Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan Pertanian**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	32,00%	31,27%
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan	%	16,44	11,18
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan	%	27,97	28,24
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100,00	100,00
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,53	5,82
6	Cakupan bina kelompok petani	%		

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng



Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja pelayanan urusan pilihan pertanian, dengan berbagai Indikator Kinerja yang dijelaskan sebagai berikut :

#### <> Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Soppeng, terutama ketersediaan lahan pertanian berupa lahan sawah maupun lahan kering yang cukup besar menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah utama dalam pengembangan sektor pertanian di Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (Petani) yang sudah terbiasa dalam melakukan proses budidaya pertanian atau bercocok tanam. Khusus untuk Komoditi Padi, Kedelai dan Kakao, Kabupaten Soppeng masuk dalam lokasi pengembangan kawasan prioritas Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.

**Tabel 2. 193**  
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB  
Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
2	Jumlah PDRB (Juta Rupiah)	6.828.423,24	7.935.787,23
	<b>Kontribusi PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap Total PDRB (%)</b>	<b>32,00%</b>	<b>31,27%</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam struktur PDRB Kab. Soppeng. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kab. Soppeng mencapai 27,53%, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 27,74%. Kontribusi tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Tingginya kontribusi tersebut terutama didukung oleh Sub Sektor Tanaman



Pangan dan Sub Sektor Perkebunan, sebagai sub sektor terbesar dalam sektor pertanian yang ada di Kab. Soppeng. Berikut gambaran kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kab. Soppeng tahun 2016-2017 (PDRB atas dasar harga berlaku).

<> **Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan**

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 194**  
sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan  
Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija) (Juta Rupiah)	359.149,60	277.531,85
2	Jumlah PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
	<b>Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap Total PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)</b>	<b>16,44%</b>	<b>11,18%</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tergambar bahwa kontribusi Sektor Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2016 sebesar 16,44% dan mengalami penurunan menjadi 11,18% pada tahun 2017. Penurunan kontribusi tersebut disebabkan oleh menurunnya produksi palawija utama berupa Jagung dan



Kedelai pada tahun 2017 akibat kurangnya pertanaman karena petani beralih ke komoditi utama yaitu padi. Sementara lahan untuk tanaman padi sebagian besar sama dengan lahan palawija terutama kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

<> **Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan**

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kab. Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2017 :

**Tabel 2. 195**  
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (Tanaman Keras) (Juta Rupiah)	611.046,10	700.881,50
2	Jumlah PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
	<b>Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>27,97%</b>	<b>28,24%</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

Dari tabel tersebut diatas, tergambar bahwa tahun 2016 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian sebesar 27,97% dan mengalami peningkatan menjadi 28,24% pada tahun 2017. Adanya peningkatan lebih pada faktor harga jual produk hasil perkebunan (tanaman keras) yang cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya, karena dari sisi produksi, sebagian besar tanaman keras mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut



merupakan komoditi ekspor yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

#### <> Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2016-2017.

**Tabel 2. 196**  
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB  
Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton)	280.905,00	309.816,0
2	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)	280.905,00	309.816,0
	<b>Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap Total Produksi di Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

#### <> Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Sektor pertanian dalam peran utamanya sebagai produsen bahan pangan, harus terus berupaya dalam peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Salah satu upaya dalam meningkatkan produksi hasil pertanian, yaitu dengan intensifikasi usaha tani sehingga produktivitas bisa meningkat. Sebagai gambaran, tingkat produktivitas Padi sebagai pangan utama di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2017.



**Tabel 2. 197**

**Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar  
Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	280.905,00	309.816,00
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	50.822,50	53.223,80
	<b>Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar</b>	<b>5,527</b>	<b>5,821</b>

*Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng*

Berdasarkan data produktivitas tersebut diatas, ada peningkatan dari 5,527 Ton/Hektar pada tahun 2016 menjadi 5,821 Ton/Hektar pada tahun 2017. Tingkat produktivitas sangat dipengaruhi oleh teknologi budidaya yang dilakukan petani, mulai dari proses pengolahan lahan, penggunaan bahan tanam atau bibit unggul, pemupukan yang tepat dan pemeliharaan tanaman. Selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan air, serangan hama atau OPT serta faktor cuaca. Meskipun ada peningkatan sebagaimana data tersebut diatas, akan tetapi capaian produktivitas tersebut belum optimal dibandingkan potensi produktivitas yang bisa dicapai pada tanaman padi.

#### **<> Cakupan bina kelompok petani**

Pelayanan Urusan Pertanian tidak terlepas dari pembinaan kelompok tani, wadah kelompok tani menjadi sasaran utama pembangunan pertanian. Cakupan bina kelompok tani menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa Sarana dan Prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Pertanian Kab. Soppeng melalui penyuluh pertanian.

Pada Tahun 2016 Jumlah Kelompok Tani yang bergerak pada Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebanyak 1.200 Kelompok, masing-masing sub sektor terpisah dalam



registrasi kelompok tani. Dan yang terbina sebanyak 1.181 atau 98,42%. Sedangkan pada tahun 2017, adanya kebijakan untuk melakukan pendataan atau registrasi ulang tanpa memilah masing-masing sub sektor, jumlah kelompok berkurang menjadi 953 Kelompok, dan yang terbina sebanyak 920 atau 96,54%. Adanya penurunan capaian cakupan bina kelompok petani ini diakibatkan berkurangnya jumlah tenaga penyuluh, baik yang beralih status kepegawaian maupun purna bakti, sehingga penyuluh yang ada memiliki keterbatasan dalam melakukan pelatihan, kunjungan dan fasilitasi ke kelompok-kelompok petani yang ada di seluruh wilayah Kab. Soppeng.

**Tabel 2. 198**  
Cakupan bina kelompok petani Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kelompok Petani yang mendapatkan bantuan pemda	1181	920
2	Jumlah Kelompok Tani	1200	953
	<b>Cakupan Bina Kelompok Petani</b>	<b>98,42%</b>	<b>96,54%</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

### 3. Kehutanan

**Tabel 2. 199**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan  
Urusan Pilihan Kehutanan (bukan kewenangan kab)

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			
2	Kerusakan Kawasan Hutan			
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan			



#### 4. Energi dan Sumber Daya Mineral

**Tabel 2. 200**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan  
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik		45,96	49,94
2	Rasio ketersediaan daya listrik		NA	NA
3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	%	NA	NA

Sumber Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Soppeng

#### 5. Perdagangan

**Tabel 2. 201**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan  
Perdagangan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Nilai omzet perdagangan	Rp	872,724,009,493	903,278,757,608
2	Ekspor Bersih Perdagangan			
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ usaha informal			

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan perdagangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

##### <> Nilai Omzet Perdagangan

Nilai Omzet perdagangan di Kabupaten Soppeng tahun 2017 mencapai Rp 903.278.757.608 meningkat dibanding nilai omzet perdagangan pada tahun 2016 yang mencapai Rp 872.724.009.493,- peningkatan tersebut menunjukkan jika peran pemerintah dalam upaya menggerakkan sektor perdagangan di Kabupaten Soppeng.



## 6. Perindustrian

**Tabel 2. 202**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan  
Perindustrian

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Cakupan bina kelompok pengrajin		NA	NA
2	Pertumbuhan Industri	%	0,33	0,33

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan perindustrian, yang dijelaskan sebagai berikut :

### <> Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri menunjukkan peningkatan capaian dari tahun sebelumnya (Jumlah Industri tahun n- Jumlah Industri tahun n-1) dibagi Jumlah Industri s.d tahun 2015 X 100 %. Pada tahun 2016-2017 pertumbuhan industri hanya 0,33, pertumbuhan tersebut belum memperlihatkan capaian yang maksimal hal ini disebabkan kurangnya jumlah industri skala kecil yang mampu berkembang menjadi industri pada skala lebih tinggi.

**Tabel 2. 203**  
Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Industri tahun n	3.689	3.701
2	Jumlah Industri tahun n-1	3.678	3.689
3	Pertumbuhan Industri	0,33	0,33

Sumber : Dinas PPK dan UKM

## 7. Transmigrasi

**Tabel 2. 204**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan  
Transmigrasi

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase transmigran swakarsa	%	25,26	17,88

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan transmigrasi, yang dijelaskan sebagai berikut :



### <> Persentase transmigran swakarsa

Transmigrasi Swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya. Pada tahun 2017 jumlah transmigrasi swakarsa di Kabupaten Soppeng adalah 239 transmigran atau 17,88 persen dari jumlah transmigran secara keseluruhan yaitu 1.337 transmigran, turun dibanding tahun 2016 yaitu 297 transmigran atau 25,26 persen dari 1.176 transmigran.

**Tabel 2. 205**

**Persentase Transmigran Swakarsa Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah transmigran swakarsa	297	239
2	Jumlah transmigran	1.176	1.337
3	Persentase transmigran swakarsa	25,26	17,88

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

### 8. Perikanan

**Tabel 2. 206**

**Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perikanan**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Produksi perikanan	%	173,66	179,37
2	Konsumsi ikan	%	106	106
3	Cakupan bina kelompok nelayan		0	0
4	Produksi perikanan kelompok nelayan		93,6	94,1
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		NA	NA
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		0,14	0,14
7	Nilai tukar nelayan		104,23	104,28

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan perikanan, yang dijelaskan sebagai berikut :



#### <> Produksi perikanan

Produksi perikanan di Kab. Soppeng berasal perikanan darat, baik yang bersumber dari danau maupun yang dibudidayakan. Produksi perikanan cukup beraneka ragam antara lain nila, lele, ikan mas, Ikan gabus dan berbagai ikan khas danau lainnya. Dalam kurun waktu 2016-2017 diketahui bahwa tingkat realisasi produksi yang ada menunjukkan kenaikan, walaupun dalam skala kecil. Pada tahun 2016, jumlah produksi ikan (ton) mencapai 4.688,89 ton atau 173,66 persen jauh tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.700 ton. Demikian halnya di tahun 2017 realisasi jumlah produksi ikan mencapai 5.381,21 ton atau 179,37 persen dari target 3.000 ton.

*Tabel 2. 207*  
Produksi perikanan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	4.688,89	5.381,21
2	Target Daerah (Ton)	2.700,00	3.000,00
	<b>Produksi Perikanan</b>	<b>173,66</b>	<b>179,37</b>

#### <> Konsumsi ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kab. Soppeng tidak memiliki wilayah perairan laut sehingga ikan yang ada adalah berasal dari Wilayah di Luar Kab. Soppeng dan juga merupakan hasil danau dan budidaya.

*Tabel 2. 208*  
Konsumsi ikan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	7.578.270	7.605.340
2	Target Daerah (Kg)	7.150.000	7.200.000
	<b>Konsumsi Ikan (%)</b>	<b>106</b>	<b>106</b>



Konsumsi ikan di Kab. Soppeng pada tahun 2016 adalah 7.578.270 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.605.340kg. Secara umum realisasi tingkat konsumsi ikan di Kab. Soppeng telah melebihi target . Pada tahun 2016 dan 2017 , tingkat realisasi konsumsi ikan adalah sebesar 106 persen.

<> **Produksi perikanan kelompok nelayan**

*Tabel 2. 209*

Produksi perikanan kelompok nelayan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	4.390,90	5.063,20
2	Jumlah produksi ikan di daerah	4.688,89	5.381,21
	<b>Produksi Perikanan Kelompok Nelayan</b>	<b>93,6</b>	<b>94,1</b>

Produksi perikanan di Kab. Soppeng salah satunya berasal dari Kelompok Nelayan, berdasarkan data Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan pada tahun 2106 jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan adalah 4.390,90 Ton atau 93,6 persen dari total jumlah produksi ikan daerah sebanyak 4.688,89 ton. Dan pada tahun 2017 jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan adalah 5.063,20 Ton atau 94,1 persen dari total jumlah produksi ikan daerah sebanyak 5.381,21 ton.

<> **Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial**

Kabupaten Soppeng memiliki total luas perairan teritorial yaitu 3.000 Ha, dan sebanyak 413 Ha diantaranya adalah Kawasan Lindung Perairan atau dengan ratio 0,14.

*Tabel 2. 210*

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Kawasan lindung perairan	413	413
2	Total luas perairan teritorial	3000	3000
	<b>Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>



### <> Nilai tukar nelayan

Nilai Tukar Nelayan adalah rasio antara indeks harga yang diterima Nelayan dengan indeks harga yang dibayar Nelayan yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar nelayan merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan nelayan. Nilai tukar Nelayan di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2017 pada tabel berikut :

**Tabel 2. 211**  
Tukar Nelayan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Indeks yang diterima nelayan	107,7	95,9
2	Indeks yang dibayar nelayan	112,26	100
	<b>Nilai Tukar Nelayan</b>	<b>95,94</b>	<b>95,90</b>

### 2.3.3. Penunjang Urusan

Kinerja layanan penunjang urusan, diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan penunjang urusana pemerintahan daerah. Penunjang Urusan terdiri dari :

#### 1. Perencanaan Pembangunan

**Tabel 2. 212**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan  
Perencanaan Pembangunan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	53,69	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	53,69	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			



Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan perencanaan, yang dijelaskan sebagai berikut :

<> **Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan pembangunan jangka panjang memuat penjabaran Visi dan Misi ke dalam tujuan jangka panjang, penjabaran sasaran pembangunan daerah kedalam arah kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi sumberdaya daerah. Karena RPJPD adalah salah dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kab.Soppeng telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kab. Soppeng Nomor 9 Tahun 2010.

<> **Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan pembangunan jangka panjang memuat penjabaran Visi dan Misi ke dalam tujuan jangka panjang, penjabaran sasaran pembangunan daerah kedalam arah kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi sumberdaya daerah. Karena RPJPD adalah merupakan dokumen perencanaan strategis, Pemerintah Kab.Soppeng telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kab. Soppeng Nomor 9 Tahun 2010.

Penyusunan Dokumen RPJPD tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif, maka dokumen ini diharapkan benar-benar menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dibawahnya sehingga Visi yang dirumuskan dalam RPJPD 2005-2025 adalah **“Soppeng yang Maju, Adil dan Sejahtera Tahun 2025”** dapat tercapai.



**<> Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

Dengan mengacu pada Dokumen RPJPD selanjutnya diturunkan ke dalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD Kab. Soppeng periode tahun 2010-2015 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 3 Tahun 2011. Sedangkan RPJMD periode tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021. Sehingga dalam kurun waktu 2010 hingga 2016 terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah.

**<> Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**

Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng.

**<> Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen yang berisi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Soppeng ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Soppeng No.8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Soppeng Tahun 2012-2032.



## 2. Keuangan

**Tabel 2. 213**  
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang  
Urusan Keuangan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP
2	Persentase SILPA (Terhadap Pendapatan)		8,91	9,87
3	Persentase SILPA terhadap APBD (belanja)		9,03	10,09
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana			
5	Program	%	100	100
6	Kegiatan	%	8,32	8,72
7	Persentase belanja pendidikan (20%)		32,7	30,32
8	Persentase belanja kesehatan (10%)		14,2	17,18
9	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung			
10	Belanja Langsung	%	50,07	50,04
11	Belanja Tidak Langsung	%	49,93	49,96
12	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0,12	0,16
13	Penetapan APBD	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan keuangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

### <> Opini BPK

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kab. Soppeng telah mendapat perbaikan sejak tahun 2012 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 telah mendapat predikat opini WTP

### <> Persentase SILPA terhadap Pendapatan

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Soppeng persentase SILPA dari Total APBD (Pendapatan) pada tahun 2016 adalah 8,91 persen dan pada tahun 2017 persentase SILPA dari Total APBD Pendapatan adalah 9,87 persen, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya.



**Tabel 2. 214**

**Persentase SILPA terhadap Pendapatan Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Total SILPA	110.190.519.757,82	111.780.078.528,82
2	Total APBD Pendapatan	1.236.893.800.959,00	1.131.991.996.848,00
	<b>Persentase SILPA</b>	<b>8,91</b>	<b>9,87</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**<> Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja)**

Persentase SILPA terhadap belanja menunjukkan persentase dana yang penggunaannya tertunda atau tidak terserap. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Soppeng persentase SILPA dari Total APBD Belanja pada tahun 2016 adalah 9,03 persen dan pada tahun 2017 persentase SILPA dari Total APBD Belanja adalah 10,09 persen, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 2. 215**

**Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja) Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Total SILPA	110.190.519.757,82	111.780.078.528,82
2	Total APBD Belanja	1.219.596.457.298,00	1.108.346.705.360,00
	<b>Persentase SILPA Terhadap APBD</b>	<b>9,03</b>	<b>10,09</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**<> Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana**

Pada Tahun 2016 dan 2017 seluruh program yang telah ditetapkan dalam APBD Kab. Soppeng terlaksana 100 %, namun untuk kegiatan terdapat beberapa kegiatan yang telah ada APBD yang tidak terlaksana dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Pada tahun 2016 jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan sebanyak 48 kegiatan atau 8,32 persen dari 577 kegiatan. Untuk tahun 2017 jumlah kegiatan yang tidak terlaksana sebanyak 58 kegiatan atau 8,72 persen dari total kegiatan sebanyak 665 kegiatan.



**Tabel 2. 216**

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	0	0
2	Total Program dalam APBD	0	0
3	Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	48	58
4	Total Kegiatan dalam APBD	577	665
5	Persentase Program yang Tidak Terlaksana	0	0
6	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	8,32%	8,72%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**<> Persentase belanja pendidikan (20%)**

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal wajib dialokasikan sebesar 20% dari APBD. Dengan adanya Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat membangun sistem pendidikan yang lebih baik sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk membangun SDM yang handal.

**Tabel 2. 217**

Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	431.977.401.236,00	374.360.240.894,00
2	Total APBD	1.320.871.298.370,00	1.234.881.325.604,00
	<b>Persentase Belanja Pendidikan (20%)</b>	<b>32,70%</b>	<b>30,32%</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kab. Soppeng telah mengalokasikan anggaran pendidikan melebihi dari amanat peraturan tersebut yaitu pada tahun 2016 telah dialokasikan sebesar 32,7% dan pada tahun 2017 sebesar 30,32%.



#### <> Persentase belanja Kesehatan (10%)

Sesuai yang diatur dalam UU Kesehatan, pada dasarnya Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan minimal 10% dari belanja APBD untuk anggaran kesehatan. Pemerintah Kab. Soppeng telah mengalokasikan belanja kesehatan melebihi dari amanat peraturan tersebut, yaitu pada tahun 2016 belanja kesehatan sudah sebesar 14,2% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 17,18%.

**Tabel 2. 218**

**Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	187.555.785.699,00	212.145.677.240,00
2	Total APBD	1.320.871.298.370,00	1.234.881.325.604,00
	<b>Persentase Belanja Kesehatan (10%)</b>	<b>14,20%</b>	<b>17,18%</b>

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*

#### <> Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 dan 2017 pada tabel berikut :



**Tabel 2. 219**

**Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Belanja Langsung	661.311.870.356,00	617.974.795.821,00
2	Jumlah Belanja Tidak Langsung	659.559.428.014,00	616.906.529.783,00
3	Total APBD	1.320.871.298.370,00	1.234.881.325.604,00
	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	BL	50,07%
		BTL	49,93%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**<> Bagi hasil kabupaten/kota dan desa**

Alokasi belanja bagi hasil Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 adalah Rp 1.603.220.900,- atau 0,12 persen dari Total APBD dan pada tahun 2017 Bagi Hasil Kabupaten ke Desa meningkat menjadi Rp 1.916.133.440,0 atau 0,16 persen dari Total APBD sebesar Rp. 1.234.881.325.604,-

**Tabel 2. 220**

**Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Tahun 2016-2017**

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	1.603.220.900,00	1.916.133.440,00
2	Total APBD	1.320.871.298.370,00	1.234.881.325.604,00
	<b>Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa</b>	<b>0,12</b>	<b>0,16</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

**<> Penetapan APBD**

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah menyampaikan/mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD / Perubahan APBD untuk mendapat persetujuan DPRD. Pada Pemerintah Kab. Soppeng, penetapan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD telah dilaksanakan tepat waktu.



**Tabel 2. 221**

**Penetapan APBD Kab. Soppeng Tahun 2016-2017**

No	Indikator	2016	2017
1	Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

### 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

**Tabel 2. 222**

**Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan  
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	5,14	7,54
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,21	4,92
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	<b>61,97%</b>	<b>61,73%</b>
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		30	35
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		142	146
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		3334	3277

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, yang dijelaskan sebagai berikut :

#### <> Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai negeri sipil untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan latihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar diwaktu yang akan datang. Pemerintah Kab. Soppeng setiap tahun menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan



pelatihan bagi PNS Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng Berdasarkan data dari BPKSDM rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam tahun adalah 7,54 JP meningkat dibanding tahun 2016 yaitu 5,14 JP. Pendidikan dan pelatihan tersebut termasuk Diklat yang diikuti PNS diluar dari Diklat yang dilaksanakan BKPSDM Kab. Soppeng.

**Tabel 2. 223**

Rata-rata lama sekolah pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	5,14 JP	7,54 JP

Sumber : BKPSDMD Kab. Soppeng

#### <> Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, Salah satu bentuk Diklat tersebut adalah diklat formal atau Diklat fungsional dimana Diklat tersebut merupakan Diklat Wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tentu.

**Tabel 2. 224**

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	400	261
2	Jumlah total ASN	5548	5300
	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	7,21	4,92

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

Pada tahun 2016 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adala 400 ASN atau 7,21 persen dari total ASN sebanyak 5.548. Dan pada tahun 2017 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 261 ASN atau 4, 92 persen dari Total ASN sebanyak 5.300 ASN.



### <> Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan ini terdiri dari empat jenjang:

- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi Jabatan Struktural Eselon IV.
- Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi Jabatan Struktural Eselon III.
- Diklat Kepemimpinan Tingkat II bagi Jabatan Struktural Eselon II.

Berdasarkan data, sampai akhir tahun 2017 Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural adalah 479 atau 61,73 persen dari total jabatan sebanyak 776 pejabat., lebih rinci pada tabel berikut :

**Tabel 2. 225**  
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	479	479
2	Jumlah total jabatan	773	776
	<b>Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)</b>	<b>61,97%</b>	<b>61,73%</b>

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

### <> Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.



Pada tahun 2016 jumlah jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng adalah 30 dan pada tahun 2017 menjadi 35 jabatan.

**Tabel 2. 226**  
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	30	35

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

#### <> Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi. Pada tahun 2016 jumlah jabatan Administrasi Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng adalah 142 dan pada tahun 2017 menjadi 146 jabatan.

**Tabel 2. 227**  
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah  
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	142	146

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

#### <> Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam UU ASN merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pada tahun 2016 jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu di Kab. Soppeng adalah 3334 dan pada tahun 2017 menjadi 3277 pemangku jabatan.



**Tabel 2. 228**

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	3334	3277

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

**Tabel 2. 229**

Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100
3	PENERAPAN SIDA :			
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0	0
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	0

#### 5. Pengawasan

**Tabel 2. 230**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pengawasan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	87,68	27,49
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,63	0,19
3	Jumlah temuan BPK		18	8

Sumber : Inspektorat Kab. Soppeng

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan pengawasan, yang dijelaskan sebagai berikut :



#### <> Persentase Tindak Lanjut Temuan

Salah satu kunci keberhasilan kegiatan pengawasan adalah adanya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Hal tersebut memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan oleh pemeriksa telah dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan.

**Tabel 2. 231**

Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah temuan yang di tindaklanjuti	306	102
2	Jumlah Total Temuan	349	371
	<b>Persentase Tindaklanjuti Temuan</b>	<b>87,68</b>	<b>27,49</b>

Sumber : Inspektorat Kab. Soppeng

#### <> Persentase Pelanggaran Pegawai.

Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pegawai dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai telah bekerja sesuai dengan kewajibannya dan tidak melakukan tindakan larangan. Pegawai yang tidak mematuhi aturan mengenai pemenuhan kewajiban atau melakukan tindakan larangan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Persentase pelanggaran pegawai pada tahun 2016 adalah sebanyak 0,63 % dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 0,19 .%

**Tabel 2. 232**

Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ASN yang dikenai Sanksi	35	10
2	Jumlah Total ASN	5548	5300
3	Persentase Pelanggaran Pegawai	0,63	0,19

Sumber : Inspektorat Kab. Soppeng

#### <> Jumlah Temuan BPK

Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan pemerintahan secara umum dan khususnya pengelolaan keuangan adalah berkurangnya jumlah temuan BPK baik berupa temuan administrasi maupun temuan



finansial. Jumlah temuan BPK pada tahun 2016 adalah sebanyak 18, dan pada tahun 2017 berkurang sehingga menjadi hanya 8 temuan. Hal tersebut merupakan salah satu gambaran upaya Pemerintah Kab Soppeng untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 2. 233**

Jumlah Temuan BPK Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Temuan BPK	18	8

Sumber : Inspektorat Kab. Soppeng

## 6. Sekretariat Dewan

**Tabel 2. 234**

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang  
Urusan Pengawasan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan Sekretariat Dewan, yang dijelaskan sebagai berikut :



**<> Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten.**

Rencana Kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang ikut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dalam merumuskan rencana kerja, DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan . selain itu, penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di daerah.

Pada Rencana Kerja DPRD Tahun 2017 secara terpadu telah mencakup semua kebutuhan setiap alat-alat kelengkapan DPRD antara lain Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

**<> Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan Daerah (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).**

Sebagai satu kesatuan dari Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng berupaya untuk memuat dan mengintegrasikan Program-Program Kerja DPRD Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan fungsi DPRD (Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran) pada dokumen perencanaan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017 telah mengintegrasikan program kerja DPRD baik dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan Daerah (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) berupa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat kegiatan-kegiatan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan DPRD.



**<> Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.**

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan dan unsur administratif terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD sedangkan teknis administrasi berada dalam pembinaan Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretariat DPRD adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut pada Tahun 2017 sekretariat DPRD telah mengintegrasikan program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Renstra 2016-2021, Rencana Kerja 2017 hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.

#### **2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada aspek Daya Saing Daerah, dapat diukur dari pengeluaran konsumsi, nilai tukar petani, pengeluaran konsumsi non pangan, produktivitas total daerah, desa berstatus swasembada, keterbukaan ekonomi, ratio pinjaman di Bank umum, Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR, Angka kriminalitas yang tertangani, Rasio ketergantungan. Aspek daya saing daerah Kabupaten Soppeng dalam kurun Tahun 2016 dan Tahun 2017 digambarkan pada tabel berikut.



**Tabel 2. 235**  
Aspek Daya Saing Daerah

INDIKATOR ASPEK DAYA SAING DAERAH		SATUAN	2016	2017
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	552.856	607.629
2	Nilai tukar petani	%	100,97	101,81
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	47,28	45,27
4	Produktivitas total daerah			
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6,12	6,12
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)		-600399	-473692
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum			
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR			
9	Angka kriminalitas yang tertangani		17,3	11,93
10	Rasio ketergantungan		0,47	0,47

#### 2.4.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pada Tahun 2017 konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Soppeng adalah 607.629 meningkat di banding tahun 2016 sebesar 552.856

#### 2.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan petani. Nilai tukar petani di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2017 pada tabel berikut.



**Tabel 2. 236**

Nilai Tukar Petani Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Indeks yang diterima Petani	101,83	102,93
2	Indeks yang dibayar Petani	100,85	101,10
	<b>Nilai Tukar Petani</b>	<b>100,97</b>	<b>101,81</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi di luar pangan oleh semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Pada tahun 2017 persentase pengeluaran konsumsi non pangan Penduduk di Kabupaten Soppeng adalah 45,27 menurun dibanding tahun 2016 yaitu 47,28, hal ini berarti pengeluaran untuk konsumsi masih lebih besar dibanding pengeluaran konsumsi non pangan.

Persentase desa berstatus swasembada, Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 jumlah desa yang berstatus swasembada adalah 3 desa dari jumlah desa sebanyak 49 desa atau baru 6,12 persen.

Angka Kriminalitas yang tertangani , untuk meningkatkan daya saing daerah salah satunya diukur dari kemampuan daerah dalam penanganan tindak kriminal. Pada tahun 2017 tindak kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk adalah 11,93 atau 298 kasus

Rasio ketergantungan, (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Pada tahun 2017



ratio ketergantungan di Kabupaten Soppeng adalah 0,47 menunjukkan perbandingan antara penduduk usia kurang 15 tahun ditambah dengan usia di atas 64 tahun (bukan usia produktif ) sebanyak 77.314 orang dengan penduduk usia produktif 15-64 tahun sebanyak 164.116 orang. Hal ini menunjukkan jika penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 masih didominasi penduduk dengan usia produktif.

## 2.5. KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*).

Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa pnyediaan (*provisioning*)
2. Jasa pengaturan (*regulating*)
3. Jasa budaya (*cultural*)
4. Jasa pendukung (*supporting*)



Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Daya dukung Kabupaten Soppeng akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan oada kemmpuan lahan di Kabupaten Soppeng. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten Soppeng dengan pendekatan jasa ekosistem.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit.



Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 237**

**Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan**

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt. Semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan
5	V	semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

**Sumber : Klingebiel and Montgomery (1961, diringkaskan) dan Fenton (2014)**

**Keterangan :Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: Pertanian intensitas sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: Pengembalaan intensif; Pgsd: Pengembalaan sedang; Pgt: Pengembalaan terbatas.**

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Soppeng. Hasilnya 150,52% luas lahan kelas VI, 105,83% luas lahan kelas V, 38,92% luas lahan kelas IV, 17,39% luas lahan kelas III dan 17,27% luas lahan kelas II. Hasil ini menunjukkan bahwa lahan di Kabupaten Soppeng umumnya hanya mampu untuk pengembalaan sedang dan pengembalaan terbatas dan semua jenis pengembalaan (pengembalaan intensif, pengembalaan sedang, pengembalaan intensif, semua jenis hutan).

Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Soppeng umumnya mengandung kerikil atau batuan dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Sementara lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan budidaya hanya 46% dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng, kecuali pertanian sangat intensif.



**Tabel 2. 238**

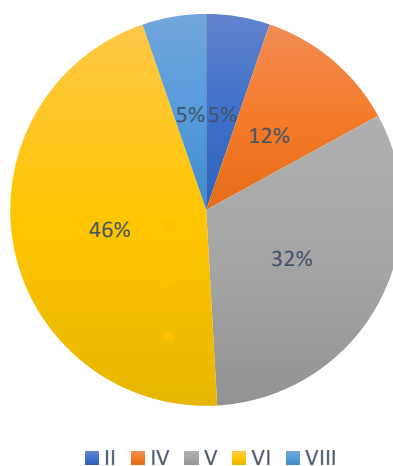
Kelas Kemampuan Lahan

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	7.178,55	17,27
IV	16.175,90	38,92
V	43.987,75	105,83
VI	62.561,78	150,52
VIII	7.227,98	17,39

Sumber : Diolah dari Data Land System, Tahun 2017

**Gambar 2. 1**

Persentase Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Soppeng  
**Persentase (%)**



Adapun kecamatan yang potensi untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 240**

Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Soppeng

Kecamatan	Kelas				
	II	IV	V	VI	VIII
CITTA	0,00	38,54	34,19	1,11	26,16
DONRI-DONRI	0,00	2,24	30,74	67,02	0,00
GANRA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
LALABATA	0,14	3,22	12,72	83,83	0,08
LILIRIAJA	15,51	12,48	55,35	8,94	7,73
LILIRILAU	25,98	48,81	24,93	0,29	0,00
MARIORIAWA	0,00	12,26	30,51	57,23	0,00
MARIORIWAWO	6,62	3,03	42,42	24,03	23,90
Total	5,23	11,80	32,08	45,62	5,27

Sumber : Analisis Data, Tahun 2018



Berdasarkan tabel diatas daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Lilirilau, Liliriaja dan Marioriwawo.

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Soppeng diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 239**  
**Nilai Tukar Petani Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng**

Kecamatan	Ketersediaan (m <sup>3</sup> )	Kebutuhan (m <sup>3</sup> )	Selisih (m <sup>3</sup> )
CITTA	3.694.530,22	1.754.041,08	1.940.489,14
DONRI-DONRI	22.123.771,07	4.653.532,10	17.470.238,97
GANRA	8.122.112,21	2.207.232,02	5.914.880,20
LALABATA	26.217.191,08	4.973.761,56	21.243.429,52
LILIRIAJA	9.160.795,85	3.570.982,25	5.589.813,61
LILIRILAU	13.211.044,05	5.628.901,16	7.582.142,90
MARIORIAWA	23.873.761,15	4.312.773,57	19.560.987,58
MARIORIWAWO	14.406.989,23	5.794.804,61	8.612.184,63
<b>Total</b>	<b>120.810.194,86</b>	<b>32.896.028,33</b>	<b>87.914.166,54</b>

*Sumber : Analisis Data Tahun 2018*

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Soppeng sebesar 120.810.194,86 M<sup>3</sup>/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 32.896.028,33 M<sup>3</sup>/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 87.914.166,54 M<sup>3</sup>/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Lalabata (21.243.429,52 M<sup>3</sup>/Tahun), dan Marioriwawa (19.560.987,58 M<sup>3</sup>/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Citta (1.940.489,14 M<sup>3</sup>/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan Citta merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dengan aktifitas yang beragam.



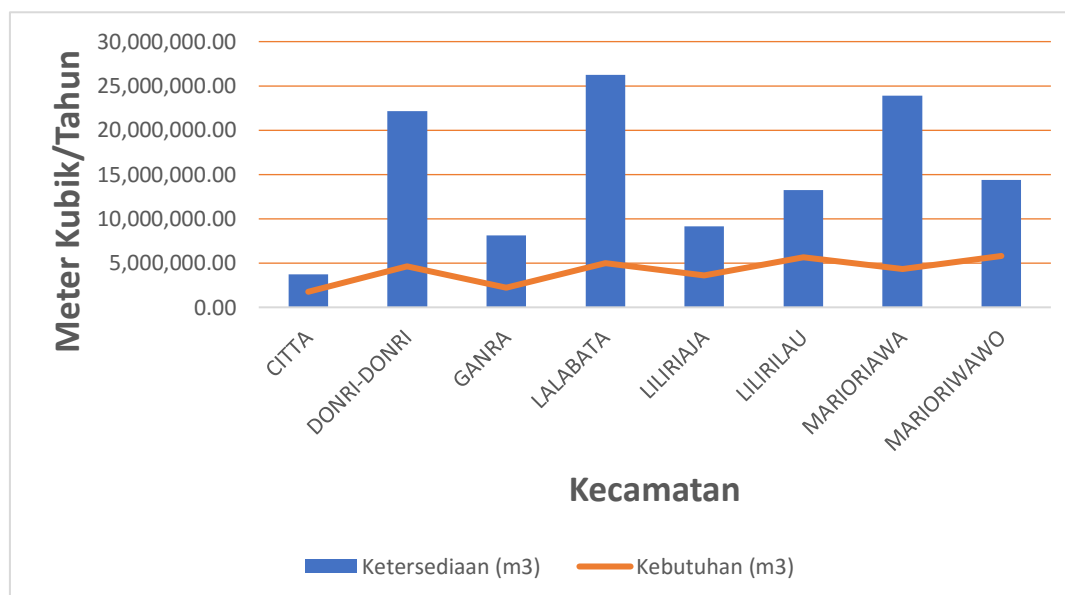
Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2017, 2022, 2027 dan 2032 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1-2%, dengan asumsi ketersediaan air tetap, meskipun pada daerah perkotaan cenderung melampaui ambang batas seperti pada Kec.Taneteriattang. Padatahun 2019, 2023 dan 2030 kebutuhan air di Kabupaten Bone masing-masing 117.122.878,25 M3/Tahun, 119.245.270,99 M3/Thn, 123.093.156,02 M3/Thn.

**Tabel 2. 240**  
Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih  
di Kabupaten Soppeng

Kecamatan	Meter Kubik (m3)				
	Ketersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
CITTA	3.694.530,22	1.754.041,08	1.767.112,40	1.780.281,12	1.793.547,98
DONRI-DONRI	22.123.771,07	4.653.532,10	4.674.020,36	4.694.598,82	4.715.267,89
GANRA	8.122.112,21	2.207.232,02	2.213.673,60	2.220.133,99	2.226.613,23
LALABATA	26.217.191,08	4.973.761,56	5.012.077,57	5.050.688,76	5.089.597,40
LILIRIAJA	9.160.795,85	3.570.982,25	3.585.450,26	3.599.976,89	3.614.562,38
LILIRILAU	13.211.044,05	5.628.901,16	5.640.562,63	5.652.248,27	5.663.958,11
MARIORIAWA	23.873.761,15	4.312.773,57	4.326.094,90	4.339.457,39	4.352.861,14
MARIORIWAWO	14.406.989,23	5.794.804,61	5.852.926,49	5.911.631,35	5.970.925,01
<b>Total</b>	<b>120.810.194,86</b>	<b>32.896.028,33</b>	<b>33.071.918,22</b>	<b>33.249.016,58</b>	<b>33.427.333,13</b>

Sumber : Analisis Data Tahun 2018

**Tabel 2. 241**  
Proyeksi Penyediaan Air di Kabupaten Soppeng





Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Soppeng sebesar 993.249.994,40 Kkal/Thn, sementara kebutuhan sebesar 269.581.886,88 Kkal/Tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 723.668.107 Kkal/Tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Lalabata (162.062.449,19 Kkal/Thn) diikuti dengan Marioriwawa (154.846.596,72 Kkal/Thn) , Donri-Donri (129.356.872,35 Kkal/Thn) dan Marioriwawo (108.719.325,33 Kkal/Thn).

**Tabel 2. 242**

**Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Soppeng**

Kecamatan	Ketersediaan (kkal)	Kebutuhan (kkal)	Selisih (kkal)
<b>CITTA</b>	37.050.193,82	15.061.646,16	21.988.547,66
<b>DONRI-DONRI</b>	166.585.129,11	37.228.256,76	129.356.872,35
<b>GANRA</b>	39.958.946,23	17.657.856,12	22.301.090,11
<b>LALABATA</b>	201.852.541,67	39.790.092,48	162.062.449,19
<b>LILIRIAJA</b>	74.364.084,45	29.861.666,16	44.502.418,29
<b>LILIRILAU</b>	127.323.439,71	47.432.631,84	79.890.807,87
<b>MARIORIAWA</b>	189.348.785,28	34.502.188,56	154.846.596,72
<b>MARIORIWAWO</b>	156.766.874,13	48.047.548,80	108.719.325,33
<b>Total</b>	<b>993.249.994,40</b>	<b>269.581.886,88</b>	<b>723.668.107,52</b>

Hal ini menunjukkan bahwa daerah Lalabata, Marioriwawa, Donri-Donri dan Marioriwawo dalam pengembangannya tetap diarahkan sebagai sumber produksi pangan untuk Kabupaten Soppeng secara umum. Sementara untuk selisih antar ketersediaan dan kebutuhan pangan terkecil terdapat pada Kecamatan Citta (21.988.547,66 Kkal/Tahun). Untuk Kecamatan Citta merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk yang paling sedikit sehingga kebutuhan pangan masih dapat dipenuhi terutama untuk hasil pertaniannya.

Adapun hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun 2017, 2022, 2027 dan 2032 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1-2%, dengan asumsi ketersediaan pangan tetap, meskipun pada daerah perkotaan cenderung melampaui ambang batas seperti pada Kec.Citta Pada tahun 2017, 2022, 2027 dan 2032 kebutuhan pangan di Kabupaten Soppeng masing-masing 2.034.870.530,09 Kkal/Tahun, 2.118.227.064,24 Kkal/Thn, 2.365.351.840,00 Kkal/Thn. Adapun proyeksi kebutuhan



pangan di Kabupaten Soppeng untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 243**  
**Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Pangan**  
**di Kabupaten Soppeng**

Kecamatan	Kilokalori/Tahun (kcal/tahun)				
	Ketersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
CITTA	37.050.193,82	15.061.646,16	15.173.887,28	15.286.964,83	15.400.885,04
DONRI-DONRI	166.585.129,11	37.228.256,76	37.392.162,84	37.556.790,56	37.722.143,09
GANRA	39.958.946,23	17.657.856,12	17.709.388,82	17.761.071,92	17.812.905,85
LALABATA	201.852.541,67	39.790.092,48	40.096.620,60	40.405.510,10	40.716.779,17
LILIRIAJA	74.364.084,45	29.861.666,16	29.982.652,20	30.104.128,41	30.226.096,80
LILIRILAU	127.323.439,71	47.432.631,84	47.530.898,72	47.629.369,18	47.728.043,64
MARIORIAWA	189.348.785,28	34.502.188,56	34.608.759,24	34.715.659,09	34.822.889,14
MARIORIWAWO	156.766.874,13	48.047.548,80	48.529.465,71	49.016.216,24	49.507.848,89
<b>Total</b>	<b>993.249.994,40</b>	<b>269.581.886,88</b>	<b>271.023.835,40</b>	<b>272.475.710,33</b>	<b>273.937.591,61</b>

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa terdapat 2 Kecamatan yang diperkirakan kebutuhannya pangannya sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya pada tahun 2027 dan 2032 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Marioriwawo dan Lilirilau. Dimana ketersediaan pangannya masing-masing 49.016.216,24 Kkal/Thn dan 47.629.369,18 Kkal/Thn, sementara kebutuhan pangannya ditahun 2032 diperkirakan masing-masing 49.507.848,89 Kkal/Thn dan 47.728043,64 Kkal/Thn. Besarnya kebutuhan pangan pada 2 kecamatan tersebut didorong oleh pertumbuhan penduduk pada 2 wilayah tersebut sebagai pusat kegiatan di Kabupaten Soppeng.

### 2.5.1. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Namun sebelum dampak dapat terjadi, makhluk hidup dapat mengenali risiko yang merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi/dampak dari sebuah aksi. Pada konteks lingkungan hidup, dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan manusia pada umumnya seringkali bersifat negatif. Lalu sebagai bentuk dari dampak tersebut, maka akan terbentuk risiko-risiko yang akan membahayakan tidak hanya



lingkungan itu saja, namun juga manusia. Oleh sebab itu, penting adanya kajian tentang risiko guna mencegah atau memperkecil dampak.

Risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologis. Beragam permasalahan dalam lingkup sistem sosial, proses sosial, dan relasi sosial telah memunculkan tiga macam risiko ekologis, yaitu:

1. Risiko fisik-ekologis (physical-ecological risk), yaitu aneka risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya;
2. Risiko mental (mental risk), yaitu aneka risiko kerusakan mental akibat perlakuan buruk pada tatanan psikis.
3. Risiko sosial (social risk), yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial (social-ecological)

Risiko fisik-ekologis dapat disebabkan oleh proses alam atau oleh kegiatan manusia (manmade risk). Salah satu contohnya adalah banjir yang paling sering menimbulkan kerusakan fisik-ekologis. Risiko mental dapat meliputi kerusakan psikis yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kerusakan parah ekosistem mental disebabkan oleh pembiaran aneka risiko mental dari berbagai tindakan sosial, misalnya pembiaran kekerasan dan korupsi. Risiko sosial adalah kerusakan bangunan sosial sebagai akibat dari faktor-faktor eksternal kondisi alam, teknologi, dan industri. Pada umumnya risiko yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan terhadap komunitas sosial adalah risiko kesehatan dan kesejahteraan. Tiga macam risiko ekologis tersebut jika dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan efek yang negatif untuk sistem biosfer dimana manusia dan lingkungan hidup secara berdampingan.

Guna mengidentifikasi dampak dan risiko terhadap lingkungan di Kabupaten Soppeng, studi ini menggunakan pendekatan Driver – Pressure – State– Response (DPSIR). DPSIR merupakan metode dalam melakukan analisis sistem untuk mengamati masalah lingkungan dan menemukan akar permasalahan beserta mengidentifikasi risiko dari dampak yang telah ditimbulkan. DPSIR secara terminologi merupakan cara penilaian terhadap perkembangan sosial & ekonomi (Driver) dalam mengendalikan tekanan(Pressure) terhadap lingkungan dan, sebagai konsekuensinya, adalah bentuk (State) dari perubahan lingkungan. Hal ini akan menyebabkan dampak (Impact) pada sistem sosial yang pada akhirnya menimbulkan respon (Response) masyarakat sebagai umpan balik terhadap Driver /Pressure/State/Impact.



Salah satu kajian risiko yang dihadirkan pada laporan ini adalah kajian risiko bencana. Kajian ini didasarkan pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisa terhadap kemungkinan timbulnya potensibencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi.

Secara umum, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Pada dasarnya, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dilakukan di Kabupaten Soppeng tahun 2011. Upaya tersebut adalah sekaligus merangkumpengkajian risiko bencana. Batasan dalam pengkajian tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga kajian risiko bencana yang disusun sekarang merupakan pengembangan dari kajian sebelumnya. Dasar pengkajian risiko bencana disamakan dengan aturan terkait kebencanaan hingga tingkat nasional. Pengkajian tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Pengkajian tersebut didasarkan dengan indeks masing-masing bencana terhadap bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan indeks tersebut untuk menghasilkan tingkat risiko untuk setiap bencana di suatu daerah. Penyempurnaan terhadap metodologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses pengkajian risiko dan hasil kajian. Pengaruh tersebut terkait dengan komponen-komponen yang digunakan dalam pengkajian, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko.

Adapun hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Soppeng dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 244**  
**Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Soppeng**

Jenis Bahaya	Luas Bahaya (Ha)	% Bahaya
Banjir Bandang	3.607,03	3
Banjir	37.928,06	28
Cuaca Ekstrim	45.866,61	33
Gempa Bumi	20.637,72	15



Kebakaran Hutan dan Lahan	5.480,24	4
Kekeringan	68.225,36	50
Tanah Longsor	33.285,46	24

**Sumber : Analisis Data, Tahun 2018**

Kajian resiko bencana di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa di terdapat 7 jenis bahaya yang berisiko tinggi, yaitu tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir bandang dan kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir dan gempa bumi. Adapun cakupan lokasi bahaya yang terbesar adalah resiko cuaca ekstrim sekitar 45.866,61 Ha atau 33 %. Kemudian diikuti dengan resiko tanah longsor sekitar 33.285,46 Ha atau 24 %.

# BAB III

## Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

*“Bab ini berisi Mengulas mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam perspektif jangka panjang”*

SOPPENG

ᨀᨁᨃᨇ ᨁᨃ ᨁᨃᨃ ᨁᨃᨃᨃ ᨁᨃ ᨁᨃᨃ ᨁᨃᨃ ᨁᨃ





## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang tidak terakomodir dalam perencanaan akan berkorelasi dengan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Apabila hal ini terjadi, maka sudah dipastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu akan mengalami kegagalan karena input perencanaan tersebut tidak berdasarkan pada realitas dan kebutuhan para pihak yaitu masyarakat dan swasta sebagai pilar utama dalam penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis yang tidak terakomodir dalam bentuk perencanaan akan mengakibatkan degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya dan yang lebih tragis lagi akan berdampak pada instabilitas dalam suatu daerah.



### 3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan yang disajikan pada bab ini adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Perumusan permasalahan pembangunan ini dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusan pemerintahan daerah yang terkait. Adapun rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Baru secara jangka panjang adalah sebagai berikut.

#### (1) Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia

Dilihat dari indikator indeks pembangunan manusia (IPM), capaian Kabupaten Soppeng relative tertinggal di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Soppeng menempati posisi kelompok bawah dengan nilai IPM sebesar 66,67 sementara nilai IPM Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,34. Untuk indikator angka rata-rata lama sekolah, pada tahun 2017 Kabupaten Soppeng mencapai 7,42 sementara capaian rata-rata Sulawesi Selatan sudah 7,95, ini berarti bahwa Kabupaten Soppeng tertinggal dari rata-rata Sulawesi Selatan. Untuk indikator angka harapa lama sekolah, capaian Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 12,33 sementara rata-rata Sulawesi Selatan sudah mencapai 13,28. Pada aspek kesehatan, angka harapan hidup TAHUN 2017 sebesar 68,72, berada dibawah dari rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 69,84. Pada indikator aspek ekonomi, yakni pengeluaran perkapita/tahun, capaian Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.035.000, berada lebih rendah dari rata-rata Sulawesi Selatan Rp.10.489.000. Dikaitkan dengan daya saing sumberdaya manusia, dua indikator utama yang menjadi tantangan jangka panjang adalah derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

#### (2) Belum optimalnya kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Kondisi aman, tertib dan tenteram adalah prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan pada berbagai bidang. Di Kabupaten Soppeng kejadian tindak kriminalitas mencakup berbagai jenis dan tersebar pada berbagai wilayah dengan angka kriminalitas mencapai 4,96%. Selain itu, gangguan ketertiban dan



ketenteraman cenderung meningkat dalam priode terakhir dimana tingkat penyelesaian gangguan ketertiban, ketenteram dan kenyamanan (K3) pada tahun 2017 mencapai 84%. Kapasitas dalam menangani gangguan K3 relatif terbatas disebabkan oleh rasio jumlah satpol PP/satuan penduduk masih rendah, % linmas/satuan penduduk juga rendah, rasio poskamling/jumlah desa belum optimal, dan cakupan patroli petugas satpol PP belum efektif menjangkau lokasi strategis pada delapan kecamatan. Secara jangka panjang perwujudan kondisi keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat menjadi tantangan di tengah berkembang pesatnya berbagai jenis teknologi.

**(3) Belum optimalnya fungsi infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan memperkuat iklim investasi**

Infrastruktur wilayah dalam hal transportasi dan perhubungan sebagai sarana konektivitas wilayah masih merupakan tantangan secara jangka panjang, baik dalam interkoneksi antar kecamatan maupun interkoneksi antara desa-desa pusat pertumbuhan dengan pusat pemasaran dan distribusi barang. Pada tahun 2017, proporsi panjang jalan kualitas baik baru mencapai 49,32% (451,17 km) sementara dari segi perhubungan jumlah pengguna terminal sebesar 14.295 orang dan persentase desa yang terjangkau angkutan umum sebesar 95%.

Dari segi infrastruktur pengairan rasio jaringan irigasi baru mencapai 9,25 pada tahun 2017, ini berarti masih sangat luas lahan sawah yang tidak terjangkau irigasi. Dari segi infrastruktur perumahan, rasio rumah layak huni baru mencapai 77,52%. Dari segi fasilitas ekonomi wilayah, tantangan yang dihadapi adalah belum adanya hotel dan tempat penyelenggaraan acara yang representatif. Keseluruh factor-faktor ini menjadi bagian dari penyebab belum berkembangnya investasi PMDN dan PMA secara optimal.

**(4) Tertinggalnya kesejahteraan masyarakat dan adanya kesenjangan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan.**

Dilihat dari indikator angka kemiskinan dan PDRB perkapita maka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng relative tertinggal dari rata-rata Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, angka kemiskinan Kabupaten Soppeng mencapai 8,27%, berada di bawah dari rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 9,38%.



PDRB/kapita pada tahun yang sama sebesar Rp. 26.550.000, lebih rendah dari rata-rata Sulawesi Selatan. Ini berarti bahwa secara jangka panjang terdapat tantangan untuk mengakselerasi kinerja tersebut. Namun demikian, dari segi angka pengangguran terbuka persinya tidak terlalu besar, yakni hanya 2,71%, ini berarti bahwa lapangan pekerjaan cukup tersedia tetapi produktivitas yang dicapai pada lapangan pekerjaan tersebut rendah. Ini terutama pada pekerjaan pertanian kebun dan sawah tadah hujan yang produktivitasnya rendah, ataupun para petani tuna kisma yang bekerja tetapi hanya menyakap (bagi hasil) tanah orang lain. Dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2017 Kabupaten Soppeng mencapai 8,34% relatif diatas dengan rata-rata Sulawesi Selatan yaitu mencapai 7,23%, dengan kontribusi terbesar masih dari sektor pertanian (dalam arti umum) yakni sebesar 30,6%, sementara kontribusi kelompok usaha sektor industri sebesar 10,47% dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,29%. Pada indikator pemerataan ekonomi, gini ratio Kabupaten Soppeng sebesar (0,30 = rata-rata Sulawesi Selatan) pada tahun 2017, nilai ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar lapisan pendapatan cukup merata. Di Kabupaten Soppeng kesenjangan ini terutama antara mereka yang bekerja pada sektor primer pertanian di perdesaan (yang berkontribusi 30,6% PDRB) dengan mereka yang bekerja di sektor sekunder industr (dengan kontribusi 10,47% PDRB). Pada dimensi wilayah, kesenjangan ini ditandai oleh ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan dari pusat ibu kota kecamatan dan terutama dengan ibu kota kabupaten. Porsi desa tertinggal di Kabupaten Soppeng masih jauh lebih banyak dibanding porsi desa berkembang dan desa mandiri.

**(5) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik**

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tantangan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait dengan hal ini adalah akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta partisipasi dari dan keterbukaan kepada seluruh pemangku kepentingan daerah. Dari segi pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator opini laporan keuangan, pada tahun 2017 Kabupaten Soppeng telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini menjadi tantangan untuk terus dipertahankan. Dari



segi perencanaan, pelaporan dan pencapaian kinerja, pada tahun 2017 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Soppeng hanya mendapat nilai CC dan menjadi tantangan kedepan untuk mencapai nilai yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terbatas pada penyelenggaraan musyawarah pembangunan (musrenbang), entitas public dan civil society belum sepenuhnya terwujud dalam masyarakat.

**(6) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan umum**

Pada tahun 2017, indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan umum masih berada pada kisaran nilai 85. Ini menunjukkan capaian yang belum terlalu memuaskan. Tantangan kedepan adalah peningkatan kinerja pelayanan pada enam urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan tata ruang, (4) perumahan dan permukiman, (5) ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, (6) sosial. Aspek pelayanan lainnya adalah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berjalan pada unit pelayanan terpadu satu pintu serta pelayanan yang diselenggarakan di kecamatan.

**(7) Degradasi kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam**

Untuk keberlanjutan pembangunan, salah satu dimensi yang sangat penting adalah lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Salah satu tantangan utama Kabupaten Soppeng adalah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, dimana data titik-titik wilayah tersebut belum tersedia dengan detail dan akurat. Status mutu air juga merupakan tantangan secara jangka panjang, baik mutu air untuk konsumsi rumah tangga maupun mutu air pada sungai dan danau. Tantangan kedepan lainnya adalah penambahan volume sampah seiring dengan pertumbuhan pemukiman dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Termasuk juga didalamnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang semakin dibutuhkan seiring dengan perkembangan pembangunan di masa datang.



## **(8) Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

### **1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

- Pertumbuhan Ekonomi masih didominasi oleh faktor konsumsi dari pada investasi menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas
- Kurangnya lapangan kerja baru
- AHH dan Rata-Rata Lama Sekolah masih Rendah di bawah Sul-Sel dan Nasional
- Masih Tinggi Angka Putus sekolah, dan masih banyak yang tidak Bersekolah.

### **2. Aspek Pelayanan Umum**

#### **a. Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar**

- Akses, layanan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas pada beberapa wilayah
- Masih belum tingginya kesadaran ibu hamil terhadap Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil
- Adanya Ibu hamil yang tidak merampungkan standar minimum empat kali kunjungan
- Tingginya estimasi jumlah sasaran ibu hamil dengan komplikasi, tetapi secara riil semua ibu hamil dengan komplikasi kebidanan ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten
- komplikasi ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten
- kurangnya jumlah kelahiran
- Tingginya estimasi jumlah sasaran anak balita
- Masih banyak orang tua yang tidak lagi membawa anaknya ke sarana pelayanan kesehatan untuk dipantau pertumbuhannya apabila sudah lebih dari usia satu tahun
- Tingginya estimasi jumlah penduduk  $\leq 15$  tahun
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri di sarana pelayanan kesehatan (malu akan stigma sebagai penderita TB)
- Jumlah balita kurang karena tingginya akseptor KB



- Jumlah posyandu yang masih kurang
- Masyarakat yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan kurang karena adanya kegiatan preventif dan promotif di masyarakat
- Kurangnya pasien miskin yang dirujuk
- Tidak ada penambahan rumah sakit dalam waktu 5 tahun terakhir di sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah
- Penambahan dokter belum sesuai kebutuhan
- batas sertifikasi diperhatikan
- Memperhatikan kompetensi untuk tenaga tim penanggulangan
- Jumlah dokter spesialis belum memenuhi standard rumah sakit

**b. Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**

- Rendahnya skill akibat dari belum terbinanya bursa kerja khusus yang ada di institusi pendidikan/ balai kerja
- Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan
- Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka
- Kurangnya kegiatan job canvasing (mencari lowongan pekerjaan ke perusahaan)
- Kurangnya partisipasi pencari kerja yang telah ditempatkan/ telah mendapatkan kerja yang melaporkan diri ke dinas tenaga kerja
- Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat akan KDRT yang semakin meningkat, karena banyaknya sosialisasi KDRT yang dilaksanakan di masyarakat baik dari BPPKB sendiri maupun oleh lembaga-lembaga lain yang peduli masalah KDRT
- Kasus KDRT sebenarnya banyak terjadi di masyarakat sejak dulu tapi yang melapor hanya sedikit namun dengan meningkatnya



pengetahuan masyarakat tentang prosedur pelaporan KDRT maka angka KDRT kelihatannya semakin tinggi

- dalam penyusunan regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada permasalahan yang ditemukan, akan tetapi apabila ditelaah secara spesifik masih ada arah kebijakan ketahanan pangan yang masih perlu dibuatkan regulasi hukum seperti diversifikasi dan keamanan pangan
- adanya penurunan produksi dan produktifitas pangan utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta bencana kekeringan (puso)
- adanya surplus ketersediaan pangan tertentu terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 93.891,92 ton berdasarkan analisis ratio ketersediaan neraca bahan makanan sehingga pencapaian ketersediaan energi dan protein melebihi target SPM kabupaten
- belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang pemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerintah
- pemantauan ketersediaan informasi pasokan yang dilaksanakan meliputi 9 jenis komoditi, 4 lokasi dan waktu melebihi target yang ingin dicapai harga komoditi sembilan bahan pokok cukup terjangkau kecuali harga bawang merah dan cabai yang mengalami fluktuasi pada hari-hari tertentu serta pasokan selalu tersedia baik produksi daerah maupun dari daerah tetangga
- skor PPH yang ingin dicapai sebesar 81 sementara realisasinya sebesar 87.65 sehingga pola konsumsi kita secara kualitas sudah melebihi target skor PPH Kabupaten
- ditemukan adanya beberapa jenis pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan yang beredar dipasaran seperti buah-buahan dan ikan kering yang beredar mengandung formalin dan pestisida berdasarkan uji residu dan uji laboratorium
- belum adanya induksi gejala kerawanan pangan di kab. Soppeng



- Pensertifikatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan sistem pensertifikatan oleh kantor pertanahan Kabupaten Soppeng dari pendaftaran tanah secara sistematik menjadi secara sporadis dimana setiap SKPD mengajukan sendiri asset yang akan disertifikat
- Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai
- Tempat pembuangan sampah (TPS) masih kurang
- Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air
- Masih adanya penduduk yang belum melaksanakan perekaman
- Adanya penduduk yang terdaftar di data base tetapi tidak tinggal di Soppeng
- Masih ada Sebagian Posyandu Yang Belum memiliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak khususnya di daerah Desa/Kelurahan terpencil
- Jumlah Penumpang semakin meningkat setiap tahun
- sebanyak 22 koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT
- Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi
- Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi tidak adanya pendataan UMKM secara intensif
- Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi
- Sarana dan infrastruktur daerah
- Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang
- Kurangnya sosialisasi kepemudaan dalam berorganisasi
- Terbatasnya kegiatan olah raga hanya pada tingkat pelajar



- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan
- sarana dan prasarana masih kurang dan kurang terpelihara
- budaya adalah kearifan lokal yang kadang berbenturan dengan agama
- Pattaungeng, Pesta nelayan, maccera tampareng ditentukan oleh kondisi alam seperti disaat air sedang pasang
- budaya ini memerlukan perlakuan khusus atau kehati-hatian agar tidak berbenturan dengan agama
- ada beberapa kawasan cagar budaya yang belum dipelihara secara optimal
- Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat
- Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai,
- Belum optimalnya pembinaan kearsipan di SKPD yang disebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis)

**c. Urusan Pilihan**

- produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan tidak ada kegiatan restocking sejak tahun 2014
- konsumsi menurun yang diakibatkan oleh banyaknya alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Optimalisasi kinerja dalam pembinaan kelompok nelayan
- seluruhnya belum mencapai target karena pada saat kondisi cuaca yang tidak mendukung (musim kemarau), sebagian kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasar dll)
- produksi menurun yang diakibatkan oleh kemarau panjang sehingga tidak ada produksi selama 6 bulan
- sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata belum optimal
- sumberdaya pengelola dan instansi pengelola belum memadai



- Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan terjadinya bencana kekeringan yang menyebabkan areal pertanaman padi mengalami puso  $\pm 9.852$  hektar, kerusakan ringan  $\pm 15$  hektar, sedang  $\pm 122,96$  hektar dan berat  $\pm 618,59$  hektar.
- Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani
- Tingkat pemupukan belum sesuai rekomendasi teknis dan ketersediaan pupuk bersubsidi masih terbatas
- Terjadinya perubahan iklim (el nino) menyebabkan terjadinya kekeringan hingga puso seluas 907 hektar
- Terjadinya perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekeringan (puso) seluas 98 hektar
- Masih terbatasnya ketersediaan penggunaan benih bermutu bersertifikat di tingkat kelompok tani
- Penggunaan benih masih dominan menggunakan benih asalan, cenderung turun temurun
- Pemeliharaan tanaman tidak dilakukan secara insentif karena hanya dianggap tanaman sela antara dua musim tanam
- target binaan kelompok tani sebanyak 650 klp dengan realisasi binaan 689 klp dimana pertumbuhan dan pemekaran kelompok tani yang melebihi target akibat luas potensi yang terlalu besar untuk satu kelompok serta efektifitas pengelolaan manajemen kelompok yang terlalu banyak anggotanya
- Masih rendahnya pengetahuan peternak tentang inseminasi buatan
- Kurangnya petugas inseminator
- Masih banyaknya kelahiran ternak sapi hasil IB yang belum dilaporkan
- masih adanya pengusaha tambang untuk mendapatkan IUP Operasi produksi yang sesuai
- kurangnya kesadaran dari pengusaha



- adanya adaptasi pencatatan statistik nasional dengan melakukan perubahan tahun dasar dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010 kurangnya kesadaran pedagang akan undang-undang perlindungan konsumen
- diharapkan adanya bantuan pemerintah dalam bentuk peralatan untuk perkembangan industri
- diharapkan adanya pendataan secara kontinyu agar didapatkan hasil berupa profil usaha mikro khususna industri rumah tangga setiap tahunnya
- tidak adanya pendataan terkait jumlah industri termasuk jumlah produksi di kab. Soppeng setiap tahunnya. Data yang diperoleh hanya bersumber dari jumlah usaha industri yang mengurus izin usaha melalui KPT dan dinas Koperindag
- pelaku usaha / perajin membutuhkan peralatan namun terkendala oleh tidak adanya proposal yang dibuat untuk mendapatkan bantuan tersebut
- Sejak tahun 2000 tidak ada lagi transmigrasi swakarsa mandiri

### **3. Aspek Daya Saing Daerah**

- Pengeluaran Perkapita lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Sulawesi Selatan.
- kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani masih lebih rendah dibandingkan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga
- Masih kurangnya infrastuktur wialyah dalam kondisi yang memadai
- Daerah yang permukaan rendah menjadi daerah yang rawan bencana banjir
- Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di kota meningkat
- Masih terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman
- Masih terbatasnya debit ar PAM untuk mensuplay kebutuhan penduduk



- Kuatnya faktor eksternal daerah mempengaruhi kriminalitas
- Masih adanya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi
- Masih perlu dukungan infrastruktur dan regulasi Sarana dan infrastruktur daerah belum memadai Informasi peluang dan potensi investasi Soppeng yang masih kurang.

### 3.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang tidak terakomodir dalam perencanaan akan berkorelasi dengan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jangka panjang. Apabila hal ini terjadi, maka sudah dipastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu akan mengalami kegagalan karena input perencanaan tersebut tidak berdasarkan pada realitas dan kebutuhan para pihak yaitu masyarakat dan swasta sebagai pilar utama dalam penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis yang tidak terakomodir dalam bentuk perencanaan akan mengakibatkan degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya dan yang lebih tragis lagi akan berdampak pada instabilitas dalam suatu daerah.

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan



datang. Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan dengan mensistesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal atau isu-isu global.

## 1. Isu Global

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di daerah.

### a. Sustainable Development Goals (SDGs)

**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs).** Terdapat 17 poin SDGs yang menjadi isu pembangunan Kabupaten Soppeng secara jangka panjang yakni: (1) Mengentaskan segala bentuk Kemiskinan; (2) Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, serta Mempromosikan pertanian berkelanjutan; (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia; (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua; (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan; (6) Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; (7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua; (8) Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua; (9) Membangun



Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; (10) Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara; (11) Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan; (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; (13) Membuat langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; (14) Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan; (15) Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggurunan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; (16) Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; (17) Memperkuat cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Soppeng.

**b. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).**

**Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).** Integrasi perdagangan ASEAN memberi tantangan bagi Kabupaten Soppeng mengingat belum berkembangnya komoditas unggulan yang dapat dipersaingan pada level ASEAN. Integrasi tenaga kerja ASEAN membawa tantangan karena dengan itu berbagai lapangan kerja daerah dapat diisi oleh tenaga kerja ASEAN yang lebih kompeten, sebaliknya tenaga kerja daerah juga dapat bersaing pada level ASEAN bila memenuhi standar



kompetensi yang berlaku.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan. Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

1. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Demikian juga investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para profesional akan semakin meningkatkan tingkat skill, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup



kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

2. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN.

**c. Perubahan Iklim**

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih



jauh dari yang diharapkan. Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO<sub>2</sub> dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri.

Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, Pertanian dan fungsi lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang. Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan juga tidak luput dari faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak.

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming.

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.



## 2. Isu Nasional

Pada RPJPN sejumlah isu strategis jangka panjang telah diidentifikasi. Pada bidang sosial-budaya teridentifikasi isu jumlah penduduk yang semakin besar dan akan dicapainya bonus demografi, sementara itu kualitas SDM masih rendah ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang masih tertinggal dibanding negara lain. Pada bidang ekonomi tersadari tantangan akan semakin terbukanya persaingan ekonomi secara global sementara secara internal masalah kemiskinan masih signifikan. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tantangan adalah kemampuan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Pada bidang sarana-prasarana tersadari adanya tantangan dalam sarana/prasarana transportasi dan perhubungan, selain itu juga teridentifikasi kebutuhan akan sarana/prasarana penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air serta sarana/prasarana bagi integrated water resources management. Pada bidang wilayah dan tata ruang terdapat isu penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Pada bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup terdapat isu ancaman krisis pangan, air dan energy sebagai implikasi dari krisis lingkungan, selain itu juga ditekankan isu pencemaran lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

## 3. Isu Regional Sulawesi Selatan

Pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025 terkandung sejumlah isu strategis yang menjadi dasar pernyataan visi RPJPD tersebut. Isu pertama terkait dengan sejumlah indikator yang menjadi penanda bagi perwujudan Sulawesi Selatan sebagai daerah terkemuka. Tercakup di dalamnya adalah isu perwujudan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan umum dan pencapaian daya saing daerah. Isu kedua terkait dengan promosi kemandirian lokal sebagai cara perwujudan daerah terkemuka dengan penekanan pada interkoneksi antar unsur penyusun tatanan daerah Sulawesi Selatan. Isu ketiga terkait dengan nafas keagamaan sebagai landasan nilai dan norma pembangunan



dengan penekanan pada terwujudnya keadaan kondusif bagi penghayatan dan pengamalan nilai dan norma agama.

#### **4. Isu Strategis Daerah Kabupaten Soppeng**

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah, isu global, isu nasional dan isu regional Sulawesi Selatan maka isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Soppeng yang menjadi landasan perumusan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat
- c. Peningkatan kesejahteraan
- d. Pemerataan kesejahteraan
- e. Penanggulangan kemiskinan
- f. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
- g. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan
- h. Perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik
- i. Peningkatan kualitas pelayanan umum
- j. Pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Pada pembahasan isu strategis daerah ini merupakan analisa dari permasalahan pembangunan yang telah diuraikan pada sub bahasan permasalahan pembangunan. Adapun daftar isu strategis secara keseluruhan disajikan dengan pendekatan urusan pemerintahan menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendekatan urusan akan lebih mempermudah didalam menentukan stakeholder terkait dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi isu strategis tersebut.



Tabel 3. 1  
Isu-Isu Strategis Daerah

NO	ISU STRATEGIS DAERAH
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
<b>1</b>	<b>Pendidikan;</b>
	Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah
	Belum optimalnya aksesibilitas pendidikan
	Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi.
	Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah
	Rendahnya Ekonomi keluarga
<b>2</b>	<b>Kesehatan;</b>
	Terbatasnya sumberdaya kesehatan (Dokter spesialis, dan Paramedis),
	Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana kesehatan
	Pelaksanaan SOP belum optimal
	Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang;
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan anak
	Masih adanya ibu hamil yang melahirkan bukan di puskesmas/ sarana kesehatan lainnya.
<b>3</b>	<b>Pekerjaan umum dan penataan ruang;</b>
	Kondisi jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi dalam kondisi baik masih rendah.
	Aksesibilitas transportasi belum merata
	Drainase jalan tidak berfungsi dengan optimal
	Belum optimalnya pelaksanaan Perda RTRW
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana
	Masih rendahnya bangunan ber IMB
<b>4</b>	<b>Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</b>
	Belum memadainya sarana dan prasarana dasar permukiman dimana masih ada RT belum memenuhi layanan sanitasi



NO	ISU STRATEGIS DAERAH
	Belum memadainya sarana dan prasarana dasar permukiman dimana masih ada RT yang belum menikmati air bersih
	Belum semua kecamatan memiliki RDTR
<b>5</b>	<b>Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih rendah (12,5%) disebabkan jarak tempu Rescue center dari wilayah kebakaran
	Kepatuhan masyarakat masih kurang dalam mematuhi peraturan
	Masih rendahnya ratio jumlah polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk
	Semakin meningkatnya pengguna narkoba
	Pengaruh Globalisasi (Informasi kekerasan)
<b>6</b>	<b>Sosial</b>
	Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
	Masih ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani
	Belum adanya fasilitasi pemerintah terhadap keluarga kematian
	Belum adanya fasilitas perumahan bagi imam masjid dan guru mengaji
	Beras untuk masyarakat miskin belum bebas biaya
<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	
<b>1</b>	<b>Tenaga kerja;</b>
	Masih rendahnya skill tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar
	Masih terbatasnya lapangan kerja
	Masih terbatasnya informasi pasar kerja, diantaranya disebabkan informasi lowongan/ kesempatan kerja oleh perusahaan tidak terbuka
	Kurangnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor lowongan pekerjaan
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</b>
	Persentase perempuan di lembaga pemerintah masih rendah
	Kasus KDRT yang semakin tinggi di masyarakat
	Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
	Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak



NO	ISU STRATEGIS DAERAH
<b>3</b>	<b>Pangan;</b>
	belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas tentang pemahaman pengisian gudang cadangan pangan pemerintah
	Regulasi ketahanan pangan secara umum belum ada yang disusun pemerintah daerah secara spesifik
	Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal,
	penurunan produksi dan produktifitas pangan utama dalam hal ini padi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta bencana kekeringan (puso).
<b>4</b>	<b>Pertanahan;</b>
	Rendahnya lahan yang bersertifikat
<b>5</b>	<b>Lingkungan hidup;</b>
	Masi banyaknya sampah yang tidak tertangani
	Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
	Tidak adanya data luas wilayah rawan longsor dan sumber mata air sehingga tidak ada nilai pembagi luasan untuk menghitung persentase penghijauan rawan longsor dan sumber mata air
	Dampak pemanasan global semakin meningkat
<b>6</b>	<b>Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</b>
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat dan Desa;</b>
	Keterbatasan infrastruktur wilayah perdesaan
	Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan Faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya Akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan
	Masih kurangnya insentif kader posyandu
<b>8</b>	<b>Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</b>
	Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi
<b>9</b>	<b>Perhubungan;</b>
	Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi
	Administrasi sarana transportasi belum optimal



NO	ISU STRATEGIS DAERAH
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan informatika;</b>
	Belum optimalnya implementasi e-government pada setiap SKPD
	Pengembangan teknologi informasi sampai ke pemerintahan desa belum optimal
	Belum tersedianya stasiun TV local
<b>11</b>	<b>Koperasi, usaha kecil, dan menengah</b>
	Pembangunan kemitraan dan pemasaran serta Inovasi dan adopsi teknologi dalam rangka pengembangan disain produk masih kurang
	masih ada koperasi selama 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT
<b>12</b>	<b>Penanaman modal;</b>
	Kondisi infrastruktur yang mendukung iklim investasi belum optimal
	Rendahnya penanaman modal
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan olah raga;</b>
	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan bakat dan kreatifitas pemuda dan olah raga,
	Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga
	Masih lemahnya pembinaan pemuda
	Pengaruh globalisasi terhadap karakter pemuda
<b>14</b>	<b>Statistik;</b>
	Masih terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan data dan statistik.
<b>15</b>	<b>Persandian;</b>
	Belum menjadi prioritas pemerintah daerah
<b>16</b>	<b>Kebudayaan;</b>
	Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya
	Belum tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	Kuatnya pengaruh budaya dari luar
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>
	Masih rendahnya pengunjung perpustakaan sebagai akibat rendahnya minat baca masyarakat
	Koleksi perpustakaan masih kurang



NO	ISU STRATEGIS DAERAH
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>
	SDM Kearsipan belum optimal
	Belum terlaksananya kearsipan melalui system elektronik.
<b>Urusan Pilihan</b>	
<b>1</b>	<b>Kelautan dan perikanan;</b>
	Rendahnya produksi perikanan
	Terbatasnya infastruktur/sarpras dari perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil perikanan
	kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasa)
<b>2</b>	<b>Pariwisata;</b>
	Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pariwisata
	Berkurangnya pengunjung objek wisata
	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata,
<b>3</b>	<b>Pertanian;</b>
	Penurunan produktifitas hasil pertanian
	Pengelolaan Jaringan Air Irigasi untuk Pertanian masih kurang
	Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani
	Masih kurangnya pengetahuan Petani ternak
	Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
	Kurangnya petugas inseminator
	Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agribisnis.
	Masih terbatasnya akses petani terhadap ketersediaan pupuk
	Masih terbatasnya ketersediaan bibit ikan bagi petani
	Masih tinggi sistem sistem petik jual yang menyebabkan nilai tambah produksi pertanian rendah
<b>4</b>	<b>Kehutanan;</b>
	Masih adanya kerusakan kawasan Hutan



NO	ISU STRATEGIS DAERAH
<b>5</b>	<b>Energi dan sumberdaya mineral;</b>
	masih adanya penambang tanpa izin
	Potensi energy terbarukan belum di manfaatkan.
<b>6</b>	<b>Perdagangan;</b>
	Kesiapan produk lokal menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean
	Pemasaran produk lokal masih kurang
	Belum optimalnya perlindungan konsumen
<b>7</b>	<b>Perindustrian;</b>
	Masih rendahnya daya saing produk UMKM di pasar nasional,
	Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata
	Masih lemahnya pembinaan bagi pelaku UMKM,
<b>8</b>	<b>Transmigrasi</b>
	Sarana dan prasarana wilayah yang belum memadai
	Pemanfaatan lahan kritis belum optimal
	SDM peserta transmigrasi yang renda
<b>9</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian</b>
	Belum terkoordinasinya dengan baik kegiatan kepala daerah dengan warga masyarakat dalam penyebarluasan informasi pembangunan
	Pelayanan perizinan belum bisa diakses melalui TI di luar area KPT
	Masih lemahnya penegakan kedisiplinan PNS
	Belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah
	Belum diterapkannya system renumerasi PNS
	Masih adanya aparat desa dan kelurahan yang belum memiliki kendaraan operasional
	Akses pemberiaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum terjangkau

# BAB IV

## Visi dan Misi Daerah

*“Bab Ini Berisi Menguraikan Mengenai Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng. Bab Ini Juga Memuat Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Jangka Panjang”*

SOPPENG

ᨀᨁᨃᨉ ᨁᨃ ᨁᨃᨉ ᨀᨁᨃᨉ ᨁᨃ ᨁᨃᨉ ᨁᨃᨉ ᨁᨃ ᨁᨃ





## BAB IV

# VISI DAN MISI DAERAH

### 4.1. VISI

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa visi RPJPD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) dengan kondisi masa depan yang ingin dicapai tersebut.

Visi dalam RPJPD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai kondisi ideal Kabupaten Soppeng yang diinginkan terwujud pada akhir periode RPJPD yakni tahun 2025. Visi ini dirumuskan dengan memperhatikan visi RPJPN dan visi RPJPD Provinsi Sulawesi selatan, isu-isu strategis pembangunan daerah dan aspirasi pemangku kepentingan daerah. Visi ini selanjutnya diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD guna menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun RPJMD berkenaan.

Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025, selain memperhatikan isu strategis pembangunan daerah, juga mengacu pada visi RPJPN 2005-2025 dan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025. Rumusan visi RPJPN 2005-2025 adalah **"Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil"**. Dengan rumusan itu, RPJPN memiliki tiga pokok visi yakni "Indonesia yang Maju", "Indonesia yang Mandiri" dan "Indonesia yang Adil". Rumusan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah **"Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan"**. Dengan rumusan itu, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga pokok visi yakni "provinsi terkemuka", "kemandirian lokal" dan "bernafaskan keagamaan".



Dalam revisi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025, rumusan visi yang berlaku pada dokumen sebelumnya tidak mengalami perubahan. Ini didasari pertimbangan bahwa rumusan tersebut tetap relevan dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta tetap berdasarkan pada isu strategis daerah dan aspirasi para pemangku kepentingan. Adapun rumusan visi RPJPD Kabupaten Soppeng adalah:

***“Soppeng yang Maju, Adil dan Sejahtera  
Tahun 2025”***

Rumusan visi ini mengandung tiga pokok visi yakni **“Soppeng yang Maju”**, **“Soppeng yang Adil”** dan **“Soppeng yang Sejahtera”**. Tiga pokok visi ini diharapkan menjadi arah yang jelas dalam perjalanan pembangunan jangka panjang Kabupaten Soppeng. Maksud dari masing-masing pokok visi ini adalah sebagai berikut.

**Maju** adalah kondisi kualitas manusia dari masyarakat Kabupaten Soppeng yang diharapkan terus meningkat sehingga setara dengan kualitas manusia daerah lain di Sulawesi Selatan. Kualitas manusia tersebut dilihat pada derajat pendidikan, derajat kesehatan, perkembangan kebudayaan daerah, kondisi kehidupan mental-spiritual serta kondisi ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

**Adil** adalah kondisi dimana fungsi pemerintahan dan pelayanan publik menjangkau seluruh golongan/kelompok/lapisan masyarakat pada seluruh wilayah secara memuaskan. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya mencakupi dimensi antar golongan/kelompok/lapisan masyarakat tetapi juga dimensi antar wilayah khususnya antara wilayah perdesaan dengan perkotaan.

**Sejahtera** adalah kondisi dimana kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Soppeng berada pada tingkat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pada standar yang memuaskan dimana kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan serendah mungkin dan perekonomian daerah tumbuh setara dengan rata-rata provinsi.



## 4.2. MISI

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholder* pembangunan secara keseluruhan.

Misi dalam RPJPD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dijalankan dalam mewujudkan visi. Dengan demikian, misi ini merupakan pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholder* secara keseluruhan.

Rumusan misi ini memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam RPJPD ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Berdasarkan pemahaman demikian, maka misi RPJPD ini dirumuskan sebagai berikut.

### 1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas

Misi ini mencakup upaya umum dalam terwujudnya kualitas manusia yang seutuhnya baik upaya dalam meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan maupun upaya dalam memperkuat kebudayaan daerah, kondisi mental-spiritual serta kondisi ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Misi ini mencakup upaya-upaya umum dalam peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan identitas dan daya adaptif budaya, peningkatan kualitas pemuda dan olah raga, peningkatan kualitas kualitas relasi gender dan perlindungan anak, dengan berbasis pada peningkatan kehidupan spiritual keagamaan sebagai landasannya.



## 2. Mewujudkan daya saing daerah

Misi ini mencakup upaya umum dalam terwujudnya kapasitas infrastruktur daerah dan fasilitas wilayah yang mendukung secara memadai daya saing daerah bagi berkembangnya investasi untuk sector industri dan jasa. Dengan upaya ini kemajuan daerah diharapkan terakselerasi.

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju, memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa, mendorong kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai *learning community*, menopang kemandirian daerah, mendukung perwujudan otonomi desa, mendorong interkonesitas antar kelembagaan masyarakat, mendorong kerjasama kabupaten/kota, dan menguatkan daya saing daerah.

## 3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam terwujudnya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang adil dan memuaskan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik tersebut terutama yang mencakup pada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar namun juga tetap memperhatikan urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan.

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi, meningkatkan partisipasi perempuan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, peningkatan, Penataan Kelembagaan yang lebih efektif, efisien dan transparansi serta keterbukaan informasi dan transparansi publik.



#### **4. Mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan**

Misi ini mencakup upaya umum dalam menciptakan keadilan atas hasil-hasil pembangunan baik antar lapisan masyarakat maupun antar wilayah. Tercakup didalamnya adalah perhatian kepada masyarakat miskin dan desa tertinggal.

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan pembangunan daerah yang berkualitas dan merata; mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender dan peningkatan kualitas anak dan kreatifitas pemuda.

#### **5. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat**

Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang memadai. Tercakup didalamnya upaya dorongan pertumbuhan ekonomi melalui sector-sektor unggulan yang bisa memperbaiki pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini mencakup upaya umum dalam penataan pengelolaan potensi daerah dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan, peningkatan kualitas kepariwisataan dan kebudayaan, pemeliharaan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan penanganan konflik; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan yang berkelanjutan.



**Tabel 4. 1**  
Hubungan Pokok Visi dan Misi

Pokok Visi	Misi
<b>MAJU</b>	1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas
	2. Mewujudkan Daya Saing Daerah
<b>ADIL</b>	3. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik
	4. Mewujudkan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan
<b>SEJAHTERA</b>	5. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

**Tabel 4. 2**  
Keterkaitan Misi RPJP Nasional dan  
Misi RPJPD Kabupaten Soppeng

RPJP NASIONAL	RPJPD KAB. SOPPENG
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Mewujudkan daya saing daerah
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
Mewujudkan indonesia aman, damai, dan bersatu	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	Mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan
Mewujudkan indonesia asri dan lestari	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	
Mewujudkan indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional	



**Tabel 4.3**  
Harmonisasi Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan  
Dan Misi RPJPD Kabupaten Soppeng

RPJPD PROV. SUL-SEL	RPJPD KAB. SOPPENG
Mewujudkan peningkatan kualitas manusia sulawesi selatan	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
Mewujudkan masyarakat sulawesi selatan sebagai komunitas pembelajar	Mewujudkan daya saing daerah
Mewujudkan sulawesi selatan sebagai wilayah yang kondusif	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan sulawesi selatan sebagai satu kesatuan sosial - ekonomi yang berkeadilan	Mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan
Meningkatkan peran sulawesi selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

#### 4.3. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dalam RPJPD ini diartikan sebagai keadaan yang hendak diubah dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang. Sedangkan sasaran adalah hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi-misi jangka panjang tersebut. Rumusan tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel 4. 4

Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran RPJPD Kab. Soppeng

No	Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Maju	1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan seutuhnya (T1)	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)
		2. Mewujudkan daya saing daerah	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung daya saing daerah untuk investasi (T2)	Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual (S2)
2	Adil	3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (T3)	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)
		4. Mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan	Meningkatkan keberdayaan golongan tidak mampu dan desa tertinggal (T4)	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)
3	Sejahtera	5. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan produktivitas sektor perekonomian dan pendapatan masyarakat (T5)	Meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu (S6)
				Berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan (S7)
				Meningkatnya produktivitas sektor-sektor dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)
				Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam dalam mendukung keberlanjutan produksi dan konsumsi masyarakat (S9)

# BAB V

## Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

*“Bab Ini Berisi Mendeskripsikan Mengenai Sasaran-Sasaran Pokok Pembangunan Daerah, Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Pentahapan Lima Tahunan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan”*

SOPPENG

᠑ᠠᠯᠠᠳᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠨᠤ





## BAB V

# ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

### 5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dalam Permendagri 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJPD merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap. Dijelaskan lebih jauh bahwa tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Langkah-langkah penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati; 2. Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masing-masing misi; dan 3. Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD.

Dalam revisi RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk tahapan yang sudah dilewati yakni tahapan 2005-2010 dan 2010-2015 serta tahapan yang sementara berjalan yakni tahapan 2015-2020 disesuaikan dengan rumusan misi RPJMD pada setiap tahapan tersebut. Sedangkan untuk tahapan 2020-2025 sasaran pokok dan arah kebijakannya didasarkan pada hasil analisis isu strategis dan kecenderungan tahapan sebelumnya.



## 5.2. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH UNTUK MASING-MASING MISI

Sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD ini dimaksudkan sebagai sasaran yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJPD yakni 2025. Sasaran jangka panjang ini dirumuskan untuk setiap misi, dimana setiap misi merupakan upaya untuk mewujudkan pokok visi yang relevan.

Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Soppeng untuk setiap Misi adalah sebagai berikut.

### **Misi-1: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas**

Sasaran pokok yang hendak dicapai melalui misi adalah "meningkatkan kualitas manusia dengan seutuhnya". Indikator kinerja dari sasaran pokok ini adalah "indeks pembangunan manusia", "angka rata-rata lama sekolah", "angka harapan hidup", "indeks pembangunan gender" dan "indeks pemberdayaan gender". Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah: (1) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya manusia sebagai basis pembangunan ekonomi; (2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan; (3) Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga; (4) Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah; (5) Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Sasaran pokok lain dalam menjalankan misi ini adalah "berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual". Indikator kinerja dari sasaran pokok ini adalah "angka kriminalitas". Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah:

1. Mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang bersih, aman, serasi, indah dan nyaman lahir dan bathin;
2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis;
3. Memelihara ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan masyarakat.



### **Misi-2: Mewujudkan daya saing daerah**

Sasaran pokok yang hendak dicapai melalui misi ini adalah “meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi”. Indikator kinerja dari sasaran pokok ini adalah “porsi panjang jaringan jalan kualitas baik”, “jumlah penumpang pengguna terminal”, “% desa yang terjangkau angkutan umum”, “nilai investasi PMDN dan PMA”.

Arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah; (2) Menata sistem transportasi yang mulus dan nyaman; (3) Memperbaiki dukungan sarana untuk iklim investasi yang baik.

### **Misi-3: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik**

Sasaran pokok yang hendak dicapai melalui misi ini adalah “meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan indikator kinerja “opini laporan keuangan” dan “nilai SAKIP”. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah: (1) Mewujudkan kelembagaan dan manajemen pemerintahan yang bersih, berkeadilan, efektif dan profesional; (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; (3) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi; (4) Mengefektifkan reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran pokok lain dalam menjalankan misi ini adalah “meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerja “indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik”. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah “Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik”.

### **Misi-4: Mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan**

Sasaran pokok yang hendak diwujudkan dalam menjalankan misi ini adalah “meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu” dengan indikator kinerja “angka kemiskinan”. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok tersebut adalah “Penanggulangan kemiskinan secara terpadu”. Sasaran pokok lain dalam menjalankan misi ini adalah “berkurangnya ketertinggalan desa” dengan indikator kinerja “% desa



tertinggal”. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah “Pembangunan terpadu desa tertinggal dan kawasan perdesaan”.

#### Misi-5: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran pokok yang hendak diwujudkan dalam menjalankan misi ini adalah “meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah” dengan indikator kinerja “% rata-rata pertumbuhan ekonomi”, “PDRB/kapita”, “angka pengangguran terbuka”, “% kontribusi sektor pertanian (dalam arti luas) terhadap PDRB”. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah: (1) Mengoptimalkan pengelolaan segenap sumber daya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil; (3) Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani; (4) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi; (5) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

Sasaran pokok lainnya adalah “terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan berkembangnya keindahan kota” dengan indikator kinerja “indeks kualitas lingkungan hidup daerah”. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah “Pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan berbasis RTRW”.

**Tabel 5. 1**  
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja RPJPD Kabupaten Soppeng

Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja		
Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Target 2025
Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,03 Poin
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10 Tahun
	Angka Harapan Lama Sekolah	15,25
	Angka Harapan Hidup	70,23 Tahun
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,9 Persen
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,75 Persen



Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja		
Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Target 2025
	Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA)	Menurun Tingkat kekerasan Terhadap Anak
Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual (S2)	Angka Kriminalitas	3,75 Persen
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan)	97 Persen
Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Insfrastruktur
	Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik (km dan %)	86,70%
	Rasio jaringan irigasi	13,30 Persen
	Persentase rumah tangga berakses air bersih	86,2 Persen
	Jumlah pengguna terminal	35.000 orang
	Rasio rumah layak huni	95,21 persen
	Persentase Desa yang terjangkau angkutan umum	100 Persen
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi
	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	BB
	Opini laporan keuangan	WTP
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (S5)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar	100 Persen
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	90,00 Persen
Meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu (S6)	Angka Kemiskinan	6,85 Persen
	Persentase PMKS yang terlayani	100 Persen
Berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan (S7)	% Desa Tertinggal	0,2 Persen
	Meningkatnya desa kualifikasi Mandiri	Meningkatnya Desa Mandiri
Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	% Pertumbuhan Ekonomi	8,83 Persen
	PDRB/kapita	Rp. 62.296.000
	Gini Ratio	0,25 Persen
	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,50 Persen



Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja		
Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Target 2025
	% kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	33,50 Persen
	% kontribusi sektor industri terhadap PDRB	17,20 Persen
	% kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	45,00 Persen
Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (S9)	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100 Persen
	Indeks Lingkungan Hidup (%)	73,30 Persen
	Indeks Kualitas Air	1 Persen
	Indeks Kualitas Udara	92,45 Persen
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	0,45 Persen

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 2**  
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025

Pokok Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target 2025	
<b>Maju</b>	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) = 68,03	1) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya manusia sebagai dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah. (2005-2010) 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (2011-2015) 3) Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga. (2015-2020) 4) Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah. (2015-2020)
			Angka Rata-rata Lama Sekolah = 10	
			Angka Harapan Lama Sekolah = 15,25	
			Angka Harapan Hidup = 70,23	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) = 99,9	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) = 75,75	



Pokok Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target 2025	
			Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA) = Menurun	5) Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan. (2015-2020) 6) Memantapkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta pengarusutamaan gender (2020-2025)
		Berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual (S2)	Angka Kriminalitas = 3,75	1) Mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang bersih, aman, serasi, adil serta indah dan nyaman lahir bathin yang diridhai Allah SWT. (2005-2010) 2) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis. (2011-2015) 3) Mendorong peningkatan kualitas kehidupan beragama (2015-2020) 4) Memelihara ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan masyarakat. (2020-2025)
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan) = 97	
	Mewujudkan daya saing daerah	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi (S3)	Indeks Infrastruktur = Meningkatkan	1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah.(2011-2015) 2) Menata sistem transportasi yang mulus dan nyaman. (2015-2020) 3) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi (2015-2020) 4) Memantapkan pemenuhan infrastruktur transportasi, perhubungan, pemukiman dan
			Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik (km dan %) = 86,70%	
			Rasio jaringan irigasi = 13,30	
			Persentase rumah tangga berakses air bersih = 86,2	
			Jumlah pengguna terminal (orang) = 35.000	
			Rasio rumah layak huni = 95,21	



Pokok Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target 2025	
			Persentase Desa yang terjangkau angkutan umum = 100	perumahan serta fasilitas ekonomi wilayah.(2020-2025)
Adil	Mewujudkan tata-kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah (S4)	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah = Sangat Tinggi	1) Mewujudkan kelembagaan dan manajemen pemerintahan yang bersih, berkeadilan, efektif dan profesional. (2005-2010) 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (2011-2015) 3) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi. (2015-2020). 4) Mengefektifkan reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. (2020-2025)
			Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) = BB	
			Opini laporan keuangan = WTP	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public (S5)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar = 100 Persen	1) Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik. (2015-2020). 2) Memantapkan pencapaian standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar. (2020 - 2025).	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik = 90,00 Persen		
	Mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan	Meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu (S6)	Angka kemiskinan = 6,85	1) Penanggulangan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terpadu. (2020-2025).
Persentase PMKS yang terlayani = 100				
	Berkurangnya ketertinggalan	% Desa Tertinggal = 0%		



Pokok Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target 2025	
		desa dan kawasan perdesaan (S7)	Meningkatnya desa kualifikasi Mandiri = Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengupayakan terwujudnya otonomi desa. (2005-2010).</li> <li>2) Memperkuat otonomi desa. (2011-2015).</li> <li>3) Memantapkan pembangunan terpadu desa tertinggal dan kawasan perdesaan. (2020-2025).</li> </ol>
Sejahtera	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah (S8)	% Pertumbuhan Ekonomi = 8,83	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengoptimalkan pengelolaan segenap sumber daya alam dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah. (2005-2010).</li> <li>2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. (2011-2015)</li> <li>3) Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani. (2015-2020)</li> <li>4) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. (2015-2020).</li> <li>5) Memantapkan produktivitas dan pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. (2020-2025).</li> </ol>
			PDRB/kapita= Rp. 62.296.000	
			Gini Ratio = 0,25	
			Tingkat Pengangguran Terbuka = 2,50	
			% kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB = 33,50%	
			% kontribusi sektor industri terhadap PDRB = 17,20%	
		% kontribusi sektor jasa terhadap PDRB = 45,00%		
		Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam (S9)	Penegakan Hukum Lingkungan (%) = 100%	
Indeks Lingkungan Hidup(%) = 3,30%				
Indeks Kualitas Air = 1%				



Pokok Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target 2025	
			Indeks Kualitas Udara = 92,45%	2) Pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan berbasis RTRW. (2020-2025).
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 0,45%	

### 5.3. TAHAPAN DAN PRIORITAS

#### 5.3.1. Tahapan Pertama (2005-2010)

Tahapan pertama dalam RPJPD Kabupaten Soppeng merupakan peletakan dasar dalam mencapai sasaran-sasaran pokok secara jangka panjang dan pada gilirannya mewujudkan visi jangka panjang daerah. Pada tahapan ini sejumlah arah kebijakan menjadi prioritas dan arah kebijakan tersebut menjadi substansi pada RPJMD periode yang berkenaan. Untuk sasaran pokok "meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya", arah kebijakan pembangunan diprioritaskan untuk "mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya manusia sebagai dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah".

Untuk sasaran pokok "berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual", arah kebijakan pembangunan diprioritaskan untuk "mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang bersih, aman, serasi, adil serta indah dan nyaman lahir bathin yang diridhai Allah SWT".

Untuk sasaran pokok "meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah", arah kebijakan pembangunan diprioritaskan untuk "mewujudkan kelembagaan dan manajemen pemerintahan yang bersih, berkeadilan, efektif dan profesional".

Untuk sasaran pokok "berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan", arah kebijakan pembangunan diprioritaskan untuk "mengupayakan terwujudnya otonomi desa".



Untuk sasaran pokok "meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah", arah kebijakan pembangunan diprioritaskan untuk "mengoptimalkan pengelolaan segenap sumber daya alam dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah".

Keseluruhan sasaran pokok dan arah kebijakan yang diprioritaskan tersebut difokuskan untuk mewujudkan visi RPJMD pada tahapan berkenan dengan substansi visi adalah "terwujudnya masyarakat sejahtera dan pemerintahan yang adil, jujur, profesional dan bertanggung jawab di Bumi Latemmamala.

### **5.3.2. Tahapan Kedua (2011-2015)**

Pada tahapan kedua, berbagai capaian sasaran pokok pada tahapan pertama dilanjutkan, baik dengan arah kebijakan yang sama maupun dengan arah kebijakan yang relatif berbeda. Selain itu, pada tahapan kedua juga muncul beberapa sasaran pokok yang pada tahapan pertama tidak menjadi prioritas tetapi pada tahapan kedua diprioritaskan. Terdapat juga sasaran pokok yang pada tahapan pertama diprioritaskan tetapi pada tahapan kedua tidak menjadi prioritas.

Untuk sasaran pokok "meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya", arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah "meningkatkan kualitas sumberdaya manusia".

Untuk sasaran pokok "berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual", arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah "mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis".

Untuk sasaran pokok "meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah", arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah "meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil".

Untuk sasaran pokok "terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan berkembangnya keindahan kota", arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah "mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan".



Untuk sasaran pokok "meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi", arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah "meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana daerah".

Untuk sasaran pokok "meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah", arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah "mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik".

Untuk sasaran pokok "berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan", arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah "memperkuat otonomi desa".

Keseluruhan sasaran pokok dan arah kebijakan yang diprioritaskan tersebut difokuskan untuk mewujudkan visi RPJMD pada tahapan kedua dengan substansi visi adalah "terwujudnya masyarakat sejahtera dan pemerintahan yang adil, jujur, profesional dan bertanggung jawab di Bumi Latemmamala".

### **5.3.3. Tahapan Ketiga (2015-2020)**

Tahapan ketiga merupakan tahapan akselerasi dalam pencapaian sasaran-sasaran pokok RPJPD. Pada tahapan ini, berbagai arah kebijakan pembangunan baru diprioritaskan untuk sasaran pokok yang sudah berlaku pada tahapan sebelumnya dan sifatnya merupakan penajaman dari arah kebijakan pada tahapan pertama dan kedua tersebut.

Untuk sasaran pokok "meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya", arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah: (1) Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga; (2) Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah; (3) Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Untuk sasaran pokok "berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual", arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah "mendorong peningkatan kualitas kehidupan beragama".



Untuk sasaran pokok “meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi”, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah “menata sistem transportasi yang mulus dan nyaman”.

Untuk sasaran pokok “meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah” arah kebijakan yang diprioritaskan adalah “menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi”.

Untuk sasaran pokok “meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik”, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah “menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik”.

Untuk sasaran pokok “meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah”, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah: (1) “memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani; (2) menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

Keseluruhan sasaran pokok dan arah kebijakan yang diprioritaskan ini diarahkan untuk perwujudan visi Kabupaten Soppeng dengan “pemerintahan yang melayani dan lebih baik”.

#### **5.3.4. Tahapan Keempat (2020-2025)**

Tahapan keempat merupakan tahapan pemantapan dalam mencapai berbagai sasaran pokok RPJPD ini. Ini merupakan tahapan terakhir dari 20 tahun periode RPJPD. Pada tahapan ini, beberapa sasaran pokok yang kurang diprioritaskan arah kebijakan pembangunannya, pada tahapan ini sasaran pokok dan arah kebijakan tersebut menjadi prioritas. Pada tahapan ini, juga menjadi perhatian untuk mengejar target-target kinerja sasaran pokok yang belum tercapai berdasarkan akumulasi dampak dari prioritas arah kebijakan pembangunan periode sebelumnya.

Untuk sasaran pokok “meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya”, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah “memantapkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta pengarusutamaan gender”.



Untuk sasaran pokok “berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual”, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah “memelihara ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan masyarakat”.

Untuk sasaran pokok “meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi” arah kebijakan yang diprioritaskan adalah “memantapkan pemenuhan infrastruktur transportasi, perhubungan, pemukiman dan perumahan serta fasilitas ekonomi wilayah.

Untuk sasaran pokok “meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah”, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah “mengefektifkan reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Untuk sasaran pokok “meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public”, kebijakan umum yang diprioritaskan adalah “memantapkan pencapaian standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar.

Untuk sasaran pokok “meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu”, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah “penanggulangan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terpadu”.

Untuk sasaran pokok “berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah “memantapkan pembangunan terpadu desa tertinggal dan kawasan perdesaan.

Untuk sasaran pokok “meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah”, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah “memantapkan produktivitas dan pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat”.

Untuk sasaran pokok “terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam”, arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan adalah “pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan berbasis RTRW”.



Keseluruhan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tahapan keempat RPJMD yang berkisar pada pokok visi kualitas manusia, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Tahapan dan Prioritas Pembangunan RPJPD berdasarkan tahapan RPJPM dari setiap arah kebijakan pembangunan daerah yang diprioritaskan dapat dilihat pada Tabel 5.3.

**Tabel 5.3**  
Target Kinerja setiap Tahapan dan Prioritas RPJPD  
Kabupaten Soppeng 2005-2025

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan	Indikator	Target				Kondisi Akhir (2025)
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya</b>						
<b>Arah Kebijakan Tahap I:</b> Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya manusia sebagai dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah.	Indeks Pembangunan Manusia	64,50	65,03	66,93	68,03	68,03
	Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun)	5, dan 8,15	7,05 dan 12,00	9 dan 14,75	10 dan 15,25	10 dan 15,25
<b>Arah Kebijakan Tahap II:</b> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Angka Harapan Hidup	65,05	68,55	69,12	70,23	70,23
	Indeks Pembangunan Gender	95,46 %	98,96 %	99,8%	99,9	99,9
<b>Arah Kebijakan Tahap III:</b> a. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga. b. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah. c. Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.	Indeks Pemberdayaan Gender	55,60 %	59,76 %	71,72 %	75,75	75,75
	Indeks Kekerasan Anak	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
<b>Arah Kebijakan Tahap IV:</b> Memantapkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan serta pengarusutamaan gender.						



Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan	Indikator	Target				Kondisi Akhir (2025)
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
<b>Sasaran 2: Berkembangnya Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Tertib Dan Nyaman Berlandaskan Nilai-Nilai Spiritual</b>						
<b>Arah Kebijakan Tahap I:</b> Mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang bersih, aman, serasi, adil serta indah dan nyaman lahir bathin yang diridhai Allah.	Angka Kriminalitas (%)	6,05	4,96	4,06	3,75	3,75
<b>Arah Kebijakan Tahap II:</b> Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	71	84	95	97	97
<b>Arah Kebijakan Tahap III:</b> Mendorong peningkatan kualitas kehidupan beragama.						
<b>Arah Kebijakan Tahap IV:</b> Memelihara ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan masyarakat.						
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dan Fasilitas Wilayah Dalam Mendukung Investasi</b>						
<b>Arah Kebijakan Tahap II:</b> Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah.	Indeks Infrastruktur	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
<b>Arah Kebijakan Tahap III:</b> Menata sistem transportasi yang mulus dan nyaman.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	47,15 %	49,32 %	81,24 %	86,70 %	86,70%
<b>Arah Kebijakan Tahap IV:</b> Memantapkan pemenuhan infrastruktur transportasi, perhubungan, pemukiman dan perumahan serta fasilitas ekonomi wilayah.	Rasio Jaringan Irigasi (%)	7,25	9,25	11,26	13,30	13,30
	Jumlah Pengguna Terminal (orang)	14.295	14.295	25.000	35.000	35.000
	Rasio Rumah Layak Huni (%)	77,52	77,52	89,90	95,21	95,21
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)	83,2	84,5	85,7	86,2	86,2
	Persentase Desa yang terjangkau angkutan umum	92	95	100	100	100



Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan	Indikator	Target				Kondisi Akhir (2025)
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>						
<b>Arah Kebijakan Tahap I:</b> Mewujudkan kelembagaan dan manajemen pemerintahan yang bersih, berkeadilan, efektif dan profesional.	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
<b>Arah Kebijakan Tahap II:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Opini laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>Arah Kebijakan Tahap III:</b> Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.	Opini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	C	CC	BB	BB
<b>Arah Kebijakan Tahap IV:</b> Mengefektifkan reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.						
<b>Sasaran 5: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>						
<b>Arah Kebijakan Tahap III:</b> Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar (%)	45,00	65,00	100,00	100,00	100,00
<b>Arah Kebijakan Tahap IV:</b> Memantapkan pencapaian standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar.						
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Atas Layanan Publik (%)	55,00	60,00	82,00	90,00	90,00
<b>Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Hidup Golongan Tidak Mampu</b>						
<b>Arah Kebijakan Tahap IV:</b> Penanggulangan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terpadu;	Angka Kemiskinan (%)	8,70	8,44	7,26	6,85	6,85
	Persentase PMKS yang Terlayani	87	95	100	100	100



Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan	Indikator	Target				Kondisi Akhir (2025)
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
<b>Sasaran 7: Berkurangnya Ketertinggalan Desa Dan Kawasan Perdesaan</b>						
<b>Arah Kebijakan Tahap I:</b> Mengupayakan terwujudnya otonomi desa.	Meningkatnya Desa Kualifikasi Mandiri	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
<b>Arah Kebijakan Tahap II:</b> Memperkuat otonomi desa.						
<b>Arah Kebijakan Tahap IV:</b> Memantapkan pembangunan terpadu desa tertinggal dan kawasan perdesaan.	Persentase Desa Tertinggal	12%	8%	4%	0%	0,2%
<b>Sasaran 8: Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah</b>						
<b>Arah Kebijakan Tahap I:</b> Mengoptimalkan pengelolaan segenap sumber daya alam dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,77	6,09	8,60	8,83	8,83
<b>Arah Kebijakan Tahap II:</b> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	29,65	29,27	31,56	33,50	33,50
	Gini Ratio	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30
<b>Arah Kebijakan Tahap III:</b> 1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani; 2. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	10,05	10,35	16,47	17,20	17,20
	Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Jasa terhadap PDRB	42,45	44,74	44,85	45,00	45,00
<b>Arah Kebijakan Tahap IV:</b> Memantapkan produktivitas dan pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.	PDRB Per Kapita (Rp)	25.350.000	27.360.000	42.828.000	62.296.000	62.296.000
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,82	5,48	4,58	2,50	2,50



Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan	Indikator	Target				Kondisi Akhir (2025)
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
<b>Sasaran 9: Terpeliharanya Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam</b>						
<b>Arah Kebijakan Tahap II:</b> Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  <b>Arah Kebijakan Tahap IV:</b> Pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan berbasis RTRW.	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100	100	100	100	100
	Indeks Lingkungan Hidup (%)	60,72	61,37	67,37	73,30	73,30
	Indeks Kualitas Udara (%)	87,65	89,86	91,71	92,45	92,45
	Indeks Kualitas Air (%)	3,72	3,32	1,63	1	1
	Indeks Kualitas Udara (%)	87,65	89,86	91,71	92,45	92,45

# BAB VI

## Penutup dan Kaedah Pelaksanaan

*“Bab yang Menguraikan Mengenai Langkah - Langkah Pelaksanaan Dari Visi, Misi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Termasuk Peran Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pelaku Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Rpjpd Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025”*

SOPPENG

ᨀᨁᨂᨃ ᨄᨅ ᨆᨇ ᨈᨉᨊ ᨋᨌ ᨍᨎ ᨏᨐ ᨑᨒ ᨓᨔ ᨕᨖ ᨘᨗ ᨙᨚ ᨛ᨜ ᨝᨞ ᨟ᨠ





## BAB VI

# PENUTUP DAN KAEDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah hingga tahun 2025.

Perubahan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025 merupakan payung penyelenggaraan pembangunan secara jangka panjang yang harus dijalankan dengan kaidah-kaidah tertentu. Dalam menjalankan RPJPD ini pemerintah Kabupaten Soppeng wajib menerapkan lima azas umum penyelenggaraan pemerintahan yaitu: (1) kepentingan umum; (2) profesionalisme; (3) transparansi; (4) akuntabilitas; dan (5) kepastian hukum.

Kepentingan umum adalah azas yang mendahulukan kepentingan masyarakat umum atas terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dengan mengutamakan masyarakat sebagai penerima manfaat, bukan obyek pembangunan tetapi berperan serta dalam setiap program pembangunan daerah Kabupaten Soppeng, pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pembangunan nasional.

Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian baik secara ilmiah maupun berbasis pengalaman yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar mampu memberikan dampak kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing daerah yang terus mengalami kemajuan bagi Kabupaten Soppeng.

Transparansi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan (pihak pemerintah sendiri, dunia usaha dan masyarakat sipil) terhadap semua informasi terkait berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah serta capaian kerjanya baik ditingkat nasional maupun daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng. Dalam konteks ini harus dapat dipastikan bahwa pemangku



kepentingan dapat mengetahui secara jelas proses perumusan kebijakan publik dan pelaksanaannya.

Akuntabilitas adalah azas yang menekankan bahwa setiap sasaran dan arah kebijakn dan hasil akhir dari kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng harus dapat dipertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat.

Kepastian hukum adalah sistem pemerintahan yang dapat menjamin kepastian hukum, rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan dan ketaatan terhadap hukum. Dengan kepastian hukum ini maka akan terbangun saling kepercayaan diantara unsur dalam masyarakat.

RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 ini merupakan acuan Pemerintah Daerah serta berbagai pemangku kepentingan dari dunia usaha dan masyarakat sipil sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2025, sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif bersama masyarakat secara umum termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan isi RPJPD ini khususnya terkait Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bupati Kabupaten Soppeng pada setiap periode berkewajiban untuk menjabarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah dalam RPJPD ini kedalam RPJMD Kabupaten Soppeng yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih pada tahapan yang berkenaan. Dalam penjabaran tersebut sasaran pokok dan arah



kebijakan pembangunan terkait pada periode yang berkenaan hendaknya menjadi perhatian pokok dalam penjabaran.

3. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Soppeng berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD dan RPJMD Kabupaten Soppeng, khususnya yang terkait langsung dengan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok dalam RPJPD ini pada tahapan/periode yang berkenaan.
4. Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Soppeng serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah berkewajiban menjaga konsistensi antara RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, dan RAPBD/APBD dalam indikator dan target kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel.
5. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, kalangan dunia usaha, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya.
6. Perguruan tinggi di daerah ini, ikut bertanggungjawab dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (stakeholder).
7. Sebelum berakhirnya periode RPJPD 2005-2025 ini pemerintah Kabupaten Soppeng berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya dengan waktu dan format penyusunan sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan dengan peraturan-undangan daerah yakni Peraturan Daerah (PERDA), tentu saja harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan.

Pada akhirnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang akan memperkuat jati diri masyarakat Soppeng dalam suasana demokratis, tenteram dan damai yang mengacu pada nilai-nilai budaya lokal yang bernafaskan keagamaan.



Sehubungan dengan itu, semua pihak (stakeholders) perlu berperan aktif menurut fungsi dan kemampuan masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 menurut Peraturan Daerah ini yang harus dipedomani dan diimplementasikan secara optimal.

Diakui bahwa berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah, tergantung pada sejauh mana peran aktif, sikap mental, tekad dan semangat kedisiplinan, profesional, transparan, partisipasi dan akuntabilitas segenap aparatur pemerintah/ pemerintah daerah dan lembaga legislatif serta masyarakat luas termasuk dunia usaha.

**BUPATI SOPPENG,**

**H. A. KASWADI RAZAK**

# “ Soppeng yang Maju, Adil, dan Sejahtera 2025



Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng